



PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU



H. YAUMIL AMBO DJIWA, SH
(Bupati Pasangkayu)

Dr. H. HERNY AGUS, S. Sos, M. Si
(Wakil Bupati Pasangkayu)

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

AUDITED

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	xiv
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	xvi
NERACA.....	xvii
LAPORAN OPERASIONAL.....	xix
LAPORAN ARUS KAS.....	xxi
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xxiii
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	24
7.1. Pendahuluan.....	24
7.1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	24
7.1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	25
7.1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.....	27
7.2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD	28
7.2.1 Ekonomi Makro	28
7.2.2 Kebijakan Keuangan.....	33
7.2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.....	39
7.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	39
7.3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	39
7.3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	43
7.3.3 Pergeseran dan Perubahan APBD.....	44
7.4. Kebijakan Akuntansi.....	44
7.4.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah.....	44
7.4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	46
7.4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	48
7.4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	59
7.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	62
7.5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	62
7.5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	96
7.5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca	98



7.5.4	Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	142
7.5.5	Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas	177
7.5.6	Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	201
7.6.	PENUTUP	205
7.6.1	Laporan Realisasi Anggaran	205
7.6.2	Laporan Perubahan SAL	207
7.6.3	Neraca	207
7.6.4	Laporan Operasional	208
7.6.5	Laporan Arus Kas	208
7.6.6	Laporan Perubahan Ekuitas	209

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pasangkayu	29
Tabel 2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pasangkayu.....	29
Tabel 3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Pasangkayu.....	29
Tabel 4	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pasangkayu	30
Tabel 5	Gini Ratio Kabupaten Pasangkayu.....	30
Tabel 6	Indeks Pembangunan Manusia.....	31
Tabel 7	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasangkayu	32
Tabel 8	Tingkat Inflasi Kabupaten Pasangkayu.....	32
Tabel 9	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pasangkayu (miliar rupiah)	33
Tabel 10	Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022 – 2024	36
Tabel 11	Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022 – 2024.....	37
Tabel 12	Pembiayaan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022 – 2024	38
Tabel 13	Analisis Kinerja Keuangan untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024.....	39
Tabel 14	Nilai Minimum Kapitalisasi	60
Tabel 15	Tarif Penyusutan Aset Tetap	61
Tabel 7.5.1.1	Rincian Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2024.....	62
Tabel 7.5.1.2	Rincian Pendapatan Asli Daerah-LRA Tahun Anggaran 2024.....	63
Tabel 7.5.1.3	Rincian Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024.....	64
Tabel 7.5.1.4	Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Tahun Anggaran 2024.....	64
Tabel 7.5.1.5	Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2024.....	65
Tabel 7.5.1.6	Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2024.....	65
Tabel 7.5.1.7	Rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2024.....	66
Tabel 7.5.1.8	Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA Tahun Anggaran 2024	67
Tabel 7.5.1.9	Rincian Lain-Lain PAD yang Sah-LRA Tahun Anggaran 2024.....	68
Tabel 7.5.1.10	Pendapatan Transfer-LRA Tahun Anggaran 2024.....	69
Tabel 7.5.1.11	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA Tahun Anggaran 2024.....	70
Tabel 7.5.1.12	Rincian Bagi Hasil Pajak - LRA Tahun Anggaran 2024	70
Tabel 7.5.1.13	Rincian Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA Tahun Anggaran 2024.....	71

Tabel 7.5.1.14	Rincian Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA Tahun Anggaran 2024...	71
Tabel 7.5.1.15	Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA Tahun Anggaran 2024	72
Tabel 7.5.1.16	Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA Tahun Anggaran 2024.....	73
Tabel 7.5.1.17	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun Anggaran 2024.....	74
Tabel 7.5.1.18	Rincian Dana Desa - LRA Tahun Anggaran 2024.....	74
Tabel 7.5.1.19	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2024.....	75
Tabel 7.5.1.20	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun Anggaran 2024	76
Tabel 7.5.1.21	Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024	77
Tabel 7.5.1.22	Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2024.....	77
Tabel 7.5.1.23	Pendapatan Hibah - LRA Tahun Anggaran 2024	78
Tabel 7.5.1.24	Rincian Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- LRA Tahun Anggaran 2024.....	78
Tabel 7.5.1.25	Rincian Belanja Tahun Anggaran 2024	79
Tabel 7.5.1.26	Rincian Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024.....	80
Tabel 7.5.1.27	Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024	81
Tabel 7.5.1.28	Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024.....	82
Tabel 7.5.1.29	Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024.....	83
Tabel 7.5.1.30	Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024.....	84
Tabel 7.5.1.31	Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2024.....	85
Tabel 7.5.1.32	Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2024	85
Tabel 7.5.1.33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024.....	86
Tabel 7.5.1.34	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024.....	87
Tabel 7.5.1.35	Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2024.....	88
Tabel 7.5.1.36	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024.....	89
Tabel 7.5.1.37	Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2024.....	90
Tabel 7.5.1.38	Rincian Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024.....	91
Tabel 7.5.1.39	Rincian Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024.....	92
Tabel 7.5.1.40	Surplus/Defisit Tahun Anggaran 2024	93
Tabel 7.5.1.41	Rincian Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024	93
Tabel 7.5.1.42	Rincian Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024	94
Tabel 7.5.1.43	Rincian Koreksi Silpa Tahun Anggaran 2024.....	94

Tabel 7.5.1.44	Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2024.....	95
Tabel 7.5.3. 1	Rincian Aset	98
Tabel 7.5.3. 2	Rekening di Kas Daerah.....	99
Tabel 7.5.3. 3	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran (Sisa UP)	100
Tabel 7.5.3. 4	Kas di Bendahara Penerimaan.....	101
Tabel 7.5.3. 5	Kas di Bendahara BLUD.....	101
Tabel 7.5.3. 6	Kas di Bendahara FKTP/Puskesmas	102
Tabel 7.5.3. 7	Kas di Bendahara BOK	103
Tabel 7.5.3. 8	Piutang Pajak.....	106
Tabel 7.5.3. 9	Penyisihan Piutang Pajak	107
Tabel 7.5.3. 10	Piutang Retribusi	108
Tabel 7.5.3. 11	Penyisihan Piutang Retribusi	109
Tabel 7.5.3. 12	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	109
Tabel 7.5.3. 13	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah.....	110
Tabel 7.5.3. 14	Beban Dibayar Di Muka	111
Tabel 7.5.3. 15	Bagian Lancar Penjualan Angsuran	111
Tabel 7.5.3. 16	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran.....	112
Tabel 7.5.3. 17	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.....	114
Tabel 7.5.3. 18	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	115
Tabel 7.5.3. 19	Piutang Lain-Lain.....	115
Tabel 7.5.3. 20	Piutang Pihak Ketiga (Putus Kontrak)	116
Tabel 7.5.3. 21	Denda Angsuran Perumahan	117
Tabel 7.5.3. 22	Piutang Pada Pihak Ketiga (Kelebihan Pembayaran)	117
Tabel 7.5.3. 23	Daftar Penyisihan Piutang Lain-lain Tidak Tertagih.....	118
Tabel 7.5.3. 24	Daftar Persediaan	119
Tabel 7.5.3. 25	Rincian Daftar barang Rusak Atau Kadaluwarsa.....	119
Tabel 7.5.3. 26	Rincian Dana Bergulir (berdasarkan tahun penyaluran)	121
Tabel 7.5.3. 27	Daftar Dana Bergulir Diragukan Tertagih.....	122
Tabel 7.5.3. 28	Penyertaan Modal Kepada Perusahaan	122
Tabel 7.5.3. 29	Rincian Aset Tetap	123
Tabel 7.5.3. 30	Mutasi Aset Tetap - Tanah Tahun 2024.....	123
Tabel 7.5.3. 31	Mutasi Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Tahun 2024	124
Tabel 7.5.3. 32	Mutasi Aset Tetap - Gedung dan Bangunan Tahun 2024	125

Tabel 7.5.3.33 Mutasi Aset Tetap - Jalan Jaringan dan Irigasi Tahun 2024	125
Tabel 7.5.3. 34 Mutasi Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya Tahun 2024	126
Tabel 7.5.3. 35 Mutasi Aset Tetap - Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024	127
Tabel 7.5.3. 36 Mutasi Aset Tetap - Akumulasi Penyusutan Tahun 2024	128
Tabel 7.5.3. 37 Saldo Akumulasi Penyusutan per Jenis Aset Tetap	129
Tabel 7.5.3. 38 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	131
Tabel 7.5.3. 39 Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	131
Tabel 7.5.3. 40 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 2024	132
Tabel 7.5.3. 41 Mutasi Aset Lainnya - Aset Tak Berwujud 2024	132
Tabel 7.5.3. 42 Daftar Aset Tidak Berwujud	133
Tabel 7.5.3. 43 Daftar Aset Lain-lain	134
Tabel 7.5.3. 44 Mutasi Aset Lainnya	134
Tabel 7.5.3. 45 Daftar Kewajiban jangka Pendek	135
Tabel 7.5.3.46 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	136
Tabel 7.5.3.47 Mutasi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada BUD	136
Tabel 7.5.3. 48 Mutasi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada Kas Lainnya Bendahara Pengeluaran	137
Tabel 7.5.3. 49 Mutasi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada Kas Bendahara Dana Bos	137
Tabel 7.5.3. 50 Mutasi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada Kas Bendahara Pengeluaran JKN	137
Tabel 7.5.3. 51 Mutasi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada Kas Bendahara Pengeluaran BOK	137
Tabel 7.5.3. 52 Pendapatan Diterima Dimuka	138
Tabel 7.5.3. 53 Utang Belanja	138
Tabel 7.5.3. 54 Daftar Utang Belanja Pegawai Tahun 2024	139
Tabel 7.5.3. 55 Daftar Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024	139
Tabel 7.5.3. 56 Daftar Utang Belanja Pemeliharaan Tahun 2024	139
Tabel 7.5.3. 57 Daftar Utang Belanja Hibah Tahun 2024	140
Tabel 7.5.3. 58 Daftar Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024	140
Tabel 7.5.3. 59 Daftar Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024	140
Tabel 7.5.3. 60 Daftar Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024	140
Tabel 7.5.3. 61 Daftar Utang Jangka Pendek Lainnya	141
Tabel 7.5.4.1 Rincian Pendapatan - LO Tahun Anggaran 2024	142

Tabel 7.5.4.2	Rincian Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024	143
Tabel 7.5.4.3	Rincian Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024.....	143
Tabel 7.5.4.4	Penjelasan Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun Anggaran 2024	144
Tabel 7.5.4.5	Rincian Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024.....	145
Tabel 7.5.4.6	Penjelasan Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun Anggaran 2024.....	145
Tabel 7.5.4.7	Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun Anggaran 2024.....	146
Tabel 7.5.4.8	Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Tahun Anggaran 2024.....	146
Tabel 7.5.4.9	Penjelasan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Tahun Anggaran 2024.....	147
Tabel 7.5.4.10	Pendapatan Transfer - LO Tahun Anggaran 2024	148
Tabel 7.5.4.11	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun Anggaran 2024.	148
Tabel 7.5.4.12	Rincian Dana Bagi Hasil Pajak - LO Tahun Anggaran 2024.....	149
Tabel 7.5.4.13	Penjelasan Dana Bagi Hasil Pajak - LO Tahun Anggaran 2024.....	149
Tabel 7.5.4.14	Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO Tahun Anggaran 2024.....	150
Tabel 7.5.4.15	Penjelasan Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO Tahun Anggaran 2024.....	150
Tabel 7.5.4.16	Rincian Dana Alokasi Umum (DAU) - LO Tahun Anggaran 2024....	151
Tabel 7.5.4.17	Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO Tahun Anggaran 2024.....	151
Tabel 7.5.4.18	Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO Tahun Anggaran 2024.....	152
Tabel 7.5.4.19	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LO Tahun Anggaran 2024.....	153
Tabel 7.5.4.20	Rincian Dana Penyesuaian - LO Tahun Anggaran 2024.....	153
Tabel 7.5.4.21	Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi- LO Tahun Anggaran 2024.....	154
Tabel 7.5.4.22	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO Tahun Anggaran 2024.....	155
Tabel 7.5.4.23	Rincian Pendapatan Hibah - LO Tahun Anggaran 2024.....	155
Tabel 7.5.4.24	Penjelasan Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2024.....	156
Tabel 7.5.4.25	Rincian Pendapatan Lainnya - LO Tahun Anggaran 2024	157
Tabel 7.5.4.26	Penjelasan Pendapatan Lainnya - LO.....	157
Tabel 7.5.4.27	Rincian Beban Operasional Tahun Anggaran 2024.....	158

Tabel 7.5.4.28	Beban Pegawai Tahun Anggaran 2024	159
Tabel 7.5.4.29	Penjelasan Rincian Beban Pegawai- LO Tahun Anggaran 2024	159
Tabel 7.5.4.30	Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024.....	160
Tabel 7.5.4.31	Rincian Beban Persediaan Tahun Anggaran 2024.....	161
Tabel 7.5.4.32	Penjelasan Beban Persediaan Tahun Anggaran 2024	161
Tabel 7.5.4.33	Rincian Beban Jasa Tahun Anggaran 2024.....	162
Tabel 7.5.4.34	Penjelasan Beban Jasa Tahun Anggaran 2024.....	163
Tabel 7.5.4.35	Rincian Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2024	164
Tabel 7.5.4.36	Penjelasan Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2024.....	164
Tabel 7.5.4.37	Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2024	165
Tabel 7.5.4.38	Beban Hibah Tahun Anggaran 2024.....	165
Tabel 7.5.4.39	Penjelasan Beban Hibah Tahun Anggaran 2024.....	166
Tabel 7.5.4.40	Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024.....	167
Tabel 7.5.4.41	Beban Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024	168
Tabel 7.5.4.42	Beban Bagi Hasil Tahun Anggaran 2024.....	168
Tabel 7.5.4.43	Beban Penyusutan Tahun Anggaran 2024	169
Tabel 7.5.4.44	Penjelasan Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun Anggaran 2024.....	169
Tabel 7.5.4.45	Beban Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2024.....	170
Tabel 7.5.4.46	Penjelasan Beban Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2024.....	170
Tabel 7.5.4.47	Beban Lain-lain Tahun Anggaran 2024	171
Tabel 7.5.4.48	Beban Lain-lain Tahun Anggaran 2024	171
Tabel 7.5.4.49	Beban Transfer Tahun Anggaran 2024	173
Tabel 7.5.4.50	Rincian Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional Tahun Anggaran 2024.....	173
Tabel 7.5.4.51	Rincian Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2024.....	174
Tabel 7.5.4.52	Rincian Pos Luar Biasa Tahun Anggaran 2024	175
Tabel 7.5.4.53	Beban Luar Biasa Tahun Anggaran 2024	175
Tabel 7.5.4.54	Rincian Surplus/Defisit-LO Tahun Anggaran 2024.....	176
Tabel 7.5.5.1	Rincian Arus Kas Bersih.....	177
Tabel 7.5.5.2	Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi	178
Tabel 7.5.5.3	Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	178
Tabel 7.5.5.4	Rincian Pendapatan Pajak Daerah.....	179
Tabel 7.5.5.5	Rincian Pendapatan Retribusi Daerah.....	179

Tabel 7.5.5.6	Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.....	180
Tabel 7.5.5.7	Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.....	180
Tabel 7.5.5.8	Rincian Dana Bagi Hasil Pajak	180
Tabel 7.5.5.9	Rincian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	181
Tabel 7.5.5.10	Rincian Dana Alokasi Umum	181
Tabel 7.5.5.11	Rincian Dana Alokasi Khusus - Fisik	182
Tabel 7.5.5.12	Rincian Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	182
Tabel 7.5.5.13	Rincian Dana Penyesuaian	183
Tabel 7.5.5.14	Rincian Dana Desa	183
Tabel 7.5.5.15	Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak	183
Tabel 7.5.5.16	Rincian Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	184
Tabel 7.5.5.17	Rincian Pendapatan Hibah (Sumbangan Pihak Ketiga)	184
Tabel 7.5.5.18	Rincian Pendapatan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2024 ...	184
Tabel 7.5.5.19	Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	185
Tabel 7.5.5.20	Rincian Belanja Pegawai.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 7.5.5.21	Rincian Belanja Barang dan Jasa	186
Tabel 7.5.5.22	Rincian Belanja Subsidi	186
Tabel 7.5.5.23	Rincian Belanja Hibah	186
Tabel 7.5.5.24	Rincian Belanja Bantuan Sosial	187
Tabel 7.5.5.25	Rincian Belanja Tak Terduga.....	187
Tabel 7.5.5.26	Rincian Bagi Hasil	187
Tabel 7.5.5.27	Rincian Bantuan Keuangan.....	188
Tabel 7.5.5.28	Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	188
Tabel 7.5.5.29	Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Non Keuangan.....	189
Tabel 7.5.5.30	Rincian Belanja Tanah	189
Tabel 7.5.5.31	Rincian Belanja Peralatan dan Mesin.....	190
Tabel 7.5.5.32	Rincian Belanja Bangunan dan Gedung.....	190
Tabel 7.5.5.33	Rincian Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi.....	190
Tabel 7.5.5.34	Rincian Belanja Aset Tetap Lainnya.....	191
Tabel 7.5.5.35	Rincian Belanja Aset Lainnya.....	191
Tabel 7.5.5.36	Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	192
Tabel 7.5.5.37	Rincian Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	193

Tabel 7.5.5.38	Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran	193
Tabel 7.5.5.39	Rincian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di BUD	194
Tabel 7.5.5.40	Rincian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di Bendahara Pengeluaran	194
Tabel 7.5.5.41	Rincian Penerimaan Utang Lainnya di Bendahara Pengeluaran.....	195
Tabel 7.5.5.42	Rincian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di Bendahara Dana BOS.....	195
Tabel 7.5.5.43	Rincian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di Bendahara JKN	Error! Bookmark not defined.
Tabel 7.5.5.44	Rincian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di Bendahara BOK	196
Tabel 7.5.5.45	Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran	196
Tabel 7.5.5.46	Rincian Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).....	197
Tabel 7.5.5.47	Rincian Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di Bendahara Pengeluaran.....	197
Tabel 7.5.5.48	Rincian Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di Bendahara Dana BOS.....	198
Tabel 7.5.5.49	Rincian Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di Bendahara JKN	198
Tabel 7.5.5.50	Rincian Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di Bendahara BOK	199
Tabel 7.5.5.51	Koreksi Silpa.....	199
Tabel 7.5.6.1	Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	202

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Konsolidasi)
Lampiran 2.1	Hibah
Lampiran 2.2	Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Lampiran 3	Realisasi Bantuan Sosial
Lampiran 4	Laporan Realisasi Belanja Modal Tanah
Lampiran 5	Laporan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Lampiran 6	Laporan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Lampiran 7	Laporan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Lampiran 8	Laporan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Lampiran 9	Laporan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya
Lampiran 10.1	Laporan Realisasi Bagi Hasil Pajak
Lampiran 10.2	Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa
Lampiran 10.3	Laporan Realisasi Dana Desa
Lampiran 10.4	Laporan Realisasi Dana Desa Tambahan
Lampiran 11	Silpa
Lampiran 12.1	Kas Dana Bosp Negeri 2024
Lampiran 12.2	Kas Dana BOSP Swasta 2024
Lampiran 13	Rincian Piutang Pajak
Lampiran 14	Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak
Lampiran 15	Rincian Piutang Retribusi
Lampiran 16	Rincian Penyisihan Piutang Retribusi
Lampiran 17	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah
Lampiran 17.7	Rincian Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah
Lampiran 18	Rincian Beban Sewa Dibayar Di Muka
Lampiran 19	Rincian Mutasi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Lampiran 20	Rincian Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Lampiran 21.1	Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Lampiran 21.2	Rincian Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Lampiran 22	Rincian Daftar Piutang Pihak Ketiga (Putus Kontrak)
Lampiran 23	Rincian Denda Angsuran Perumahan
Lampiran 24	Rincian Daftar Piutang Pihak Ketiga (Kelebihan Pembayaran)
Lampiran 25.1	Rincian Penyisihan Piutang Pihak Ketiga (Putus Kontrak)
Lampiran 25.2	Rincian Penyisihan Piutang Denda Angsuran Perumahan
Lampiran 25.3	Rincian Penyisihan Piutang Kelebihan Pembayaran
Lampiran 25.4	Rincian Penyisihan Piutang Uang Muka Belanja Modal
Lampiran 25.5	Rincian Penyisihan Piutang Uang Muka Belanja Hibah

Lampiran 26	Rincian Persediaan per SKPD
Lampiran 27.1	Rincian Obat Dan Perbekalan Kesehatan Rusak Atau Kadaluarsa Per Skpd
Lampiran 27.2	Daftar Kertas Berharga Yang Kadaluarsa Dinas Lingkungan Hidup
Lampiran 27.3	Daftar Kertas Berharga Yang Kadaluarsa Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
Lampiran 27.4	Daftar Kertas Berharga Yang Rusak Badan Pendapatan Daerah
Lampiran 27.5	Daftar Barang Persediaan Rusak Dan Kadaluarsa DP2KBP3A
Lampiran 28.1	Rincian Penerima Dana Bergulir 2009
Lampiran 28.2	Rincian Penerima Dana Bergulir 2008 dan 2010
Lampiran 28.3	Daftar Dana Bergulir Diragukan Tertagih
Lampiran 29	Rincian Aset Tetap Tanah Per SKPD
Lampiran 30	Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD
Lampiran 31	Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Lampiran 32	Rincian Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi per SKPD
Lampiran 33	Rincian Aset Tetap Lainnya per SKPD
Lampiran 34	Rincian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD
Lampiran 35	Rincian Aset Tak Berwujud
Lampiran 36	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka
Lampiran 37	Rincian Utang Belanja Pegawai Per SKPD
Lampiran 38	Rincian Utang Belanja Jasa per SKPD
Lampiran 39	Rincian Utang Belanja Barang per SKPD
Lampiran 40	Rincian Utang Belanja Pemeliharaan per SKPD
Lampiran 41	Rincian Utang Belanja Hibah per SKPD
Lampiran 42	Rincian Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD
Lampiran 43	Rincian Utang Belanja Modal Gedung dan bangunan per SKPD
Lampiran 44	Rincian Utang Belanja Modal Jalan Jaringan, dan Irigasi per SKPD
Lampiran 45	Penjelasan Surplus Defisit non Operasional-LO



PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADAERAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

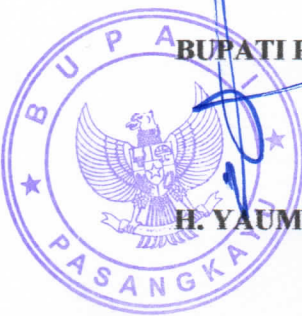
AUDITED

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref.	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
Pendapatan-LRA	7.5.1.1	842.795.145.456,00	852.847.983.621,86	101,19%	828.585.205.837,46
Pendapatan Asli Daerah-LRA	7.5.1.1 A	49.197.032.611,00	61.101.297.060,86	124,20%	59.370.848.813,46
Pendapatan Pajak Daerah-LRA	7.5.1.1 A. a	14.833.315.952,00	22.965.168.782,36	154,82%	16.807.664.021,00
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	7.5.1.1 A. b	5.814.633.543,00	8.262.414.576,08	142,10%	4.714.260.496,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA	7.5.1.1 A. c	3.159.163.585,00	3.173.536.172,00	100,45%	3.146.110.906,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA	7.5.1.1 A. d	25.389.919.531,00	26.700.177.530,42	105,16%	34.702.813.390,46
Pendapatan Transfer-LRA	7.5.1.1 B	786.416.210.653,00	784.455.018.458,00	99,75%	768.664.685.044,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LRA	7.5.1.1 B. a	700.158.333.000,00	695.020.759.614,00	99,27%	681.904.851.030,00
Dana Bagi Hasil Pajak - LRA	7.5.1.1 B. a. 1	7.846.503.000,00	9.531.487.000,00	121,47%	10.116.542.067,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LRA	7.5.1.1 B. a. 2	12.190.176.000,00	12.192.946.000,00	100,02%	14.070.260.145,00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	7.5.1.1 B. a. 3	496.999.363.000,00	496.999.363.000,00	100,00%	473.350.213.036,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA	7.5.1.1 B. a. 4	103.477.705.000,00	102.005.217.974,00	98,58%	104.368.130.391,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	7.5.1.1 B. a. 5	79.644.586.000,00	74.291.745.640,00	93,28%	79.999.705.391,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	7.5.1.1 B. b	54.694.684.000,00	54.694.684.000,00	100,00%	53.799.805.000,00
Dana Penyesuaian - LRA	7.5.1.1 B. b. 1	0,00	0,00	0,00%	0,00
Dana Desa - LRA	7.5.1.1 B. b. 2	54.694.684.000,00	54.694.684.000,00	100,00%	53.799.805.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi - LRA	7.5.1.1 B. c	31.563.193.653,00	34.739.574.844,00	110,06%	32.960.029.014,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi - LRA	7.5.1.1 B. c. 1	31.563.193.653,00	34.739.574.844,00	110,06%	32.672.529.014,00
Bantuan Keuangan - LRA	7.5.1.1 B. c. 2	0,00	0,00		287.500.000,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA	7.5.1.1 C	7.181.902.192,00	7.291.688.103,00	101,53%	529.671.980,00
Pendapatan Hibah - LRA	7.5.1.1 C. a	500.000.000,00	736.129.795,00	147,23%	529.671.980,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.5.1.1 C. b	6.681.902.192,00	6.555.538.308,00	98,11%	0,00
Belanja	7.5.1.2	786.200.486.924,00	746.087.485.394,00	94,90%	713.933.362.250,71
Belanja Operasi	7.5.1.2 A	592.043.779.189,00	563.569.908.071,00	95,19%	515.820.956.699,71
Belanja Pegawai	7.5.1.2 A. a	310.032.855.023,00	298.942.450.068,00	96,42%	283.442.561.180,00
Belanja Barang dan Jasa	7.5.1.2 A. b	243.757.090.379,00	227.464.421.857,00	93,32%	198.846.542.410,71
Belanja Hibah	7.5.1.2 A. c	37.863.833.787,00	36.825.036.146,00	97,26%	33.141.853.109,00
Belanja Bantuan Sosial	7.5.1.2 A. d	390.000.000,00	338.000.000,00	86,67%	390.000.000,00
Belanja Modal	7.5.1.2 B	193.048.754.555,00	182.034.249.323,00	94,29%	197.783.625.551,00
Belanja Modal Tanah	7.5.1.2 B. a	1.556.964.900,00	1.556.819.900,00	99,99%	999.732.700,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.5.1.2 B. b	35.011.453.237,00	33.154.767.773,00	94,70%	23.481.480.203,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.5.1.2 B. c	45.827.837.256,00	43.406.647.247,00	94,72%	64.160.323.251,00
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	7.5.1.2 B. d	109.868.124.733,00	103.170.690.203,00	93,90%	109.042.548.297,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.5.1.2 B. e	701.397.000,00	672.874.200,00	95,93%	97.765.100,00
Belanja Modal Aset Lainnya	7.5.1.2 B. f	82.977.429,00	72.450.000,00	87,31%	1.776.000,00
Belanja Tidak Terduga	7.5.1.2 C	1.107.953.180,00	483.328.000,00	43,62%	328.780.000,00
Belanja Tidak Terduga	7.5.1.2 C	1.107.953.180,00	483.328.000,00	43,62%	328.780.000,00
Belanja Transfer	7.5.1.3	106.616.636.595,00	106.396.589.423,00	99,79%	102.897.030.524,00
Belanja Bagi Hasil		1.724.590.695,00	1.724.590.695,00	100,00%	1.398.679.900,00
Belanja Bantuan Keuangan		104.892.045.900,00	104.671.998.728,00	99,79%	101.498.350.624,00
SURPLUS / (DEFISIT)	7.5.1.4	(50.021.978.063,00)	363.908.804,86	-0,73%	11.734.813.062,75

Pembiayaan	7.5.1.5				
Penerimaan Pembiayaan	7.5.1.5 A	50.021.978.063,00	50.045.678.063,32	100,05%	38.287.165.000,57
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu		50.021.978.063,00	50.021.978.063,32	100,00%	38.287.165.000,57
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			23.700.000,00		
Pengeluaran Pembiayaan	7.5.1.5 B	0,00	0,00	0,00%	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada PFK		0,00	0,00	0,00%	0,00
Koreksi Silpa	7.5.1.5 C	0,00	0,00	0,00%	0,00
Jumlah Koreksi Silpa		0,00	0,00	0,00%	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	7.5.1.5 D	50.021.978.063,00	50.045.678.063,32	100,05%	38.287.165.000,57
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	7.5.1.6	0,00	50.409.586.868,18	0,00%	50.021.978.063,32

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan


BUPATI PASANGKAYU
H. YAUMIL AMBO DJIWA



PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

AUDITED

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref.	2024	2023
Saldo Anggaran Lebih Awal	7.5.2.1	50.021.978.063,32	38.287.165.000,57
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	7.5.2.2	50.021.978.063,32	38.287.165.000,57
Sub Total		0,00	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	7.5.2.3	50.409.586.868,18	50.021.978.063,32
Sub Total		50.409.586.868,18	50.021.978.063,32
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	7.5.2.4	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	7.5.2.5	50.409.586.868,18	50.021.978.063,32

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan


BUPATI PASANGKAYU
H. YAUMIL AMBO DJIWA



PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

AUDITED

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref	2024	2023
ASET	7.5.3.1		
ASET LANCAR	7.5.3.1 A		
Kas di Kas Daerah	7.5.3.1 A. a	47.026.184.207,50	47.270.952.363,06
Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.3.1 A. b	606.700,00	-
Kas di Bendahara Penerimaan	7.5.3.1 A. c	24.690.551,58	45.438.055,00
Kas di Bendahara BLUD	7.5.3.1 A. d	689.377.573,10	160.887.995,97
Kas di Bendahara JKN	7.5.3.1 A. e	280.168.446,00	136.691.071,00
Kas di Bendahara BOK	7.5.3.1 A. f	2.310.624.308,00	2.382.021.867,00
Kas di Bendahara Dana BOS	7.5.3.1 A. g	77.393.087,00	22.764.461,00
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	7.5.3.1 A. h	579.723,00	6.758.105,29
Piutang Pajak	7.5.3.1 A. i	13.306.318.107,30	11.900.443.964,30
Penyisihan Piutang Pajak	7.5.3.1 A. i.1	(10.012.659.375,34)	(9.521.548.980,69)
Piutang Pajak Netto	7.5.3.1 A. i.2	3.293.658.731,96	2.378.894.983,61
Piutang Retribusi	7.5.3.1 A. j	1.286.617.101,00	812.310.284,00
Penyisihan Piutang Retribusi	7.5.3.1 A. j.1	(478.628.026,09)	(313.071.802,40)
Piutang Retribusi Netto	7.5.3.1 A. j.2	807.989.074,91	499.238.481,60
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	7.5.3.1 A. k	6.652.314.326,24	4.398.395.816,24
Penyisihan Piutang Lain-lain	7.5.3.1 A. k.1	(262.127.461,32)	(21.991.979,09)
PAD Yang Sah			
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Netto	7.5.3.1 A. k.2	6.390.186.864,92	4.376.403.837,15
Beban Dibayar Di Muka	7.5.3.1 A. l	318.083.857,33	653.806.803,80
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	7.5.3.1 A. m	272.709.333,34	303.741.333,34
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan	7.5.3.1 A. m.1	(236.388.833,34)	(256.139.808,34)
Penjualan Angsuran			
Bagian Lancar Tagihan Penjualan	7.5.3.1 A. m.2	36.320.500,00	47.601.525,00
Angsuran Netto			
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	7.5.1.1 A. n	184.447.623,00	198.821.123,00
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti	7.5.1.1 A. n.1	(145.270.623,00)	(143.071.273,00)
Kerugian Daerah			
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian	7.5.1.1 A. n.2	39.177.000,00	55.749.850,00
Daerah Netto			
Piutang Lain-lain	7.5.3.1 A. o	1.162.264.845,05	206.671.904,00
Penyisihan Piutang Lain-lain Tidak Tertagih	7.5.3.1 A. o.4	(185.683.900,10)	(180.580.516,50)
Piutang Lain-lain Netto	7.5.3.1 A. o.5	976.580.944,95	26.091.387,50
Persediaan	7.5.3.1 A. p	9.584.070.863,77	12.825.095.041,42
JUMLAH ASET LANCAR		71.855.692.434,02	70.888.395.828,40
INVESTASI JANGKA PANJANG	7.5.3.1 B		
Investasi Non Permanen	7.5.3.1 B. a		
Dana Bergulir	7.5.3.1 B. a.1	608.885.733,34	632.585.733,34
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	7.5.3.1 B. a.2	(608.885.733,34)	(632.585.733,34)
JUMLAH Investasi Non Permanen		-	-

Investasi Permanen	7.5.3.1 B. b		
Penyertaan Modal Pemda	7.5.3.1 B. b	17.395.000.000,00	17.395.000.000,00
JUMLAH Investasi Permanen		17.395.000.000,00	17.395.000.000,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		17.395.000.000,00	17.395.000.000,00
ASET TETAP	7.5.3.1 C		
Tanah	7.5.3.1 C. a	175.803.295.690,14	174.246.475.790,14
Peralatan dan Mesin	7.5.3.1 C. b	590.802.860.469,83	582.255.941.533,48
Gedung dan Bangunan	7.5.3.1 C. c	942.115.670.930,71	885.446.277.010,59
Jalan, Jaringan dan Instalasi	7.5.3.1 C. d	2.125.206.644.262,64	1.973.692.615.347,35
Aset Tetap Lainnya	7.5.3.1 C. e	9.111.918.369,00	8.532.206.996,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.5.3.1 C. f	29.104.102.831,65	52.615.291.272,00
Akumulasi Penyusutan	7.5.3.1 C. g	(1.803.378.820.000,14)	(1.594.777.520.379,79)
JUMLAH ASET TETAP		2.068.765.672.553,83	2.082.011.287.569,77
ASET LAINNYA	7.5.3.1 D		
Tagihan Penjualan Angsuran	7.5.3.1 D. a	-	-
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	7.5.3.1 D. b	298.976.570,83	-
Penyisihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	7.5.3.1 D. b.1	-	-
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Netto	7.5.3.1 D. b.2	298.976.570,83	-
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	7.5.3.1 D. c	12.422.690.124,86	12.422.690.124,86
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	7.5.3.1 D. c.1	(6.896.705.008,00)	(6.273.096.795,00)
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Netto	7.5.3.1 D. c.2	5.525.985.116,86	6.149.593.329,86
Aset Tak Berwujud	7.5.3.1 D. d	1.132.550.962,00	1.132.550.962,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	7.5.3.1 D. d.1	(983.601.342,00)	(793.898.424,00)
Aset Tak Berwujud Netto	7.5.3.1 D. d.2	148.949.620,00	338.652.538,00
Aset Lain-lain	7.5.3.1 D. e	21.967.582.146,40	21.016.952.257,40
JUMLAH ASET LAINNYA		27.941.493.454,09	27.505.198.125,26
JUMLAH ASET		2.185.957.858.441,94	2.197.799.881.523,43
KEWAJIBAN	7.5.3.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.5.3.2 A		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.5.3.2 A. a	37.728,00	3.535.855,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Pusat	7.5.3.2 A. b	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	7.5.3.2 A. c	29.126.896,11	53.987.651,45
Utang Belanja	7.5.3.2 A. d	12.217.598.577,45	16.453.147.868,45
Utang Jangka Pendek Lainnya	7.5.3.2 A. e	10.719.000,00	10.719.000,00
Utang Kepada Pihak Ketiga		-	-
Utang Retensi		-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya		10.719.000,00	10.719.000,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		12.257.482.201,56	16.521.390.374,90
JUMLAH KEWAJIBAN		12.257.482.201,56	16.521.390.374,90
EKUITAS	7.5.3.3	2.173.700.376.240,38	2.181.278.491.148,53
JUMLAH EKUITAS		2.173.700.376.240,38	2.181.278.491.148,53
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.185.957.858.441,94	2.197.799.881.523,43

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan


BUPATI PASANGKAYU
H. YAUMIL AMBO DJIWA



PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

AUDITED

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref	2024	2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	7.5.4				
Pendapatan Operasional - LO	7.5.4.1				
Pendapatan Asli Daerah - LO	7.5.4.1 A				
Pendapatan Pajak Daerah - LO	7.5.4.1 A. a	24.382.689.834,36	16.835.403.601,75	7.547.286.232,61	44,83%
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	7.5.4.1 A. b	8.761.631.893,42	4.932.889.449,77	3.828.742.443,65	77,62%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	7.5.4.1 A. c	3.173.536.172,00	3.146.110.906,00	27.425.266,00	0,87%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO	7.5.4.1 A. d	28.681.642.724,95	37.128.150.622,97	(8.446.507.898,02)	-22,75%
Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO		64.999.500.624,73	62.042.554.580,49	2.956.946.044,24	4,77%
Pendapatan Transfer - LO	7.5.4.1 B				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	7.5.4.1 B. a				
Dana Bagi Hasil Pajak - LO	7.5.4.1 B. a. 1	7.894.708.000,00	10.086.359.000,00	(2.191.651.000,00)	-21,73%
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	7.5.4.1 B. a. 2	12.220.098.000,00	13.856.534.850,00	(1.636.436.850,00)	-11,81%
Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	7.5.4.1 B. a. 3	496.999.363.000,00	473.350.213.036,00	23.649.149.964,00	5,00%
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO	7.5.4.1 B. a. 4	102.005.217.974,00	104.368.130.391,00	(2.362.912.417,00)	-2,26%
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO	7.5.4.1 B. a. 5	74.291.745.640,00	79.999.705.391,00	(5.707.959.751,00)	-7,13%
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO		693.411.132.614,00	681.660.942.668,00	11.750.189.946,00	1,72%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	7.5.4.1 B. b				
Dana Penyesuaian - LO	7.5.4.1 B. b. 1	-	-	-	-100,00%
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO		-	-	-	-100,00%
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO	7.5.4.1 B. c				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO		34.739.574.844,00	32.672.529.014,00	2.067.045.830,00	6,33%
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat - LO		-	287.500.000,00	(287.500.000,00)	-14,12%
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO		34.739.574.844,00	32.960.029.014,00	1.779.545.830,00	5,40%
Jumlah Pendapatan Transfer - LO		728.150.707.458,00	714.620.971.682,00	13.529.735.776,00	1,89%
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	7.5.4.1 C				
Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO		57.730.162.669,72	21.017.753.712,29	36.712.408.957,43	174,67%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Peraturan Daerah - LO		6.555.538.308,00	-	6.555.538.308,00	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO		64.285.700.977,72	21.017.753.712,29	43.267.947.265,43	205,86%
Jumlah Pendapatan Operasional-LO		857.435.909.060,45	797.681.279.974,78	59.754.629.085,67	7,49%

Beban Operasional	7.5.4.2				
Beban Pegawai	7.5.4.2 A	299.324.656.215,00	278.095.975.439,00	21.228.680.776,00	7,63%
Beban Barang dan Jasa	7.5.4.2 B	235.070.376.812,84	215.615.614.242,96	19.454.762.569,88	9,02%
Beban Persediaan	7.5.4.2 B. a	30.832.754.963,47	28.036.094.696,94	2.796.660.266,53	9,98%
Beban Jasa	7.5.4.2 B. b	153.040.828.669,37	135.629.184.409,02	17.411.644.260,35	12,84%
Beban Pemeliharaan	7.5.4.2 B. c	8.430.857.196,00	6.948.990.488,00	1.481.866.708,00	21,32%
Beban Perjalanan Dinas	7.5.4.2 B. d	42.765.935.984,00	45.001.344.649,00	(2.235.408.665,00)	-4,97%
Beban Hibah	7.5.4.2 C	36.270.633.627,30	32.344.470.524,00	3.926.163.103,30	12,14%
Beban Bantuan Sosial	7.5.4.2 D	338.000.000,00	390.000.000,00	(52.000.000,00)	-13,33%
Beban Bantuan Keuangan	7.5.4.2 E	-	-	-	0,00%
Beban Bagi Hasil	7.5.4.2 F	-	-	-	0,00%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	7.5.4.2 G	239.463.744.380,00	225.669.161.180,00	13.794.583.200,00	6,11%
Beban Penyisihan Piutang	7.5.4.2 H	908.320.161,01	403.894.011,40	504.426.149,61	124,89%
Beban Lain-lain	7.5.4.2 I	-	-	-	0,00%
Beban Lainnya	7.5.4.2 I a	-	-	-	0,00%
Beban Penghapusan Aset Lainnya	7.5.4.2 I b	-	-	-	0,00%
Beban Penghapusan Persediaan	7.5.4.2 I c	-	-	-	0,00%
Beban Transfer	7.5.4.2 J	51.701.905.423,00	49.097.225.524,00	2.604.679.899,00	5,31%
Jumlah Beban Operasional		863.077.636.619,15	801.616.340.921,36	61.461.295.697,79	7,67%
Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional	7.5.4.3	(5.641.727.558,70)	(3.935.060.946,58)	(1.706.666.612,12)	43,37%
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	7.5.4.4	(1.450.272.453,00)	(1.794.056.571,94)	343.784.118,94	-19,16%
Surplus Non Operasional		23.700.000,00	-	23.700.000,00	0,00%
Defisit Non Operasional		1.473.972.453,00	1.794.056.571,94	(320.084.118,94)	-17,84%
Defisit Penghapusan Gedung dan Bangunan		-	803.219.083,00	(803.219.083,00)	-100,00%
Defisit Penghapusan Aset Lain-lain		-	803.758.143,94	(803.758.143,94)	0,00%
Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	187.079.345,00	(187.079.345,00)	0,00%
Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	7.5.4.4	(1.450.272.453,00)	(1.794.056.571,94)	343.784.118,94	-19,16%
Jumlah Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa		(7.092.000.011,70)	(5.729.117.518,52)	(1.362.882.493,18)	23,79%
Pos Luar Biasa	7.5.4.5				
Pendapatan Luar Biasa	7.5.4.5 A	-	-	-	0,00%
Beban Luar Biasa	7.5.4.5 B	483.328.000,00	328.780.000,00	154.548.000,00	47,01%
Jumlah Pos Luar Biasa		(483.328.000,00)	(328.780.000,00)	(154.548.000,00)	47,01%
SURPLUS/DEFISIT-LO	7.5.4.6	(7.575.328.011,70)	(6.057.897.518,52)	(1.517.430.493,18)	25,05%

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan





PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

AUDITED

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref	2024	2023
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	7.5.5.1		
<i>Arus Kas Masuk</i>	7.5.5.1 A		
Pendapatan Pajak Daerah	7.5.5.1 A. a	22.965.168.782,36	16.807.664.021,00
Pendapatan Retribusi Daerah	7.5.5.1 A. b	8.262.414.576,08	4.714.260.496,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.5.5.1 A. c	3.173.536.172,00	3.146.110.906,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.5.5.1 A. d	26.295.863.030,42	34.179.444.554,46
Dana Bagi Hasil Pajak	7.5.5.1 A. e	9.531.487.000,00	10.116.542.067,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	7.5.5.1 A. f	12.192.946.000,00	14.070.260.145,00
Dana Alokasi Umum	7.5.5.1 A. g	496.999.363.000,00	473.350.213.036,00
Dana Alokasi Khusus Fisik	7.5.5.1 A. h	102.005.217.974,00	104.368.130.391,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	7.5.5.1 A. i	74.291.745.640,00	79.999.705.391,00
Dana Penyesuaian	7.5.5.1 A. j	0,00	0,00
Dana Desa	7.5.5.1 A. k	54.694.684.000,00	53.799.805.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	7.5.5.1 A. l	34.739.574.844,00	32.672.529.014,00
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	7.5.5.1 A. m	0,00	287.500.000,00
Pendapatan Hibah	7.5.5.1 A. n	736.129.795,00	529.671.980,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-	7.5.5.1 A. o	6.555.538.308,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		852.443.669.121,86	828.041.837.001,46
<i>Arus Kas Keluar</i>	7.5.5.1 B		
Belanja Pegawai	7.5.5.1 B. a	298.942.450.068,00	283.442.561.180,00
Belanja Barang	7.5.5.1 B. b	227.464.421.857,00	198.846.542.410,71
Belanja Subsidi	7.5.5.1 B. c	0,00	0,00
Belanja Hibah	7.5.5.1 B. d	36.825.036.146,00	33.141.853.109,00
Belanja Bantuan Sosial	7.5.5.1 B. e	338.000.000,00	390.000.000,00
Belanja Tak Terduga	7.5.5.1 B. f	483.328.000,00	328.780.000,00
Bagi Hasil	7.5.5.1 B. g	1.724.590.695,00	1.398.679.900,00
Bantuan Keuangan	7.5.5.1 B. h	104.671.998.728,00	101.498.350.624,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		670.449.825.494,00	619.046.767.223,71
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	7.5.5.1	181.993.843.627,86	208.995.069.777,75
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	7.5.5.2		
<i>Arus Kas Masuk</i>	7.5.5.2 A		
Penerimaan dari penjualan Aset Tetap/ Lainnya		404.314.500,00	523.368.836,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		404.314.500,00	523.368.836,00
<i>Arus Kas Keluar</i>	7.5.5.2 B		
Belanja Tanah	7.5.5.2 B. a	1.556.819.900,00	999.732.700,00
Belanja Peralatan dan Mesin	7.5.5.2 B. b	33.154.767.773,00	23.481.480.203,00
Belanja Bangunan dan Gedung	7.5.5.2 B. c	43.406.647.247,00	64.160.323.251,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.5.2 B. d	103.170.690.203,00	109.042.548.297,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	7.5.5.2 B. e	672.874.200,00	97.765.100,00
Belanja Aset Lainnya	7.5.5.2 B. f	72.450.000,00	1.776.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		182.034.249.323,00	197.783.625.551,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	7.5.5.2	(181.629.934.823,00)	(197.260.256.715,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	7.5.5.3		
<i>Arus Kas Masuk</i>	7.5.5.3 A		
Penerimaan Pembiayaan		23.700.000,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		23.700.000,00	0,00
<i>Arus Kas Keluar</i>	7.5.5.3 B		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah	7.5.5.3 B. a	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	7.5.5.3 B. b	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	7.5.5.3	23.700.000,00	0,00
Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	7.5.5.4		
<i>Arus Kas Masuk</i>	7.5.5.4 A		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - BUD	7.5.5.4 A. a	57.620.856.927,72	56.854.288.973,00
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - Bendahara Pengeluaran	7.5.5.4 A. b	457.401.815,00	1.046.310.617,57
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - Bendahara Dana BOS	7.5.5.4 A. c	299.338.745,07	290.343.906,28
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - Bendahara JKN	7.5.5.4 A. d	183.371.280,00	164.756.471,00
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - Bendahara BOK	7.5.5.4 A. e	58.225.904,11	103.477.734,00
Jumlah Arus Kas Masuk		58.619.194.671,90	58.459.177.701,85
<i>Arus Kas Keluar</i>	7.5.5.4 B		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - BUD	7.5.5.4 B. a	57.620.856.927,72	56.854.288.973,00
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - Bendahara Pengeluaran	7.5.5.4 B. b	457.823.120,00	1.047.220.561,57
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - Bendahara Dana BOS	7.5.5.4 B. c	302.415.567,07	290.875.478,28
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - Bendahara JKN	7.5.5.4 B. d	183.371.280,00	164.756.471,00
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - Bendahara BOK	7.5.5.4 B. e	58.225.904,11	103.477.734,00
Jumlah Arus Kas Keluar		58.622.692.798,90	58.460.619.217,85
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	7.5.5.4	(3.498.127,00)	(1.441.516,00)
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	7.5.5.5	384.110.677,86	11.733.371.546,75
Saldo Awal Kas di BUD		50.025.513.918,32	38.292.142.371,57
Koreksi Silpa	7.5.5.6	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas		50.409.624.596,18	50.025.513.918,32

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan


BUPATI PASANGKAYU
H. YAUMIL AMBO DJIWA



PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

AUDITED

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref	2024	2023
EKUITAS AWAL	7.5.6.1	2.181.278.491.148,53	2.189.128.821.380,53
SURPLUS/DEFISIT-LO	7.5.6.2	(7.575.328.011,70)	(6.057.897.518,52)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	7.5.6.3		
Koreksi Nilai Ekuitas Awal Piutang	7.5.6.3 A	(11.646.909,00)	(84.450.152,00)
Koreksi Nilai Ekuitas Awal Persediaan	7.5.6.3 B	(654.500,00)	490.875,00
Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap	7.5.6.3 C	3.775.753,00	(1.723.703.572,18)
Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kewajiban	7.5.6.3 D	1.901.200,00	(38.296.693,00)
Koreksi Nilai Ekuitas Awal Penyisihan Piutang	7.5.6.3 E	3.837.559,55	44.336.382,70
Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan	7.5.6.3 F	0,00	9.190.446,00
JUMLAH DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		(2.786.896,45)	(1.792.432.713,48)
EKUITAS AKHIR	7.5.6.4	2.173.700.376.240,38	2.181.278.491.148,53

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan


BUPATI PASANGKAYU
H. YAUMIL AMBO DJIWA

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1. Pendahuluan

7.1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki makna dan urgensi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana laporan tersebut secara substansial merupakan realisasi dari pelaksanaan program/kegiatan yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi sosial ekonomi wilayah sebagai salah satu indikator untuk kemajuan dan perkembangan suatu daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang kewajiban Gubernur, Walikota dan Bupati untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk Laporan Keuangan telah menyusun dan menyajikan LKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan APBD TA 2024.

Pada dasarnya buah pikiran yang melatar belakangi penyusunan laporan keuangan ini adalah keinginan untuk mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien. Hal ini tentunya dapat terwujud melalui tata kelola pemerintahan yang baik dalam mencapai tujuan sesuai pilar-pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Hal ini tentu dapat dipahami karena sejauh mana penyelenggaraan kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah menurut prakarsa dan aspirasinya sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan daerah.

Dalam hubungannya dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban atas keuangan daerah yang sesuai dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah, maka setiap daerah telah mencoba sebatas kemampuan masing-masing untuk menerapkan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya keuangan dengan dilandasi oleh ketentuan perundang-undangan tentang pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah khususnya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah akan terwujud apabila dapat menyajikan dan menyampaikan laporan keuangan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomi, yang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan

atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bukan saja merupakan upaya untuk memenuhi amanat Undang-Undang tetapi lebih dari pada tanggung jawab moral Pemerintah Daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan yaitu:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi tentang bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

7.1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasangkayu;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 05 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
28. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
29. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan; dan
30. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 21 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah.

7.1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu adalah sebagai berikut:

7.1. Pendahuluan

- 7.1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 7.1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 7.1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

7.2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 7.2.1. Ekonomi makro
- 7.2.2. Kebijakan keuangan
- 7.2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

7.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 7.3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 7.3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- 7.3.3. Pergeseran dan Perubahan APBD

7.4. Kebijakan Akuntansi

- 7.4.1. Entitas pelaporan keuangan daerah
- 7.4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 7.4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 7.4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

7.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 7.5.1. Penjelasan pos-pos laporan realisasi anggaran
- 7.5.2. Penjelasan pos-pos laporan perubahan SAL
- 7.5.3. Penjelasan pos-pos neraca
- 7.5.4. Penjelasan pos-pos laporan operasional
- 7.5.5. Penjelasan pos-pos laporan arus kas
- 7.5.6. Penjelasan pos-pos laporan perubahan ekuitas
- 7.5.7. Catatan atas laporan keuangan

7.6. Penutup

7.2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD

7.2.1 Ekonomi Makro

Secara geografis Kabupaten Pasangkayu terletak antara 0° 40' 10" – 1° 50' 12" Lintang Selatan dan antara 119° 25' 26" – 119° 50' 20" Bujur Timur. Kabupaten Pasangkayu merupakan salah satu dari 6 kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang terletak di bagian utara Provinsi Sulawesi Barat memanjang dari selatan ke utara. Jarak Kabupaten Pasangkayu ke ibukota Provinsi Sulawesi Barat (Kota Mamuju) kurang lebih 276 km.

Luas wilayah Kabupaten Pasangkayu adalah berupa daratan 3.043,75 km², terdiri atas 12 kecamatan, 4 kelurahan, 59 desa dan 379 dusun/lingkungan. Adapun kecamatan di Kabupaten Pasangkayu adalah Kecamatan Sarudu (99,06 km²), Kecamatan Dapurang (921,25 km²), Kecamatan Duripoku (215,45 km²), Kecamatan Baras (277,87 km²), Kecamatan Bulutaba (428,62 km²), Kecamatan Lariang (83,34 km²), Kecamatan Pasangkayu (312,04 km²), Kecamatan Tikke Raya (266,59 km²), Kecamatan Pedongga (94,00 km²), Kecamatan Bambalamotu (242,96 km²), Kecamatan Bambaira (64,84 km²), dan Kecamatan Sarjo (37,03 km²). Secara administratif wilayah Kabupaten Pasangkayu bagian utara dan timur berbatasan dengan Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Tengah, dan bagian barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2024 atau Tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasangkayu, yaitu:

1. Tingkat Kemiskinan sebesar 5,21%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 1,20%;
3. Gini Rasio tidak dilakukan perhitungan untuk tingkat kabupaten;
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71,04%;
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 0,68%;
6. Tingkat Inflasi tidak dilakukan perhitungan untuk tingkat kabupaten;
7. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp15.578,92 miliar.

7.2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non

pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin kabupaten periode tertentu. Namun demikian, memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan, sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pasangkayu

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun
1	Kab/Kota (%)	4,79%	5,21%	0,42%
2	Kab/Kota (Ribuan Orang)	8.940	9,950	1,01%
3	Provinsi (%)	11,49%	10,71%	0,78%
4	Nasional (%)	9,36%	8,57%	0,79%

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Pasangkayu

Persentase penduduk miskin Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2023 sebesar 4,79% mengalami kenaikan pada tahun 2024 menjadi 5,21%. Hal ini disebabkan pada tahun 2024 harga komoditi sawit mengalami penurunan, mengingat masyarakat Pasangkayu memiliki mata pencaharian sebagai petani, khususnya petani sawit dan diharapkan pada tahun 2024 dapat turun hingga angka 0,42%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Pasangkayu sudah di bawah provinsi dan nasional, namun dalam perencanaan pengangguran tahun mendatang harus tetap mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pasangkayu

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	0,72	0,66	-0,06
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	1,80	1,45	-0,35
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,53	1,36	-0,17

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Pasangkayu

Tabel 3 Tingkat Keparahannya Kemiskinan Kabupaten Pasangkayu

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun
1	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Kab/Kota	0,16	0,11	-0,05
2	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Provinsi	0,42	0,29	-0,13
3	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Nasional	0,38	0,32	-0,06

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Pasangkayu

7.2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka terdiri dari: (i) mereka yang tak punya dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya dan mempersiapkan usaha; (iii) mereka yang tak punya dan tidak

mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasangkayu Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 adalah sebesar 1,20%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pasangkayu

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	2,02	1,20	-0,82
2	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi (%)	2,27	2,68	0,41
3	Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional (%)	5,32	4,91	-0,41

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Pasangkayu

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 1,20%, sedangkan TPT pada Tahun 2023 adalah sebesar 2,02% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2024. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pasangkayu sebesar 1,20% lebih rendah jika dibandingkan TPT Provinsi Sulawesi Barat sebesar 2,68% dan juga lebih rendah daripada TPT Nasional (Indonesia) yang sebesar 4,91%.

7.2.1.3 Indeks Gini (Gini Rasio)

Indeks Gini atau Gini Rasio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada Kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu tidak mengukur realisasi pencapaian Indeks Gini (Gini Rasio) pada Tahun 2024 itu dikarenakan Gini Rasio hanya di ukur di beberapa kota/kab di Indonesia, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 5 Gini Ratio Kabupaten Pasangkayu

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun
1	Tingkat Kab/Kota	-	-	-
2	Tingkat Provinsi	0,351	0,330	0,021
3	Tingkat Nasional	0,388	0,381	0,007

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Pasangkayu

7.2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

1. Rendah (< 60);
2. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$);
3. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$); dan
4. Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasangkayu Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 adalah sebesar 71,04 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6 Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/turun (%)
1	Kabupaten/Kota	70,42	71,04	0,62
2	Provinsi	69,80	70,46	0,66
3	Indonesia/Nasional	74,39	75,02	0,63

Sumber Dokumen BPS Kabupaten Pasangkayu

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 adalah sebesar 71,04 poin dibandingkan Tahun 2023 sebesar 70,42 poin, mengalami kenaikan sebesar 0,62 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 70,41 tahun pada Tahun 2024, lebih lama 0,32 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 8,13 tahun dengan harapan lama sekolah 12,09 tahun. Sementara, Standar Hidup, Tahun 2024 PNB per kapita per Tahun sebesar Rp12.190.000 dan Tahun 2023 PNB per kapita per Tahun sebesar Rp11.649.000 atau meningkat sebesar Rp541.000.

7.2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh

karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasangkayu

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2024
1	PDRB harga konstan 2010 (miliar rupiah)	7.383,11	7.883,38	7.937,29	37.209,36	12.920.281,70
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-0,08	6,78	0,68	4,76	5,03

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Pasangkayu

Selama kurun waktu Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024, perekonomian Kabupaten Pasangkayu mengalami fluktuasi. Pada periode Tahun 2022 – Tahun 2023 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Pasangkayu mengalami lonjakan yang cukup drastis dari -0,08% ke sebesar 6,78% dan pada kurun waktu Tahun 2023 – Tahun 2024 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Pasangkayu mengalami penurunan dari 6,78% ke 0,68%. Dalam skala provinsi laju pertumbuhan Kabupaten Pasangkayu menempati urutan 6 dari laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

7.2.1.6 Tingkat Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Pasangkayu dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*), inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*), inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*), kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*), jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik, Kabupaten Pasangkayu tidak mengukur tingkat inflasi pada Tahun 2024 itu dikarenakan tingkat inflasi hanya di ukur di beberapa kota/kab di Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 8 Tingkat Inflasi Kabupaten Pasangkayu

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun
1	Tingkat Inflasi Kab/Kota (%)	-	-	-

2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	1,82	1,49	0,33
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	2,61	1,57	1,04

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Pasangkayu

7.2.1.7 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Struktur perekonomian Kabupaten Pasangkayu dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pasangkayu (miliar rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.330,70	6.920,40	7.870,55
2	Pertambangan, dan Penggalian	121,12	131,68	144,13
3	Industri Pengolahan	3597,36	4.086,87	4.008,61
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,27	3,69	4,13
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,15	1,23	1,24
6	Konstruksi	992,95	979,84	1.087,01
7	Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil, dan Motor	576,90	625,59	682,68
8	Transportasi dan Pergudangan	161,24	188,68	208,49
9	Penyediaan Akomodasi, dan Makan Minum	15,38	17,13	18,38
10	Informasi dan Komunikasi	142,05	160,18	170,89
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	93,18	89,57	93,87
12	Real Estate	150,63	163,32	180,73
13	Jasa Perusahaan	5,35	6,32	7,15
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	425,22	422,64	439,58
15	Jasa Pendidikan	302,27	303,60	344,83
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	212,81	227,56	255,48
17	Jasa Lainnya	53,24	57,89	61,18
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		13.185,26	14.386,18	15.578,92
PDRB Provinsi		54.028,35	58.572,05	64.214,88
PDRB Nasional		19.588.459,90	20.892.348,50	22.138.964,00

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Pasangkayu

7.2.2 Kebijakan Keuangan

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik.

Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Kebijakan keuangan yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) disusun setiap tahun dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan Anggaran berbasis *money follow program priority*, memperhatikan prioritas pembangunan daerah dalam rangka percepatan target sasaran pembangunan serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

KUA tetap berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan yang merupakan hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai tingkat Kabupaten. Kebijakan umum APBD untuk Tahun Anggaran 2024 ini merupakan kebijakan makro yang memuat sinkronisasi perencanaan tahunan dengan pencapaian target tahun ketiga RPJMD Tahap Keempat Kabupaten Pasangkayu tahun 2021–2026, dimana program-program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan kerangka perekonomian makro daerah, asumsi dasar penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaian target-target kebijakan pembangunan

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan umum pendapatan daerah Tahun 2024 menitikberatkan pada peningkatan penghasilan dengan skema insentif pembiayaan, serta upaya pendampingan berkelanjutan dalam kelompok usaha bersama, peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja berbasis disiplin aparatur dan tertib administrasi. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan operasional perencanaan pendapatan daerah yaitu:

- a. Kebijakan pajak daerah. Arah kebijakan perencanaan pajak daerah yakni:
 - (i) Intensifikasi, dilakukan dengan optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui penerapan online system, melakukan pemutakhiran data objek pajak, melakukan pemeriksaan wajib pajak *self assessment*;
 - (ii) Ekstensifikasi, dilakukan dengan perhitungan dan analisis asumsi dasar pertumbuhan ekonomi makro kaitannya dengan pertumbuhan kendaraan bermotor, konsumsi BBM lokal, dan asumsi kontribusi sektor lapangan usaha dalam PDRB, melakukan review terhadap implementasi dari perda-perda dan peraturan kepala daerah yang terkait dengan pajak daerah,
 - (iii) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan;
 - (iv) Peningkatan koordinasi kelembagaan;
- b. Kebijakan Retribusi Daerah. Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Oleh karena itu, kebijakan dalam

rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah antara lain, sebagai berikut:

- (i) Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik;
 - (ii) Menerapkan *Banking System* dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
 - (iii) Menerapkan transaksi non tunai; dan
 - (iv) Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP).
- c. Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini berasal dari Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah dan perbankan lainnya, deviden dan Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga yakni Bank BPD Sulselbar. Untuk meningkatkan kinerja komponen pendapatan ini, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- (i) Membentuk dan meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis pada perusahaan daerah yang dapat meningkatkan laba;
 - (ii) Memperkuat struktur penyertaan modal pada pihak ketiga;
- d. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan penerimaan daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang milik daerah dan penerimaan jasa giro. Untuk meningkatkan kinerja Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Daerah berikut
- (i) Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga;
 - (ii) Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah; dan
 - (iii) Membentuk dan meningkatkan pendapatan melalui BLUD.
- e. Kebijakan Dana Perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan umum yang berkaitan dengan Dana Perimbangan difokuskan pada peningkatan perolehan Dana Perimbangan. Oleh karena itu, kebijakan daerah adalah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, perolehan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, dan meningkatkan kerjasama intensifikasi pemungutan PPh orang pribadi, serta menjaring wajib pajak baru di wilayah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
- f. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kebijakan umum Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah difokuskan untuk melakukan

koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terkait bagi hasil dan penerimaan sumbangan pihak ketiga.

Berikut adalah tabel realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022 - 2024:

Tabel 10 Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022 – 2024

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Pendapatan-LRA	842.548.646.860,12	828.565.205.837,46	852.847.983.621,86
Pendapatan Asli Daerah-LRA	46.833.564.003,12	59.370.848.813,46	61.101.297.060,86
Pendapatan Pajak Daerah- LRA	11.816.980.971,58	16.807.664.021,00	22.932.205.799,36
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	3.279.849.140,50	4.714.260.496,00	8.262.414.576,08
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA	3.179.607.497,00	3.146.110.906,00	3.173.536.172,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA	28.557.126.394,04	34.702.813.390,46	26.700.177.530,42
Pendapatan Transfer-LRA	795.300.374.807,00	768.664.685.044,00	784.455.018.458,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan – LRA	700.970.635.310,00	681.904.851.030,00	695.020.759.614,00
Dana Bagi Hasil Pajak – LRA	18.134.798.773,00	10.116.542.067,00	9.531.487.000,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LRA	2.076.832.122,00	14.070.260.145,00	12.192.946.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	452.894.338.704,00	473.350.213.036,00	496.999.363.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LRA	63.373.261.075,00	104.368.130.391,00	102.005.217.974,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LRA	64.491.404.636,00	79.999.705.391,00	74.291.745.640,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LRA	62.219.653.600,00	53.799.805.000,00	54.694.684.000,00
Dana Penyesuaian – LRA	10.755.538.000,00	0,00	0,00
Dana Desa – LRA	51.464.115.600,00	53.799.805.000,00	54.694.684.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi – LRA	32.110.085.897,00	32.960.029.014,00	34.739.574.844,00
Bantuan Keuangan – LRA	334.756.001,00	287.500.000,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA	414.708.050,00	529.671.980,00	7.291.668.103,00
Pendapatan Hibah – LRA	414.708.050,00	529.671.980,00	7.291.668.103,00
Pendapatan Lainnya – LRA	0,00	0,00	0,00

2. Kebijakan Belanja Daerah

Anggaran belanja daerah mempunyai peranan sangat penting dalam mencapai sasaran-sasaran pokok dan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu, kebijakan belanja daerah diarahkan selain untuk

pencapaian target kinerja awal RPJMD sekaligus akan membentuk fondasi yang kuat untuk percepatan pemulihan ekonomi daerah. Pemanfaatan belanja SKPD diarahkan sebagai berikut:

- a. Menitikberatkan pada pencapaian visi misi dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati periode Tahun 2021-2026 serta pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar serta Urusan Pilihan;
- b. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah dan upaya pengentasan kemiskinan serta pengangguran;
- c. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan dan belanja *mandatory* lainnya sesuai perundang-undangan;
- d. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk:
 - Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas;
 - Bantuan sosial untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan dan penguatan peran modal sosial;
 - Bantuan keuangan, pada partai politik, Badan Usaha dan sejenisnya sesuai yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Berikut adalah tabel realisasi belanja daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022, 2023, dan 2024

Tabel 11 Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022 – 2024

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Belanja	738.483.950.060,24	713.933.362.250,71	746.087.485.394,00
Belanja Operasi	499.339.728.495,24	515.820.956.699,71	563.569.908.071,00
Belanja Pegawai	292.039.202.053,00	283.442.561.180,00	298.942.450.068,00
Belanja Barang dan Jasa	175.452.902.211,24	198.846.542.410,71	227.464.421.857,00
Belanja Hibah	31.495.624.231,00	33.141.853.109,00	36.825.036.146,00
Belanja Bantuan Sosial	352.000.000,00	390.000.000,00	338.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal	237.236.268.565,00	197.783.625.551,00	182.034.249.323,00
Belanja Modal Tanah	1.703.032.928,00	999.732.700,00	1.556.819.900,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.711.893.112,00	23.481.480.203,00	33.154.767.773,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.336.732.078,00	64.160.323.251,00	43.406.647.247,00
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	137.995.574.447,00	109.042.548.297,00	103.170.690.203,00

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	489.036.000,00	97.765.100,00	672.874.200,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	1.776.000,00	72.450.000,00
Belanja Tidak Terduga	1.907.953.000,00	328.780.000,00	483.328.000,00
Belanja Tidak Terduga	1.907.953.000,00	328.780.000,00	483.328.000,00
Transfer	99.486.293.052,00	102.897.030.524,00	106.396.589.423,00
Belanja Bagi Hasil	1.194.999.500,00	1.398.679.900,00	1.724.590.695,00
Dana Desa	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan	98.291.293.552,00	101.498.350.624,00	104.671.998.728,00

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran proyeksi. Pada kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 yaitu: Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri atas Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah dan Pembayaran Utang.

Mengingat besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur daerah dan sosial kemasyarakatan serta memperhatikan besarnya peluang dari sisi kebijakan dan regulasi yang ada, dan besarnya potensi pendanaan yang berasal dari masyarakat maupun pihak dunia usaha, maka kebijakan sumber pendanaan dalam pembangunan perlu diperluas melalui pendanaan bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu dengan Pemerintah Pusat maupun dengan Pemerintah Daerah lainnya, Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPBU), Pinjaman Daerah, Pendanaan yang bersumber dari pemanfaatan ruang dengan penugasan kepada korporasi daerah termasuk mendorong dilakukannya kerjasama secara B to B serta membuka peluang seluas-luasnya bagi peran serta secara sukarela untuk penyelenggaraan CSR dan swa-pendanaan lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

Perangkat kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan pada pembiayaan program kegiatan yang belum terealisasi pada tahun sebelumnya dan menutupi defisit anggaran tahun 2024.

Berikut adalah tabel realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022, 2023, dan 2024:

Tabel 12 Pembiayaan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022 – 2024

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Pembiayaan			
Penerimaan	33.708.761.252,69	38.287.165.000,57	50.045.678.063,32

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Pembiayaan			
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu	33.708.761.252,69	38.287.165.000,57	50.021.978.063,32
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			23.700.000,00
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada PFK	0,00	0,00	0,00
Koreksi Silpa	0,00	0,00	0,00
Jumlah Koreksi Silpa	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	33.708.761.252,69	38.287.165.000,57	50.045.678.063,32

7.2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah serta pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Target Indikator Kinerja Daerah, Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah, dan indikator kinerja organisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja.

Indikator Kinerja Daerah mencakup aspek pelayanan umum, yang terdiri atas layanan urusan wajib dasar, layanan urusan wajib non dasar, layanan urusan pilihan, dan layanan penunjang urusan. Dalam tingkatan kinerja, Indikator Kinerja Daerah berada pada level hasil (*outcome*) dan merefleksikan pencapaian kinerja program pembangunan daerah dan program perangkat daerah.

Indikator Pencapaian Target Kinerja dan efektivitas/efisiensi dari program dan kegiatan serta hambatan pencapaian kinerja disajikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024.

7.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

7.3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2024 dengan menggunakan metode analisis digambarkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 13 Analisis Kinerja Keuangan untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024

No	Uraian	Rasio		Kinerja
		(%)	Rekening	
1	Rasio cair (<i>Quick Ratio</i>) = (Aset Lancar – Persediaan): Kewajiban Jangka Pendek	508,03	Neraca	Secara umum di atas 100% yang menunjukkan kinerja keuangan yang baik atau Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dapat menjamin pembayaran kewajiban jangka pendeknya
2	Rasio hutang terhadap total aset (<i>debt ratio</i>) = Total Hutang : Total Aset	0,56	Neraca	Mendekati nol persen yang cukup menunjukkan tingkat rasio yang cukup baik atau pembiayaan pembangunan sebagian besar ditanggung oleh kemampuan sendiri.
3	Rasio ekuitas dana terhadap total aset = Total Ekuitas Dana : Total Aset	99,44	Neraca	Mendekati 100% atau baik berarti pembiayaan pembangunan sebagian sebesar ditanggung oleh kemampuan sendiri.
4	Rasio belanja operasi terhadap total belanja = Belanja Operasi : Total Belanja	75,54	LRA	Dana APBD sebagian besar digunakan untuk membiayai kegiatan operasional.
5	Rasio Belanja Modal terhadap Total belanja = Belanja Modal : Total Belanja	24,40	LRA	Sebagian kecil Dana APBD diperuntukkan untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik infrastruktur
6	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan = PAD : Total Pendapatan	7,16	LRA	Tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat/pihak lain sangat tinggi.
7	Rasio realisasi pembayaran pokok dan bunga pinjaman terhadap total pendapatan (<i>debt service ratio</i>) = Total Realisasi Pembayaran Pokok & Bunga Pinjaman : Total Pendapatan	0,00	LRA	Tidak terdapat kewajiban jangka Panjang
8	<i>Debt Service Coverage Ratio</i> = ((PAD + Bagi Hasil Pajak/NonPajak + DAU) – (Belanja Pegawai + Belanja Barang dan Jasa)) : Total Pendapatan	6,26	LRA	Untuk memperoleh pinjaman jangka menengah atau jangka panjang, Rasio <i>Debt Service Coverage Ratio</i> dipersyaratkan minimal 2,5 (Pasal 12, PP No 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah) dengan capaian DSCR 6,26%, menunjukkan masih terbuka peluang untuk mendapatkan pinjaman, jika diperlukan.
9	Rasio Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan = Dana Perimbangan : Total Pendapatan	81,49	LRA	Rasio di atas 50% berarti Tingkat ketergantungan pada Pemerintah Pusat/Provinsi masih sangat tinggi

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada Tahun Anggaran 2024 secara umum untuk pendapatan dan belanja serta pembiayaan sebagai berikut:

1. Pendapatan

Berdasarkan kebijakan umum di bidang Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu dan upaya-upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah yang telah dilaksanakan selama ini, maka Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2024 secara kumulatif direncanakan sebesar Rp842.795.145.456,00 dan terealisasi sebesar Rp852.847.983.621,86 atau 101,19% yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp49.197.032.611,00 terealisasi sebesar Rp61.101.297.060,86 atau 124,20%;
- b. Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp786.416.210.653,00 terealisasi sebesar Rp784.455.018.458,00 atau 99,75%; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp7.181.902.192,00 dan terealisasi Rp7.291.668.103,00 atau 101,53%.

2. Belanja

Anggaran belanja pada tahun anggaran 2024 ini, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dianggarkan ke dalam belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja bantuan keuangan. Di dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dialokasikan dana untuk belanja daerah sebesar Rp892.817.123.519,00 yang sampai akhir Tahun Anggaran 2024 dapat terealisasi sebesar Rp852.484.074.817,00 atau 95,48% yang terdiri dari:

- a. Belanja Operasi Rp563.569.908.071,00
- b. Belanja Modal Rp182.034.249.323,00
- c. Belanja Tidak Terduga Rp483.328.000,00
- d. Transfer Rp106.396.589.423,00

3. Pembiayaan

Sumber-sumber pembiayaan daerah Kabupaten Pasangkayu dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp50.021.978.063,00 dan terealisasi senilai Rp50.045.678.063,32 atau pada akhir Tahun anggaran dapat direalisasikan 100,05%.
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah dianggarkan pada Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dan pada akhir Tahun anggaran dapat direalisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%.
- c. Koreksi Silpa Daerah dianggarkan pada Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dan pada akhir Tahun anggaran dapat direalisasi sebesar Rp0,00.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024 diuraikan dalam sub rincian objek dapat dilihat pada lampiran 1.

Pencapaian Target Kinerja *Mandatory Spending*

Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah

menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar publik terkait pemenuhan belanja *mandatory spending* dan pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian sasaran pembangunan, tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan dapat dialokasikan setelah mempertimbangkan pemenuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Belanja terkait *mandatory spending* diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1. Kebijakan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*), antara lain:
 - a. Data Kinerja *Mandatory Spending* Belanja Wajib Pendidikan Dianggarkan minimal sebesar 20% dari total APBD Pendidikan senilai Rp892.817.123.519,00. Pagu yang disiapkan untuk bidang pendidikan pada Tahun 2024 yaitu 220.988.969.473,00 atau 24,75% dengan rincian Dinas Pendidikan dianggarkan Rp219.201.918.673,00 dan belanja di luar Dinas Pendidikan Rp1.787.050.800,00.
 - b. Data Kinerja *Mandatory Spending* Belanja Wajib Kesehatan Dianggarkan minimal sebesar 10% dari total APBD di luar gaji senilai Rp649.417.152.588,00. Pagu yang disiapkan untuk bidang kesehatan pada Tahun 2024 yaitu Rp159.354.408.629,00 atau 24,54 % dengan rincian:
Dinas Kesehatan dianggarkan Rp159.354.408.629,00 dan Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang kesehatan dianggarkan Rp0,00.
 - c. Data Kinerja *Mandatory Spending* Belanja Wajib Infrastruktur Dianggarkan minimal 40% dari total belanja daerah di luar bagi hasil dan transfer senilai Rp892.817.123.519,00. Pagu yang disiapkan untuk belanja Infrastruktur pada Tahun 2024 dihitung senilai Rp239.675.059.906.603,00 atau 26,84% dengan rincian:
Dinas Kesehatan dianggarkan Rp159.354.408.629,00 dan belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang kesehatan dianggarkan Rp0,00.
2. Kebijakan tematik yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:
 - a. Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM
 - b. Dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi, dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi

- c. Dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dianggarkan minimal sebesar 1% dari total APBD senilai Rp892.817.123.519,00. Pagu yang disiapkan untuk bidang pengawasan pada Tahun 2024 yaitu Rp8.869.828.055,00 atau 1% pada Kantor Inspektorat Kabupaten dan terealisasi senilai Rp8.707.454.133,00 atau 98,17%.

- d. Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pagu yang disiapkan untuk belanja Pendidikan dan Pelatihan Bagi ASN pada Tahun 2024 dihitung senilai Rp 1.758.602.800,00 atau 0,20% pada kantor BKPSDM dan terealisasi senilai Rp1.591.378.920,00.

7.3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2024 antara lain:

1. Hambatan Utama Pendapatan Daerah
 - a. Sarana dan prasarana operasional pendataan dan pengelolaan pendapatan daerah yang belum memadai;
 - b. Masih kurangnya kapasitas sumber daya manusia pengelola pendapatan;
 - c. Kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. Belum optimalnya upaya peningkatan penggalan sumber-sumber Pendapatan Daerah; dan
 - e. Kondisi geografis Kabupaten Pasangkayu dengan luas wilayah yang cukup besar sementara daya jangkauan petugas pemungut pendapatan yang terbatas.
2. Hambatan Utama Belanja Daerah
 - a. Keterlambatan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dari Menteri Teknis terkait pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari dana perimbangan;
 - b. Terlambatnya pemberitahuan alokasi dana transfer sehingga pelaksanaan kegiatan tidak maksimal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran.;
 - c. Masih terbatasnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah, terlihat dari profesionalisme yang masih rendah, kesesuaian antara latar belakang pegawai atau kompetensi dengan tugas;
 - d. Proses penginputan data dalam aplikasi SIPD masih sering terkendala dengan SDM yang mengoperasikan aplikasi; dan

- e. Adanya beberapa Pihak Ketiga yang tidak melaksanakan dengan baik sehingga kegiatan tidak terealisasi sebagaimana mestinya.

7.3.3 Pergeseran dan Perubahan APBD

Selama tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu telah melakukan enam kali pergeseran anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Pergeseran anggaran pertama ditetapkan melalui Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2024;
2. Pergeseran anggaran kedua ditetapkan melalui Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2024;
3. Pergeseran anggaran ketiga ditetapkan melalui Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2024;
4. Pergeseran anggaran keempat ditetapkan melalui Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2024;
5. Pergeseran anggaran kelima ditetapkan melalui Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2024; dan
6. Pergeseran anggaran keenam ditetapkan melalui Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 36 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2024.

7.4. Kebijakan Akuntansi

7.4.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan peraturan kepala daerah mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintah daerah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

1. Pemerintah daerah;
2. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas, dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

Pada pemerintah Kabupaten Pasangkayu, yang bertindak sebagai entitas pelaporan yaitu SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tidak termasuk perusahaan daerah. Jumlah entitas akuntansi di lingkup Pemerintah Kabupaten Pasangkayu pada Tahun 2023 terdiri dari 44 entitas, yaitu:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan;
5. Badan Pendapatan Daerah;
6. Badan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah;
7. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik;
10. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga;
11. Dinas Kesehatan;
12. Dinas Umum, dan Penataan Ruang;
13. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
14. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja ;
15. Dinas Sosial;
16. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi;
17. Dinas Ketahanan Pangan;
18. Dinas Lingkungan Hidup;
19. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
20. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
21. Dinas Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
22. Dinas Perhubungan;
23. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik;
24. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan;

25. Dinas Penanaman Modal/PTSP;
26. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
27. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
28. Dinas Kelautan dan Perikanan;
29. Dinas Pertanian;
30. Dinas Perkebunan dan Peternakan ;
31. Rumah Sakit Umum Daerah;
32. Kecamatan Pasangkayu;
33. Kecamatan Pedongga;
34. Kecamatan Tikke Raya;
35. Kecamatan Bambalamotu ;
36. Kecamatan Bambaira;
37. Kecamatan Sarjo;
38. Kecamatan Baras;
39. Kecamatan Lariang;
40. Kecamatan Bulu Taba;
41. Kecamatan Sarudu;
42. Kecamatan Dapurang;
43. Kecamatan Duripoku; dan
44. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2024. Entitas pelaporan yang dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Sementara itu, seluruh SKPD di Kabupaten Pasangkayu sebagai entitas akuntansi wajib menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

7.4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dalam penyusunan laporan keuangan dengan basis akrual mengacu pada delapan prinsip yaitu: 1) Basis akuntansi, 2) Prinsip nilai historis, 3) Prinsip realisasi, 4) Prinsip substansi mengungguli

bentuk formal, 5) Prinsip periodisasi, 6) Prinsip konsistensi, 7) Prinsip pengungkapan lengkap, dan 8) Prinsip penyajian wajar.

Pertama, basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual untuk LO, LPE, dan Neraca. Ciri dari laporan basis akrual adalah adanya Laporan Operasional mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum daerah atau entitas pelaporan. Anggaran yang disusun dan dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Pasangkayu masih berdasarkan Basis Kas. LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan sedangkan belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Neraca yang berbasis akrual berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Kedua, penerapan nilai historis (*historical cost*) dikatakan lebih objektif dan dapat diverifikasi. Akan tetapi, bila tidak terdapat nilai historis, maka aset atau kewajiban terkait dapat menggunakan nilai wajar. Aset Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kemudian, kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Ketiga, realisasi (*realization*) adalah pendapatan basis kas yang tersedia dan telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama satu periode akuntansi yang akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut, sedangkan pendapatan dan belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Keempat, substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*) merupakan penyajian laporan dengan wajar transaksi dan peristiwa lain yang seharusnya disajikan perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dengan catatan bukan hanya aspek formalitasnya saja. Bila substansi transaksi tidak konsisten/berbeda dengan formalitasnya, maka substansi transaksi tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam CaLK.

Kelima, periodisitas (*periodicity*) berarti laporan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dibagi menjadi periode-periode pelaporan yaitu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan. Selanjutnya, laporan bulanan digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran; triwulan dipakai untuk Laporan LRA dan rinciannya, serta LO; semesteran digunakan untuk LRA, Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE dan tahunan digunakan untuk LRA, Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, LPE dan CaLK.

Keenam, konsistensi (*consistency*) adalah perlakuan akuntansi yang sama yang diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan.

Ketujuh, prinsip pengungkapan lengkap (*full disclosure*) berarti laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna yang ditempatkan di lembar muka laporan keuangan atau di CaLK. Dengan demikian maksud CaLK adalah untuk menginformasikan kebijakan, asumsi dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pasangkayu dan penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan lembar muka (Neraca, LRA, LPSAL, LO, LPE dan LAK).

Kedelapan, prinsip penyajian wajar (*fair presentation*) berarti laporan keuangan disajikan dengan wajar. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

7.4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan laporan keuangan yang dapat dianalisis dimana pengukurannya dalam akuntansi wajib menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan yang dinilai dengan satuan uang.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pada masing-masing pos laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan neraca adalah sebagai berikut:

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

- 1) Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- 2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- 3) Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
- 4) Persediaan dicatat sebesar:
 - a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
 - c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-Pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-Pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Yang termasuk dalam Investasi nonpermanen di Pemerintah Kabupaten Pasangkayu adalah dana bergulir (dana yang digulirkan/dipinjamkan) kepada kelompok masyarakat, UKM, dan koperasi di wilayah Kabupaten Pasangkayu.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Yang termasuk dalam Investasi permanen di Pemerintah Kabupaten Pasangkayu adalah penyertaan modal kepada PT Bank Sulselbar (BPD).

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih satu periode. Perolehan aset dapat juga dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Biaya Rencana Pembangunan berupa kegiatan *feasibility study* (FS) dan *Detail Engineering Design* (DED) untuk satu sampai lima tahun dicatat sebagai Aset Tetap yaitu Konstruksi dalam Pengerjaan. Setelah tahun kelima FS dan DED tersebut belum diikuti dengan pembangunan fisik, maka dipindah ke Aset Tetap Lainnya. Kemudian FS dan DED tersebut dapat dihapuskan setelah adanya Persetujuan Penghapusan maka aset tersebut pindah ke Aset Lainnya, Aset tersebut akan dihapus dari KIB dan Neraca apabila Surat Keputusan Penghapusan telah terbit. Apabila FS dan DED tersebut diikuti dengan pembangunan fisik, maka biaya perolehan FS dan DED akan dikapitalisasi dengan pembangunan fisik pada aset bersangkutan. Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun maka akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi atau satu periode anggaran. Pemerintah Kabupaten Pasangkayu tidak membentuk dana cadangan.

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan). Pemanfaatan Aset Tetap daerah dapat berupa kerja sama dengan pihak ketiga melalui pinjam pakai, penyewaan, kerja sama pemanfaatan, dan penggunausahaan tanpa mengubah status kepemilikan.

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- 2) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*) atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf ini bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah Kabupaten Pasangkayu menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa mendatang. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

- b. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun

anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah.

Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SiLPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat / Provinsi dicatat sebesar nilai nominal yang telah diterima berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku. Pada realisasinya Dana Transfer Pemerintah Pusat telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari pemerintah pusat / provinsi. Hal ini dikarenakan meskipun sudah ada penetapan alokasi dari Kementerian Keuangan/Pemerintah Pusat dan atau Gubernur namun penerimaannya secara bertahap dan penerimaan tahap berikutnya harus memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu jika tidak terpenuhi maka dana tidak di transfer dari pusat ke daerah dan tidak ada surat pernyataan dari pusat/gubernur ke daerah jumlah yang mengatur hak perolehan daerah.

Dana transfer dalam penyampaian pada daerah sering terjadi kurang bayar atau lebih bayar untuk hal tersebut diberlakukan sebagai hak dan kewajiban yang harus diakui pada saat adanya surat/SK Menteri yang mengatur hal tersebut. Terhadap dana transfer yang telah diterima BUD namun belum dilaksanakan untuk membiayai pembangunan dan kegiatan yang telah ditentukan, masih diberlakukan sebagai Pendapatan Transfer Provinsi/Pusat. Klasifikasi Pendapatan antara lain:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang benar-benar diperoleh dan digali dari potensi yang ada di daerah. Pendapatan Asli Daerah meliputi pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan bagian laba Badan Usaha Milik Daerah dan investasi lainnya, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah dinyatakan sebesar nilai realisasinya yaitu uang kas yang diterima oleh Kas Daerah dalam Tahun Anggaran 2024.

2) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan pendapatan bagi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu yang sumber dananya berasal dari alokasi

pemerintah pusat untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan meliputi bagi hasil pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan Lainnya. Pendapatan Dana Perimbangan dinyatakan sebesar nilai realisasinya yaitu sejumlah uang kas yang diterima oleh Bendahara Umum Daerah (Kas Daerah) dalam Tahun 2024.

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan pendapatan di luar Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang meliputi pendapatan atas aset yang dipisahkan, dana hibah (sumbangan pihak ke tiga), dana darurat, dana kontijensi, dana penyeimbang, dan lain-lain pendapatan. Lain-lain Pendapatan yang Sah dinyatakan sebesar nilai realisasi yaitu sejumlah uang kas yang diterima oleh Bendahara Umum Daerah Tahun 2024.

Pendapatan-LRA diakui pada saat direalisasi artinya pendapatan diakui apabila kas telah diterima oleh pemerintah Kabupaten Pasangkayu di rekening kas umum daerah. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke pemerintah Kabupaten Pasangkayu dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Kabupaten Pasangkayu. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan Perlakuan Transaksi Netto Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dimana prinsip Transaksi Netto adalah melanggar ketentuan asas Bruto yang dikenal selama ini. Namun perlu disadari, bahwa tidak semua transaksi bisa dilakukan secara bruto. Oleh karenanya untuk mengatasi masalah ini harus diberlakukan secara bruto atas catatan transaksi meskipun tidak dilakukan pada transaksi riilnya. Hal ini akan tampak sebagai salah satu penyebab selisih antara angka LRA (yang dicatat bruto) dengan angka Laporan Arus Kas (yang dicatat menurut transaksi riil).

Pengukuran Pendapatan Dana Transfer dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1) Pendapatan LRA

Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat pada Pendapatan LRA diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Pusat telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Pusat.

Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Provinsi pada Pendapatan LRA diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Provinsi telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Provinsi.

2) Pendapatan LO

Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat pada pendapatan LO diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Pusat telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Pusat, ditambah dengan jumlah yang merupakan hak daerah.

Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Provinsi Pada Pendapatan LO diakui pada saat surat penetapan Dana Transfer Pemerintah Provinsi telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Provinsi, ditambah dengan jumlah yang merupakan hak daerah.

Transaksi keuangan yang tidak dapat bruto antara lain adalah jasa giro dan biaya administrasi bank (atas rekening operasional Pemerintah Kabupaten Pasangkayu) yang langsung diberikan dan dipotong pihak bank sesuai dengan ketentuan bank pada saat nasabah membuka rekening.

Untuk semua transaksi keuangan yang diterima/dikeluarkan secara netto, pencatatannya tetap harus diperlakukan secara bruto. Pengungkapan informasi dalam Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan suatu keharusan.

Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Pasangkayu yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- 1) Pemerintah Kabupaten Pasangkayu memiliki hak atas pendapatan; dan

- 2) Pemerintah Kabupaten Pasangkayu menerima kas yang berasal dari pendapatan.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, misalnya:

- 1) Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Retribusi Parkir; dan
- 2) Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Reklame dan Retribusi PBG.

Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh pemerintah, dapat diukur secara andal dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke rekening kas umum daerah.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode Tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, sedangkan **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas.

Yang dimaksud dengan terjadinya pengeluaran kas adalah saat terjadinya pengeluaran uang dari bendahara pengeluaran SKPD atau bendahara umum daerah pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk pembayaran gaji pegawai dan membiayai pelaksanaan suatu kegiatan. Contoh pada saat pemerintah membayar gaji pegawai dan pemeliharaan gedung kantor.

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan, pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.

Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

Beban diakui pada saat:

- 1) Timbulnya kewajiban;
- 2) Terjadinya konsumsi aset; dan
- 3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.

Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

Klasifikasi Belanja antara lain sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai, merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Belanja Bunga, merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang atas kewajiban pokok utang (*principal out standing*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- 3) Belanja Subsidi, merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- 4) Belanja Hibah, merupakan belanja yang digunakan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- 5) Belanja Bantuan Sosial, merupakan belanja yang digunakan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Belanja Bagi Hasil, merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 7) Belanja Bantuan Keuangan, merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya, atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah

lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

- 8) Belanja Tidak Terduga, merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- 9) Belanja Modal, merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran/ pembelian/pengadaan/pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset tetap lainnya.

- c. **Pembiayaan (*financing*)** adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah Kabupaten Pasangkayu, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah Kabupaten Pasangkayu terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode Tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat direalisasi atau dapat direalisasi sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat timbulnya kewajiban. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto.

Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan

dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam Pos Silpa atau Sikpa.

2. Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu sebagaimana ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan (dalam hal ini BPKAD selaku BUD). Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.

Laporan keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Kabupaten Pasangkayu sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD.

Prosedur konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik yaitu rekening konsolidasi.

7.4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 penerapan sistem akuntansi pemerintahan pada Pendapatan dan Belanja telah didasarkan pada SAP, baik basis yang digunakan maupun dasar pengukurannya.

Untuk penyusunan Neraca Akhir Tahun 2024, pengakuan aset berdasarkan nilai perolehan. Sementara untuk aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan sudah dilakukan penyusutan sebagaimana dimaksud SAP.

Pencatatan Persediaan menggunakan Metode Fisik dan Metode Penilaian Persediaan menggunakan Metode FIFO atau MPKP (masuk pertama keluar pertama). Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*), meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, obat-obatan dan bahan farmasi dan yang sejenis. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan sediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Pencatatan untuk barang yang berasal dari anggaran belanja modal dengan nilai per unit di bawah batas minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*) yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak dicatat sendiri didalam inventaris non aset dan diakui sebagai beban sehingga akan mengurangi ekuitas.

Piutang yang melebihi jatuh tempo dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih atau penyisihan/cadangan kerugian piutang dengan besaran persentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan persentase cadangan penyisihan piutang.

Nilai satuan minimum kapitalisasi pada nilai satuan aset tetap atau aset lainnya dan tidak berdasarkan nilai sekelompok aset tetap atau aset lainnya. Batasan minimal kapitalisasi (*threshold capitalization*) untuk setiap jenis aset untuk dapat dikategorikan aset tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Nilai Minimum Kapitalisasi

No	Jenis Aset Tetap	Batasan Minimal Kapitalisasi untuk Per Satuan Aset Tetap atau Aset Lainnya	
1	Tanah	Rp	10.000.000,00
2	Alat-Alat Berat	Rp	10.000.000,00
3	Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp	5.000.000,00
4	Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Rp	1.000.000,00
5	Alat-Alat Angkutan di Air Bermotor	Rp	5.000.000,00
6	Alat-Alat Angkutan di Air Tidak Bermotor	Rp	1.000.000,00
7	Alat-Alat Angkutan Udara	Rp	10.000.000,00
8	Alat-Alat Bengkel	Rp	300.000,00
9	Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	Rp	5.000.000,00
10	Peralatan Kantor	Rp	300.000,00
11	Perlengkapan Kantor	Rp	300.000,00
12	Komputer	Rp	300.000,00
13	Mebelair	Rp	150.000,00
14	Peralatan Dapur	Rp	150.000,00
15	Penghias Ruangan Rumah Tangga	Rp	300.000,00
16	Alat-Alat Studio	Rp	300.000,00
17	Alat-Alat Komunikasi	Rp	500.000,00
18	Alat-Alat Ukur	Rp	300.000,00
19	Alat-Alat Kedokteran	Rp	300.000,00
20	Alat-Alat Laboratorium	Rp	300.000,00
21	Rambu-rambu	Rp	1000.000,00
22	Gedung dan Bangunan	Rp	10.000.000,00
23	Konstruksi Jalan	Rp	50.000.000,00
24	Konstruksi Jembatan	Rp	50.000.000,00
25	Konstruksi Jaringan Air	Rp	10.000.000,00
26	Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	Rp	300.000,00
27	Instalasi Listrik dan Telepon	Rp	1.000.000,00
28	Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	Rp	10.000.000,00
29	Buku/Kepustakaan	Rp	100.000,00
30	Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	Rp	300.000,00
31	Hewan/Ternak dan Tanaman	Rp	1.000.000,00
32	Alat-Alat Persenjataan/ Keamanan	Rp	500.000,00
33	Aset tetap selain yang disebutkan diatas	Rp	300.000,00

Batasan minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*) khusus untuk tanah, jika pengadaan tanah menambah bidang dan atau luas tanah, maka tetap

diakui sebagai aset tetap meskipun biayanya dibawah batasan minimal kapitalisasi (*capitalization treshold*).

Metode penyusutan yang dipergunakan dalam penyesuaian nilai aset tetap Pemerintah Daerah adalah metode garis lurus (*straight line method*). Rumusan perhitungan metode garis lurus (*straight line method*) untuk setiap periode adalah sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Penyusutan per periode adalah nilai yang disesuaikan atau dikurangkan pada nilai buku aset tetap untuk setiap periode pemakaian aset tetap. Periode perhitungan penyusutan aset tetap adalah setiap bulan.

Pengelompokan dan waktu yang digunakan dalam perhitungan penyusutan aset tetap adalah pendekatan bulan penggunaan, tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 15 Tarif Penyusutan Aset Tetap

No	Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Per Bulan dari Nilai yang dapat disusutkan
1	Bukan Bangunan		
a.	Kelompok 1	5 Tahun	1/60 atau 1,667%
b.	Kelompok 2	10 Tahun	1/120 atau 0,833%
c.	Kelompok 3	15 Tahun	1/180 atau 0,556%
d.	Kelompok 4	20 Tahun	1/240 atau 0,417%
2	Bangunan		
a.	Permanen	20 Tahun	1/240 atau 0,417%
b.	Tidak Permanen	10 Tahun	1/120 atau 0,833%

7.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

7.5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

7.5.1.1 Pendapatan-LRA

2024 (Rp)	2023 (Rp)
852.847.983.621,86	828.565.205.837,46

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.

Pendapatan-LRA dicatat pada saat diterima dari Kas Umum Daerah. Pendapatan-LRA merupakan sumber pendanaan bagi pemerintah, demikian pula bagi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, pendapatan dapat berasal dari potensi daerah yang bersangkutan maupun dari Provinsi dan Pusat.

Pendapatan-LRA yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun Anggaran 2024 senilai Rp852.847.983.621,86 sedangkan Tahun 2023 senilai Rp828.565.205.837,46. Realisasi Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan senilai Rp24.282.777.784,40 atau 2,93% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Anggaran Pendapatan-LRA yang ditargetkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp842.795.145.456,00. Jika dibandingkan antara anggaran dan realisasi Pendapatan-LRA, maka capaian realisasinya senilai 101,19% atau lebih senilai Rp10.052.838.165,86 dari target yang telah ditetapkan.

Pendapatan dapat dibagi menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Anggaran dan realisasi pendapatan tersebut diatas dalam Tahun anggaran 2024 serta realisasi Tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 7.5.1. 1 Rincian Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah-LRA	49.197.032.611,00	61.101.297.060,86	124,20%	59.370.848.813,46
Pendapatan Transfer-LRA	786.416.210.653,00	784.455.018.458,00	99,75%	768.664.685.044,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA	7.181.902.192,00	7.291.668.103,00	101,53%	529.671.980,00
JUMLAH PENDAPATAN	842.795.145.456,00	852.847.983.621,86	101,19%	828.565.205.837,46

7.5.1.1 A. Pendapatan Asli Daerah-LRA

2024 (Rp)	2023 (Rp)
61.101.297.060,86	59.370.848.813,46

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang dikelola dan dipungut sendiri oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah.

Pendapatan Asli Daerah-LRA yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun Anggaran 2024 senilai Rp61.101.297.060,86 sedangkan Tahun 2023 senilai Rp59.370.848.813,46. Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan senilai Rp1.730.448.247,40 atau 2,91% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Anggaran Pendapatan Asli Daerah-LRA yang ditargetkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp49.197.032.611,00. Jika dibandingkan antara anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA, maka capaian realisasinya senilai 124,20% atau lebih senilai Rp11.904.264.449,86 dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan Asli Daerah-LRA secara rinci adalah:

Tabel 7.5.1. 2 Rincian Pendapatan Asli Daerah-LRA Tahun Anggaran 2024
(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Pendapatan Pajak Daerah-	14.833.315.952,00	22.965.168.782,36	154,82%	16.807.664.021,00
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	5.814.633.543,00	8.262.414.576,08	142,10%	4.714.260.496,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan	3.159.163.585,00	3.173.536.172,00	100,45%	3.146.110.906,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	25.389.919.531,00	26.700.177.530,42	105,16%	34.702.813.390,46
JUMLAH PAD	49.197.032.611,00	61.101.297.060,86	124,20%	59.370.848.813,46

7.5.1.1 A. a Pendapatan Pajak Daerah-LRA

2024 (Rp)	2023 (Rp)
22.965.168.782,36	16.807.664.021,00

Pendapatan Pajak Daerah-LRA adalah pendapatan yang sifatnya memaksa dan pendapatan ini tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasangkayu. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Pendapatan Pajak Daerah-LRA yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun Anggaran 2024 senilai Rp22.965.168.782,36 sedangkan Tahun 2023 senilai Rp16.807.664.021,00. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan senilai Rp6.157.504.761,36 atau 36,64% dibandingkan Tahun Anggaran 2023.

Anggaran Pendapatan Pajak Daerah-LRA yang ditargetkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp14.833.315.952,00. Jika dibandingkan antara anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA, maka capaian realisasinya senilai 154,82% atau lebih senilai Rp8.131.852.830,36 dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan Pajak Daerah-LRA secara rinci adalah:

Tabel 7.5.1. 3 Rincian Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024
(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Pajak Hotel - LRA	65.516.663,00	180.719.938,00	275,84%	79.002.500,00
Pajak Restoran - LRA	564.039.116,00	1.379.379.012,36	244,55%	691.489.116,00
Pajak Hiburan - LRA	11.000.000,00	18.450.000,00	167,73%	11.400.000,00
Pajak Reklame - LRA	325.000.000,00	705.422.409,00	217,05%	670.179.206,00
Pajak Penerangan Jalan - LRA	8.093.340.173,00	9.314.181.850,00	115,08%	8.353.900.077,00
Pajak Air Tanah - LRA	10.000.000,00	11.830.000,00	118,30%	9.180.000,00
Pajak Sarang Burung Walet - LRA	14.420.000,00	14.650.909,00	101,60%	9.200.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.750.000.000,00	6.798.279.031,00	247,21%	4.704.843.097,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	2.500.000.000,00	1.906.503.647,00	76,26%	1.729.823.638,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) -	500.000.000,00	2.635.751.986,00	527,15%	548.646.387,00
Jumlah Pajak Daerah	14.833.315.952,00	22.965.168.782,36	154,82%	16.807.664.021,00

7.5.1.1 A.b Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

2024 (Rp)	2023 (Rp)
8.262.414.576,08	4.714.260.496,00

Pendapatan Retribusi Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah dimana besaran pungutan tarifnya ditetapkan melalui Perda. Pendapatan retribusi terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh beberapa SKPD sebagai unit penghasil.

Pendapatan Retribusi Daerah-LRA yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun Anggaran 2024 senilai Rp8.262.414.576,08 sedangkan Tahun 2023 senilai Rp4.714.260.496,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan senilai Rp3.548.154.080,08 atau 75,26% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah-LRA yang ditargetkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp5.814.633.543,00. Jika dibandingkan antara anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA, maka capaian realisasinya senilai 142,10% atau lebih senilai Rp2.447.781.033,08 dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan Retribusi Daerah-LRA secara rinci adalah:

Tabel 7.5.1. 4 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Retribusi Jasa Umum	3.749.442.543,00	7.598.035.391,58	202,64%	3.988.721.986,00
Retribusi Jasa Usaha	1.526.215.000,00	401.353.987,50	26,30%	631.016.250,00
Retribusi Perizinan	538.976.000,00	263.025.197,00	48,80%	94.522.260,00
Jumlah Retribusi	5.814.633.543,00	8.262.414.576,08	142,10%	4.714.260.496,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan PAD yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintahan dan Retribusi Jasa Umum dapat dirinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7.5.1. 5 Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.402.042.543,00	7.062.133.391,58	207,59%	3.387.333.045,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	210.000.000,00	472.202.000,00	224,86%	300.162.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	137.400.000,00	53.000.000,00	38,57%	50.000.000,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	-	0,00%	251.226.941,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	-	10.700.000,00	0,00%	-
Jumlah	3.749.442.543,00	7.598.035.391,58	202,64%	3.988.721.986,00

Data pada tabel di atas menunjukkan anggaran pendapatan retribusi jasa umum Tahun anggaran 2024 senilai Rp3.749.442.543,00 terealisasi senilai Rp7.598.035.391,58 atau 202,64%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun anggaran 2023 senilai Rp3.988.721.986,00 mengalami peningkatan senilai Rp3.609.313.405,58 atau 90,49%.

2. Retribusi Jasa Usaha

Pendapatan retribusi Jasa Usaha merupakan sumber PAD yang berhubungan dengan pemakaian aset daerah. Retribusi Jasa Usaha dirinci sebagai berikut:

Tabel 7.5.1. 6 Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.262.695.000,00	183.077.487,50	14,50%	428.466.250,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	263.520.000,00	204.765.000,00	77,70%	202.550.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	13.511.500,00	100,00%	-
Jumlah	1.526.215.000,00	401.353.987,50	26,30%	631.016.250,00

Data pada tabel di atas menunjukkan anggaran pendapatan retribusi jasa usaha Tahun anggaran 2024 senilai Rp1.526.215.000,00 terealisasi senilai Rp401.353.987,50 atau 26,30%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp631.016.250,00 dan mengalami penurunan senilai Rp229.662.262,50 atau -36,40%.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Pendapatan retribusi perizinan tertentu merupakan pendapatan yang berhubungan dengan fungsi Pemerintah Daerah sebagai regulator dan otorisasi untuk memberikan ijin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. Retribusi Perizinan Tertentu merupakan sumber PAD dapat dirinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7.5.1. 7 Rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung - LRA	538.976.000,00	263.025.197,00	48,80%	94.522.260,00
Jumlah	538.976.000,00	263.025.197,00	48,80%	94.522.260,00

Data pada tabel di atas menunjukkan anggaran pendapatan retribusi perizinan tertentu Tahun anggaran 2024 senilai Rp538.976.000,00 terealisasi senilai Rp263.025.197,00 atau 48,80%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun anggaran 2023 senilai Rp94.522.260,00 mengalami peningkatan senilai Rp168.502.937,00 atau 178,27%.

7.5.1.1 A.c Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA

2024 (Rp)	2023 (Rp)
3.173.536.172,00	3.146.110.906,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA, pendapatannya diterima dan dikelola melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pasangkayu yang berupa PAD dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pasangkayu pada Badan Usaha Milik Daerah.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun Anggaran 2024 senilai Rp3.173.536.172,00 sedangkan Tahun 2023 senilai Rp3.146.110.906,00 . Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan senilai Rp27.425.266,00 atau 0,87% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA yang ditargetkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp3.159.163.585,00 . Jika dibandingkan antara anggaran dan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA, maka capaian realisasinya senilai 100,45% atau lebih senilai Rp14.372.587,00 dari target yang telah ditetapkan.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA secara rinci adalah:

Tabel 7.5.1. 8 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD - LRA	3.159.163.585,00	3.173.536.172,00	100,45%	3.146.110.906,00
Jumlah	3.159.163.585,00	3.173.536.172,00	100,45%	3.146.110.906,00

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA diperoleh dari Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp17.395.000.000,00. Hingga saat ini komposisi kepemilikan saham Pemda pada Bank Sulselbar adalah 0,7931% sehingga metode penilaian Investasi dilakukan dengan menggunakan metode biaya, dimana investasi dicatat senilai biaya perolehan. Penghasilan atas Investasi tersebut diakui senilai bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya Investasi pada Badan usaha atau Badan hukum terkait.

7.5.1.1 A.d Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA

2024 (Rp)	2023 (Rp)
26.700.177.530,42	34.702.813.390,46

Lain-Lain PAD yang Sah merupakan pendapatan yang berasal dari Kabupaten Pasangkayu selain pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain PAD yang sah dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pasangkayu.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun Anggaran 2024 senilai Rp26.700.177.530,42 sedangkan Tahun 2023 senilai Rp34.702.813.390,46. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan senilai Rp8.002.635.860,04 atau -23,06% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA yang ditargetkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp25.389.919.531,00. Jika dibandingkan antara anggaran dan realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA, maka capaian realisasinya senilai 105,16% atau lebih senilai Rp1.310.257.999,42 dari target yang telah ditetapkan. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA secara rinci adalah:

Tabel 7.5.1. 9 Rincian Lain-Lain PAD yang Sah-LRA Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Hasil Penjualan BMD yang Tidak	512.388.836,00	404.314.500,00	78,91%	523.368.836,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	350.000.000,00	360.898.420,00	103,11%	313.840.261,00
Pendapatan dari Hasil Kerja Sama Daerah - LRA	720.000.000,00	763.329.559,08	106,02%	1.544.400.833,79
Penerimaan Jasa Giro - LRA	1.850.000.000,00	1.945.383.482,72	105,16%	2.014.771.186,00
Pendapatan Bunga Deposito -LRA	-	19.373.475,00	100,00%	48.358.954,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.508.460.174,00	14.373.500,00	0,95%	53.025.000,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	318.672.452,00	442.323.102,49	138,80%	1.262.956.879,65
Pendapatan dari Pengembalian-LRA	130.398.069,00	390.440.710,00	299,42%	343.627.906,00
Pendapatan BLUD -LRA	20.000.000.000,00	22.359.740.781,13	111,80%	22.588.521.937,02
Pendapatan Dana Kapitasi JKN	-	-	0,00%	6.004.636.750,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	-	0,00%	5.304.847,00
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah-	25.389.919.531,00	26.700.177.530,42	105,16%	34.702.813.390,46

- Pendapatan dari Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan dengan rincian sebagai		
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin		373.282.500,00
Hasil Penjualan Bangunan Gedung		31.032.000,00
		404.314.500,00
- Pendapatan dari Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan dengan rincian sebagai berikut:		
Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (Retribusi air bersih)		360.898.420,00
- Realisasi Pendapatan dari Hasil Kerja Sama Daerah yang dikelola BPKAD senilai Rp763.329.559,08. Pos ini dapat dirinci sebagai berikut:		
a Pengembalian temuan BPK - RI		455.986.197,44
b Pengembalian temuan Inspektorat		167.064.416,00
c Pengembalian dana BOP Paud dari sekolah yang sudah tidak beroperasi		6.600.000,00
e Kelebihan Pembayaran Pajak Galian C		15.677.786,65
g Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame		3.888,00
h Kelebihan Pembayaran Pajak Jasa Boga		723.719,28
i Kelebihan Pembayaran Pajak Rumah Makan		30.504,00
j Kelebihan pembayaran Jasa Giro Sekolah		219,00
k Lain - lain PAD yang sah lainnya		117.242.828,71
		763.329.559,08
- Pendapatan dari Pengembalian dengan rincian sebagai berikut:		
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan		332.810.530,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan		57.630.180,00
		390.440.710,00

7.5.1.1 B. Pendapatan Transfer-LRA

2024 (Rp)	2023 (Rp)
784.455.018.458,00	768.664.685.044,00

Pendapatan Transfer-LRA yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun Anggaran 2024 senilai Rp784.455.018.458,00 sedangkan Tahun 2023 senilai Rp768.664.685.044,00. Realisasi Pendapatan Transfer-LRA Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan senilai Rp15.790.333.414,00 atau 2,05% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Anggaran Pendapatan Transfer-LRA yang ditargetkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp786.416.210.653,00. Jika dibandingkan antara anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer-LRA, maka capaian realisasinya senilai 99,75% atau kurang senilai Rp1.961.192.195,00 dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan Transfer-LRA secara rinci adalah:

Tabel 7.5.1. 10 Pendapatan Transfer-LRA Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LRA	700.158.333.000,00	695.020.759.614,00	99,27%	681.904.851.030,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya -	54.694.684.000,00	54.694.684.000,00	100,00%	53.799.805.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya -	31.563.193.653,00	34.739.574.844,00	110,06%	32.672.529.014,00
Bantuan Keuangan - LRA	-	-	0,00%	287.500.000,00
Jumlah Pendapatan	786.416.210.653,00	784.455.018.458,00	99,75%	768.664.685.044,00

7.5.1.1 B.a Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan – LRA

2024 (Rp)	2023 (Rp)
695.020.759.614,00	681.904.851.030,00

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LRA yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun Anggaran 2024 senilai Rp695.020.759.614,00 sedangkan Tahun 2023 senilai Rp681.904.851.030,00. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LRA Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan senilai Rp13.115.908.584,00 atau 1,92% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Anggaran Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LRA yang ditargetkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp700.158.333.000,00. Jika dibandingkan antara anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LRA, maka capaian realisasinya senilai 99,27% atau kurang senilai

Rp5.137.573.386,00 dari target yang telah ditetapkan. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LRA secara rinci adalah:

Tabel 7.5.1. 11 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Dana Bagi Hasil Pajak -	7.846.503.000,00	9.531.487.000,00	121,47%	10.116.542.067,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LRA	12.190.176.000,00	12.192.946.000,00	100,02%	14.070.260.145,00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	496.999.363.000,00	496.999.363.000,00	100,00%	473.350.213.036,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA	103.477.705.000,00	102.005.217.974,00	98,58%	104.368.130.391,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	79.644.586.000,00	74.291.745.640,00	93,28%	79.999.705.391,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	700.158.333.000,00	695.020.759.614,00	99,27%	681.904.851.030,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA tersebut dijelaskan sebagai berikut:

7.5.1.1 B.a.1 Dana Bagi Hasil Pajak – LRA

Bagi Hasil Pajak - LRA merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat-LRA pada Kabupaten Pasangkayu yang berupa bagi hasil PBB, bagi hasil PPh, bagi rata PBB. Rincian dana bagi hasil pajak Tahun Anggaran 2024 adalah:

Tabel 7.5.1. 12 Rincian Bagi Hasil Pajak - LRA Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH)	2.062.091.000,00	2.457.042.000,00	119,15%	2.299.985.220,00
Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.784.412.000,00	7.074.445.000,00	122,30%	7.816.556.847,00
Jumlah	7.846.503.000,00	9.531.487.000,00	121,47%	10.116.542.067,00

Dana Bagi Hasil Pajak - LRA yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun Anggaran 2024 senilai Rp9.531.487.000,00 sedangkan Tahun 2023 senilai Rp10.116.542.067,00. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak - LRA Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan senilai Rp585.055.067,00 atau -5,78% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Anggaran Dana Bagi Hasil Pajak - LRA yang ditargetkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp7.846.503.000,00. Jika dibandingkan antara anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak - LRA, maka capaian realisasinya senilai 121,47% atau lebih senilai Rp1.684.984.000,00 dari target yang telah ditetapkan.

7.5.1.1 B.a.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LRA

Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LRA pada tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebagai bagian dari transfer Pemerintah Pusat-LRA pada Kabupaten Pasangkayu yang berupa Dana Bagi Hasil dari Pusat, sumber daya Mineral dan

Batubara-Landrent, dana bagi hasil sawit dan dana bagi hasil Sumber Daya Alam perikanan.

Tabel 7.5.1. 13 Rincian Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	10.000,00	30.977.000,00	309770,00%	3.709.284,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	28.197.000,00	-	0,00%	8.352.650,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi	-	-	0,00%	11.634.633.000,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	1.884.618.000,00	1.884.618.000,00	100,00%	2.423.565.211,00
DBH Sawit	10.277.351.000,00	10.277.351.000,00	100,00%	-
Jumlah	12.190.176.000,00	12.192.946.000,00	100,02%	14.070.260.145,00

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LRA yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun Anggaran 2024 senilai Rp12.192.946.000,00 sedangkan Tahun 2023 senilai Rp14.070.260.145,00. Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LRA Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan senilai Rp1.877.314.145,00 atau -13,34% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Anggaran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LRA yang ditargetkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp12.190.176.000,00. Jika dibandingkan antara anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LRA, maka capaian realisasinya senilai 100,02% atau lebih senilai Rp2.770.000,00 dari target yang telah ditetapkan.

7.5.1.1 B.a.3 Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA

Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat-LRA pada Kabupaten Pasangkayu yang berupa dana alokasi umum. Dana alokasi umum diterima pada Kas Umum Daerah Rekening giro Nomor 075-001-00000002-2 pada PT Bank Sulselbar (BPD) Cabang Pasangkayu. Rincian dana alokasi umum Tahun Anggaran 2024 adalah:

Tabel 7.5.1. 14 Rincian Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	496.999.363.000,00	496.999.363.000,00	100,00%	473.350.213.036,00
Jumlah	496.999.363.000,00	496.999.363.000,00	100,00%	473.350.213.036,00

Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun Anggaran 2024 senilai Rp496.999.363.000,00 sedangkan Tahun 2023 senilai Rp473.350.213.036,00. Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan senilai Rp23.649.149.964,00 atau 5,00% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA yang ditargetkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp496.999.363.000,00. Jika dibandingkan antara anggaran dan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA, maka capaian realisasinya senilai 100,00% dari target yang telah ditetapkan.

Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun Anggaran 2024 senilai Rp496.999.363.000,00, dimana di dalamnya terdapat DAU *Specific Grant* (SG) yang dialokasikan khusus untuk membiayai kegiatan tertentu dengan rincian sebagai berikut.

DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	800.000.000,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian	9.164.718.000,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	50.311.049.000,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	35.755.372.000,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	36.862.497.000,00

7.5.1.1 B.a.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LRA

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat-LRA pada Kabupaten Pasangkayu yang berupa dana alokasi khusus fisik pada 7 bidang. Rincian dana alokasi khusus fisik Tahun Anggaran 2024 adalah:

Tabel 7.5.1.15 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
DAK FISIK				
DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LRA	27.611.635.000,00	27.510.734.000,00	99,63%	40.232.823.500,00
DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LRA	2.936.712.000,00	2.803.155.600,00	95,45%	-
DAK Bidang Infrastruktur Air Minum - LRA	14.864.464.000,00	14.347.162.629,00	96,52%	7.259.582.000,00
DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LRA	6.109.707.000,00	6.109.707.000,00	100,00%	10.104.297.000,00
DAK Bidang Kesehatan dan KB - LRA	33.815.071.000,00	33.335.924.077,00	98,58%	24.413.918.135,00
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LRA	3.614.153.000,00	3.582.671.176,00	99,13%	-
DAK Bidang Pendidikan - LRA	14.525.963.000,00	14.315.863.492,00	98,55%	22.357.509.756,00
Total DAK Fisik	103.477.705.000,00	102.005.217.974,00	98,58%	104.368.130.391,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun Anggaran 2024 senilai Rp102.005.217.974,00 sedangkan Tahun 2023 senilai Rp104.368.130.391,00. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan senilai Rp2.362.912.417,00 atau -2,26% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA

yang ditargetkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp103.477.705.000,00. Jika dibandingkan antara anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA, maka capaian realisasinya senilai 98,58% atau kurang senilai Rp1.472.487.026,00 dari target yang telah ditetapkan.

7.5.1.1 B.a.5 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LRA

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat-LRA pada Kabupaten Pasangkayu yang berupa dana alokasi khusus non fisik pada 13 jenis. Rincian dana alokasi khusus non fisik Tahun Anggaran 2024 adalah:

Tabel 7.5.1.16 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
DAK NON FISIK				
DAK Non Fisik-BOS Reguler	25.787.720.000,00	25.768.895.392,00	99,93%	25.504.883.455,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.235.000.000,00	1.235.000.000,00	100,00%	980.000.000,00
DAK Non Fisik-TPG-PNSD	26.982.795.000,00	26.982.795.000,00	100,00%	25.276.435.136,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.412.250.000,00	1.412.250.000,00	100,00%	1.086.250.000,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD	526.823.000,00	526.823.000,00	100,00%	166.653.750,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.241.000.000,00	2.200.653.000,00	98,20%	2.277.481.000,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.179.500.000,00	756.500.000,00	64,14%	1.423.650.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3.785.522.000,00	1.584.616.999,00	41,86%	17.611.451.613,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	250.401.000,00	118.469.500,00	47,31%	-
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.694.977.000,00	3.561.088.000,00	96,38%	3.672.166.600,00
Fasilitasi Penanaman Modal	389.171.000,00	388.715.450,00	99,88%	510.062.327,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-	0,00%	380.938.110,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	650.000.000,00	628.534.166,00	96,70%	1.109.733.400,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	11.509.427.000,00	9.127.405.133,00	79,30%	-
Jumlah	79.644.586.000,00	74.291.745.640,00	93,28%	79.999.705.391,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun Anggaran 2024 senilai Rp74.291.745.640,00 sedangkan Tahun 2023 senilai Rp79.999.705.391,00. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan senilai Rp5.707.959.751,00 atau -7,13% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA yang ditargetkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai

Rp79.644.586.000,00. Jika dibandingkan antara anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA, maka capaian realisasinya senilai 93,28% atau kurang senilai Rp5.352.840.360,00 dari target yang telah ditetapkan.

7.5.1.1 B.b Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LRA

2024 (Rp)	2023 (Rp)
54.694.684.000,00	53.799.805.000,00

Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun Anggaran 2024 senilai Rp54.694.684.000,00 sedangkan Tahun 2023 senilai Rp53.799.805.000,00. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan senilai Rp894.879.000,00 atau 1,66% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Anggaran Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA yang ditargetkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp54.694.684.000,00. Jika dibandingkan antara anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA, maka capaian realisasinya senilai 100,00% dari target yang telah ditetapkan. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA secara rinci adalah:

Tabel 7.5.1.17 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Dana Desa - LRA	54.694.684.000,00	54.694.684.000,00	100,00%	53.799.805.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	54.694.684.000,00	54.694.684.000,00	100,00%	53.799.805.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA tersebut dijelaskan sebagai berikut:

7.5.1.1 B.b.1 Dana Penyesuaian – LRA

Dana Penyesuaian - LRA pada Tahun Anggaran 2024 merupakan Dana Insentif Daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. pada Anggaran 2024 Kabupaten Pasangkayu tidak menerima Dana Insentif Daerah.

7.5.1.1 B.b.2 Dana Desa – LRA

Dana Desa - LRA merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA pada Kabupaten Pasangkayu yang berupa dana untuk disalurkan kepada Pemerintah Desa. Rincian dana desa Tahun Anggaran 2024 adalah:

Tabel 7.5.1.18 Rincian Dana Desa - LRA Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Dana Desa - LRA	54.694.684.000,00	54.694.684.000,00	100,00%	53.799.805.000,00
Jumlah	54.694.684.000,00	54.694.684.000,00	100,00%	53.799.805.000,00

Dana Desa - LRA yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun Anggaran 2024 senilai Rp54.694.684.000,00 sedangkan Tahun 2023 senilai Rp53.799.805.000,00. Realisasi Dana Desa - LRA Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan senilai Rp894.879.000,00 atau 1,66% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Anggaran Dana Desa - LRA yang ditargetkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp54.694.684.000,00. Jika dibandingkan antara anggaran dan realisasi Dana Desa - LRA, maka capaian realisasinya senilai 100,00% dari target yang telah ditetapkan.

Dana Desa diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan menjadi kewenangan desa. Dana Desa ditransfer langsung dari Pemerintah Pusat ke rekening Pemerintah Desa namun tetap ditampung dalam APBD Kabupaten.

7.5.1.1 B.c Transfer Pemerintah Provinsi – LRA

2024 (Rp)	2023 (Rp)
34.739.574.844,00	32.960.029.014,00

Transfer Pemerintah Provinsi - LRA yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun Anggaran 2024 senilai Rp34.739.574.844,00 sedangkan Tahun 2023 senilai Rp32.960.029.014,00. Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi - LRA Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan senilai Rp1.779.545.830,00 atau 5,40% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Anggaran Transfer Pemerintah Provinsi - LRA yang ditargetkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp31.563.193.653,00. Jika dibandingkan antara anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Provinsi - LRA, maka capaian realisasinya senilai 110,06% atau lebih senilai Rp3.176.381.191,00 dari target yang telah ditetapkan. Transfer Pemerintah Provinsi - LRA secara rinci adalah:

Tabel 7.5.1. 19 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	31.563.193.653,00	34.739.574.844,00	110,06%	32.672.529.014,00
Bantuan Keuangan	-	-	0,00%	287.500.000,00
Jumlah Pendapatan	31.563.193.653,00	34.739.574.844,00	110,06%	32.960.029.014,00

7.5.1.1 B.c.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi – LRA

2024 (Rp)	2023 (Rp)
34.739.574.844,00	32.672.529.014,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi - LRA yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun Anggaran 2024 senilai Rp34.739.574.844,00 sedangkan Tahun 2023 senilai Rp32.672.529.014,00. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi - LRA Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan senilai Rp2.067.045.830,00 atau 6,33% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Anggaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi - LRA yang ditargetkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp31.563.193.653,00. Jika dibandingkan antara anggaran dan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi - LRA, maka capaian realisasinya senilai 110,06% atau lebih senilai Rp3.176.381.191,00 dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi - LRA secara rinci adalah:

Tabel 7.5.1. 20 Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	4.998.826.710,00	5.331.175.134,00	106,65%	4.998.826.710,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.254.709.417,00	5.871.058.667,00	111,73%	5.254.709.417,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10.993.417.988,00	12.302.238.198,00	111,91%	10.993.417.988,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	50.281.506,00	43.211.277,00	85,94%	50.281.506,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	10.265.958.032,00	11.191.891.568,00	109,02%	11.375.293.393,00
Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	31.563.193.653,00	34.739.574.844,00	110,06%	32.672.529.014,00

B.c.2 Bantuan Keuangan – LRA

2024 (Rp)	2023 (Rp)
-	287.500.000,00

Bantuan Keuangan - LRA adalah berupa dana bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang penggunaannya dikhususkan untuk penyelesaian sengketa perbatasan wilayah Kabupaten Pasangkayu dengan wilayah Kabupaten Donggala di desa Pakawa Kecamatan Pasangkayu.

Bantuan Keuangan - LRA yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun Anggaran 2024 senilai Rp0,00 sedangkan Tahun 2023 senilai Rp287.500.000,00. Realisasi Bantuan Keuangan - LRA Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan senilai Rp287.500.000,00 dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Anggaran Bantuan Keuangan - LRA yang ditargetkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp0,00. Jika dibandingkan antara anggaran dan realisasi Bantuan Keuangan - LRA, maka capaian realisasinya senilai 0,00% dari target yang telah ditetapkan. Bantuan Keuangan - LRA secara rinci adalah:

Tabel 7.5.1. 21 Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat	-	-	0,00%	287.500.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan	-	-	0,00%	287.500.000,00

7.5.1.1 C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

2024	2023
Rp)	Rp)
7.291.668.103,00	529.671.980,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun Anggaran 2024 senilai Rp7.291.668.103,00 sedangkan Tahun 2023 senilai Rp529.671.980,00. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan senilai Rp6.761.996.123,00 atau 1276,64% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA yang ditargetkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp7.181.902.192,00. Jika dibandingkan antara anggaran dan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA, maka capaian realisasinya senilai 101,53% atau lebih senilai Rp109.765.911,00 dari target yang telah ditetapkan. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA secara rinci adalah:

Tabel 7.5.1. 22 Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Pendapatan Hibah - LRA	500.000.000,00	736.129.795,00	147,23%	529.671.980,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.681.902.192,00	6.555.538.308,00	0,98	-
Jumlah Pendapatan Transfer	7.181.902.192,00	7.291.668.103,00	101,53%	529.671.980,00

7.5.1.1 C.a Pendapatan Hibah – LRA

2024	2023
(Rp)	(Rp)
736.129.795,00	529.671.980,00

Pendapatan Hibah - LRA yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun Anggaran 2024 senilai Rp736.129.795,00 sedangkan Tahun 2023 senilai Rp529.671.980,00. Realisasi Pendapatan Hibah - LRA Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan senilai Rp206.457.815,00 atau 38,98% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Anggaran Pendapatan Hibah -

LRA yang ditargetkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp500.000.000,00. Jika dibandingkan antara anggaran dan realisasi Pendapatan Hibah - LRA, maka capaian realisasinya senilai 147,23% atau lebih senilai Rp236.129.795,00 dari target yang telah ditetapkan.

Pendapatan Hibah - LRA Secara rinci adalah:

Tabel 7.5.1. 23 Pendapatan Hibah - LRA Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga / Sejenis - LRA	500.000.000,00	736.129.795,00	147,23%	529.671.980,00
Jumlah Pendapatan Hibah - LRA	500.000.000,00	736.129.795,00	147,23%	529.671.980,00

7.5.1.1 C.b Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LRA

2024 (Rp)	2023 (Rp)
6.555.538.308,00	-

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LRA yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun Anggaran 2024 senilai Rp6.555.538.308,00 sedangkan Tahun 2023 senilai Rp0,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LRA Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan senilai Rp6.555.538.308,00 atau 100,00% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Anggaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LRA yang ditargetkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp6.681.902.192,00. Jika dibandingkan antara anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LRA, maka capaian realisasinya senilai 98,11% atau kurang senilai Rp126.363.884,00 dari target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 15 Tahun 2023 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun anggaran 2024, Pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP Tahun sebelumnya di anggarkan pada pendapatan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Hibah - LRA Secara rinci adalah:

Tabel 7.5.1. 24 Rincian Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- LRA Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.681.902.192,00	6.555.538.308,00	98,11%	-
Jumlah Pendapatan Hibah - LRA	6.681.902.192,00	6.555.538.308,00	98,11%	-

7.5.1.2 Belanja

2024 (Rp)	2023 (Rp)
746.087.485.394,00	713.933.362.250,71

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode Tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja daerah berdasarkan jenis kelompoknya terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga.

Belanja yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun Anggaran 2024 senilai Rp746.087.485.394,00 sedangkan Tahun 2023 senilai Rp713.933.362.250,71. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan senilai Rp32.154.123.143,29 atau 4,50% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Anggaran Belanja yang ditargetkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp786.200.486.924,00. Jika dibandingkan antara anggaran dan realisasi Belanja, maka capaian realisasinya senilai 94,90% atau kurang senilai Rp40.113.001.530,00 dari target yang telah ditetapkan. Belanja secara rinci adalah:

Tabel 7.5.1. 25 Rincian Belanja Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Operasi	592.043.779.189,00	563.569.908.071,00	95,19%	515.820.956.699,71
Belanja Modal	193.048.754.555,00	182.034.249.323,00	94,29%	197.783.625.551,00
Belanja Tak Terduga	1.107.953.180,00	483.328.000,00	43,62%	328.780.000,00
Jumlah Belanja	786.200.486.924,00	746.087.485.394,00	94,90%	713.933.362.250,71

7.5.1.2 A Belanja Operasi

2024 (Rp)	2023 (Rp)
563.569.908.071,00	515.820.956.699,71

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan bagi hasil.

Belanja Operasi yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun Anggaran 2024 senilai Rp563.569.908.071,00 sedangkan Tahun 2023 senilai Rp515.820.956.699,71. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan senilai Rp47.748.951.371,29 atau 9,26% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Anggaran Belanja Operasi yang ditargetkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp592.043.779.189,00. Jika dibandingkan antara anggaran dan realisasi Belanja Operasi, maka capaian realisasinya senilai 95,19% atau kurang senilai Rp28.473.871.118,00 dari target yang telah ditetapkan. Belanja Operasi secara rinci adalah:

Tabel 7.5.1. 26 Rincian Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Pegawai	310.032.855.023,00	298.942.450.068,00	96,42%	283.442.561.180,00
Belanja Barang dan Jasa	243.757.090.379,00	227.464.421.857,00	93,32%	198.846.542.410,71
Belanja Hibah	37.863.833.787,00	36.825.036.146,00	97,26%	33.141.853.109,00
Belanja Bantuan Sosial	390.000.000,00	338.000.000,00	86,67%	390.000.000,00
Jumlah Belanja Operasi	592.043.779.189,00	563.569.908.071,00	95,19%	515.820.956.699,71

Belanja operasi pada Pemerintah Kabupaten Pasangkayu terdiri dari:

7.5.1.2 A.a Belanja Pegawai

2024	2023
(Rp)	(Rp)
298.942.450.068,00	283.442.561.180,00

Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang dibayarkan kepada pegawai Pemerintah Kabupaten Pasangkayu kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas yang telah dilaksanakan. Belanja Pegawai meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah, Belanja Tambahan Penghasilan PNS, Tunjangan Operasional KDH/WKDH dan Penerimaan Pimpinan dan anggota DPRD, dan Biaya Pemungutan Pajak Daerah.

Belanja Pegawai yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun Anggaran 2024 senilai Rp298.942.450.068,00 sedangkan Tahun 2023 senilai Rp283.442.561.180,00. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan senilai Rp15.499.888.888,00 atau 5,47% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Anggaran Belanja Pegawai yang ditargetkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp310.032.855.023,00. Jika dibandingkan antara anggaran dan realisasi Belanja Pegawai, maka capaian realisasinya senilai 96,42% atau kurang senilai Rp11.090.404.955,00 dari target yang telah ditetapkan. Belanja Pegawai secara rinci adalah:

Tabel 7.5.1. 27 Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan	243.399.970.931,00	236.229.998.536,00	97,05%	211.853.794.938,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	13.136.647.799,00	11.755.486.463,00	89,49%	12.759.698.957,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	12.522.446.050,00	10.700.279.190,00	85,45%	11.277.794.566,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	290.816.575,00	283.725.985,00	97,56%	264.771.039,00
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota	585.600.000,00	334.624.000,00	57,14%	459.360.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan	40.097.373.668,00	39.638.335.894,00	98,86%	32.092.721.476,00
Belanja Pegawai Bos	-	-	0,00%	8.734.967.000,00
Belanja Pegawai BLUD	-	-	0,00%	5.999.453.204,00
Jumlah Belanja Pegawai	310.032.855.023,00	298.942.450.068,00	96,42%	283.442.561.180,00

Belanja pegawai terealisasi senilai Rp298.942.450.068,00 diberikan berupa gaji dan tunjangan kepada 2.999 orang ASN terdiri dari 557 golongan IV, 2.046 golongan III, 396 golongan II, dan 0 golongan I. Selain gaji dan tunjangan semua ASN juga menerima tambahan penghasilan.

Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD diberikan kepada 30 orang anggota DPRD dari 11 partai, serta KDH dan WKDH.

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN termasuk Belanja insentif pemungutan pajak daerah dihitung sebesar 5% dari rencana penerimaan pajak dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Secara total belanja pegawai menyerap 34,70% dari total anggaran belanja dan transfer selama Tahun 2024.

7.5.1.2 A.b Belanja Barang dan Jasa

2024	2023
(Rp)	(Rp)
227.464.421.857,00	198.846.542.410,71

Belanja Barang dan Jasa dibayarkan untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai, untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga, pemberian hadiah uang atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi dan belanja perjalanan. Belanja Barang dan Jasa meliputi belanja bahan dan material, jasa pihak ketiga, cetak dan penggandaan, sewa-sewa, makanan dan minuman, pakaian dinas, perjalanan dinas, serta belanja barang dan jasa lain.

Belanja Barang dan Jasa yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun Anggaran 2024 senilai Rp227.464.421.857,00

sedangkan Tahun 2023 senilai Rp198.846.542.410,71. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan senilai Rp28.617.879.446,29 atau 14,39% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Anggaran Belanja Barang dan Jasa yang ditargetkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp243.757.090.379,00. Jika dibandingkan antara anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa, maka capaian realisasinya senilai 93,32% atau kurang senilai Rp16.292.668.522,00 dari target yang telah ditetapkan. Belanja Barang dan Jasa secara rinci adalah:

Tabel 7.5.1. 28 Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Barang	50.435.595.148,00	45.814.195.850,10	90,84%	36.129.004.727,00
Belanja Jasa	87.788.079.885,00	81.685.044.224,00	93,05%	77.231.791.542,71
Belanja Pemeliharaan	8.372.471.564,00	7.952.300.774,00	94,98%	6.786.165.659,00
Belanja Perjalanan Dinas	46.275.132.791,00	42.765.935.984,00	92,42%	45.001.344.649,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.821.323.700,00	2.709.414.564,90	96,03%	2.831.292.100,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	22.749.347.101,00	22.707.801.291,00	99,82%	13.963.773.950,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	25.315.140.190,00	23.829.729.169,00	94,13%	16.903.169.783,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	243.757.090.379,00	227.464.421.857,00	93,32%	198.846.542.410,71

7.5.1.2 A.c Belanja Hibah

2024	2023
(Rp)	(Rp)
36.825.036.146,00	33.141.853.109,00

Belanja Hibah merupakan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pasangkayu berupa transfer dalam bentuk uang bersifat tidak wajib yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja Hibah untuk Tahun Anggaran 2024 ditambah dengan belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan kelompok masyarakat yang sebelumnya dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan.

Belanja Hibah yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun Anggaran 2024 senilai Rp36.825.036.146,00 sedangkan Tahun 2023 senilai Rp33.141.853.109,00. Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan senilai Rp3.683.183.037,00 atau 11,11% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Anggaran Belanja Hibah yang ditargetkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp37.863.833.787,00. Jika dibandingkan antara anggaran dan realisasi Belanja Hibah, maka capaian realisasinya senilai 97,26% atau kurang senilai Rp1.038.797.641,00 dari target yang telah ditetapkan. Belanja Hibah secara rinci adalah:

Tabel 7.5.1. 29 Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Hibah kepada Pemerintah	1.390.820.000,00	1.390.547.000,00	99,98%	3.308.937.000,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi	30.211.966.883,00	29.639.065.541,00	98,10%	26.931.240.073,00
Belanja Hibah Dana BOSP	5.745.800.000,00	5.299.725.592,00	92,24%	2.386.429.132,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	515.246.904,00	495.698.013,00	96,21%	515.246.904,00
Jumlah Belanja Hibah	37.863.833.787,00	36.825.036.146,00	97,26%	33.141.853.109,00

Rincian belanja hibah pada lampiran 2.

Belanja Hibah pada Tahun 2024, diberikan:

- (i) Hibah kepada Pemerintah Pusat senilai Rp1.390.547.000,00 diberikan kepada: Pembangunan Gedung Kantor Polsek Tikke Raya senilai Rp1.340.623.000,00 dan Perencanaan pembangunan Polsek dan Rumah Dinas Polsek Sarjo senilai Rp49.924.000,00
- (ii) Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia senilai Rp29.639.065.541,00 diberikan kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan perundang-undangan atau telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota atau berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya, serta koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (iii) Belanja Hibah Dana BOS adalah Hibah kepada Sekolah Swasta senilai Rp5.299.725.592,00 diberikan kepada 106 Sekolah PAUD senilai Rp1.769.814.000,00, 7 Sekolah Kesetaraan senilai Rp756.500.000,00, 10 SD Swasta senilai Rp1.361.060.000,00 dan 9 SMP Swasta senilai Rp1.412.351.592,00.
- (iv) Hibah Bantuan Keuangan kepada partai politik senilai Rp495.698.013,00 diberikan kepada 11 partai politik yang dihitung berdasarkan jumlah suara, penetapan nilai per suara ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2018.Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Partai politik yang mendapatkan bantuan antara lain PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, Hanura, Gerindra, Demokrat, PAN, PKB, PKS dan PERINDO. Bantuan kepada parpol dicairkan secara bertahap atau sekaligus ke rekening partai.

7.5.1.2 A.d Belanja Bantuan Sosial

2024	2023
(Rp)	(Rp)
338.000.000,00	390.000.000,00

Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pasangkayu berupa uang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Penerima Bantuan Sosial untuk Tahun 2024 adalah bantuan Pendidikan dan Organisasi mahasiswa.

Belanja Bantuan Sosial yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun Anggaran 2024 senilai Rp338.000.000,00 sedangkan Tahun 2023 senilai Rp390.000.000,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan senilai Rp52.000.000,00 atau -13,33% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Anggaran Belanja Bantuan Sosial yang ditargetkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp390.000.000,00. Jika dibandingkan antara anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Sosial, maka capaian realisasinya senilai 86,67% atau kurang senilai Rp52.000.000,00 dari target yang telah ditetapkan. Belanja Bantuan Sosial secara rinci adalah:

Tabel 7.5.1.30 Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	240.000.000,00	238.000.000,00	99,17%	240.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan	150.000.000,00	100.000.000,00	66,67%	150.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	390.000.000,00	338.000.000,00	86,67%	390.000.000,00

Rincian Realisasi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada lampiran 3.

7.5.1.2 B Belanja Modal

2024	2023
(Rp)	(Rp)
182.034.249.323,00	197.783.625.551,00

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya. Aset Tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

Belanja Modal yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun Anggaran 2024 senilai Rp182.034.249.323,00 sedangkan Tahun 2023 senilai Rp197.783.625.551,00. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan senilai Rp15.749.376.228,00 atau -7,96% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Anggaran Belanja Modal yang ditargetkan dalam

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp193.048.754.555,00. Jika dibandingkan antara anggaran dan realisasi Belanja Modal, maka capaian realisasinya senilai 94,29% atau kurang senilai Rp11.014.505.232,00 dari target yang telah ditetapkan. Belanja Modal secara rinci adalah:

Tabel 7.5.1. 31 Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Modal Tanah	1.556.964.900,00	1.556.819.900,00	99,99%	999.732.700,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.011.453.237,00	33.154.767.773,00	94,70%	23.481.480.203,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.827.837.256,00	43.406.647.247,00	94,72%	64.160.323.251,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan	109.868.124.733,00	103.170.690.203,00	93,90%	109.042.548.297,00
Belanja Modal Aset Tetap	701.397.000,00	672.874.200,00	95,93%	97.765.100,00
Belanja Modal Aset Lainnya	82.977.429,00	72.450.000,00	87,31%	1.776.000,00
Jumlah Belanja Modal	193.048.754.555,00	182.034.249.323,00	94,29%	197.783.625.551,00

Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Pasangkayu terdiri dari sebagai berikut:

7.5.1.2 B.a Belanja Modal Tanah

2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.556.819.900,00	999.732.700,00

Belanja Modal Tanah yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun Anggaran 2024 senilai Rp1.556.819.900,00 sedangkan Tahun 2023 senilai Rp999.732.700,00. Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan senilai Rp557.087.200,00 atau 55,72% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Anggaran Belanja Modal Tanah yang ditargetkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp1.556.964.900,00. Jika dibandingkan antara anggaran dan realisasi Belanja Modal Tanah, maka capaian realisasinya senilai 99,99% atau kurang senilai Rp145.000,00 dari target yang telah ditetapkan. Belanja Modal Tanah secara rinci adalah:

Tabel 7.5.1. 32 Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	1.556.964.900,00	1.556.819.900,00	99,99%	999.732.700,00
Jumlah Belanja Modal Tanah	1.556.964.900,00	1.556.819.900,00	99,99%	999.732.700,00

Seluruh realisasi belanja modal tanah penyerapannya mencapai 99,99% hal ini menunjukkan tingkat penyerapan yang sangat tinggi.

Rincian dapat dilihat pada lampiran 4.

7.5.1.2 B.b Belanja Modal Peralatan dan Mesin

2024	2023
(Rp)	(Rp)
33.154.767.773,00	23.481.480.203,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun Anggaran 2024 senilai Rp33.154.767.773,00 sedangkan Tahun 2023 senilai Rp23.481.480.203,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan senilai Rp9.673.287.570,00 atau 41,20% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang ditargetkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp35.011.453.237,00. Jika dibandingkan antara anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin, maka capaian realisasinya senilai 94,70% atau kurang senilai Rp1.856.685.464,00 dari target yang telah ditetapkan. Belanja Modal Peralatan dan Mesin secara rinci adalah:

Tabel 7.5.1. 33 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Modal Alat Besar	3.452.200,00	2.903.500,00	84,11%	5.139.200,00
Belanja Modal Alat Angkutan	7.033.259.500,00	6.425.340.000,00	91,36%	1.603.340.000,00
Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	-	-	0,00%	1.490.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	36.630.000,00	36.630.000,00	100,00%	255.752.200,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.041.326.760,00	2.976.803.111,00	97,88%	3.750.385.472,00
Belanja Modal Komputer	1.530.665.015,00	1.449.009.650,00	94,67%	2.976.544.145,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	6.277.167.098,00	6.217.166.195,00	99,04%	268.918.200,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	13.230.167.525,00	13.088.482.393,00	98,93%	9.244.890.386,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	516.085.240,00	506.940.725,00	98,23%	97.680.000,00
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	14.496.000,00	14.430.000,00	99,54%	3.559.160.000,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	16.434.000,00	16.434.000,00	100,00%	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.811.769.899,00	1.800.480.199,00	99,38%	1.424.727.200,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.500.000.000,00	620.148.000,00	41,34%	293.453.400,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.011.453.237,00	33.154.767.773,00	94,70%	23.481.480.203,00

Rincian dapat dilihat pada lampiran 5

Seluruh realisasi belanja modal peralatan dan mesin penyerapannya mencapai 94,70% hal ini menunjukkan tingkat penyerapan yang sangat tinggi.

Walaupun realisasi belanja modal peralatan dan mesin senilai Rp23.481.480.203,00, namun setelah dilakukan rekonsiliasi dengan penambahan aset tetapnya, realisasi belanja modal peralatan dan mesin tersebut tidak seluruhnya menambah nilai aset tetap peralatan dan mesin di tahun 2024, terdapat penyesuaian-penyesuaian yang mengurangi penambahan aset tetap peralatan dan mesin dari belanja modal peralatan dan mesin, yaitu:

					(dalam rupiah)
1	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Membayar Utang				750.464.000,00
2	Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin untuk pembangunan Gedung dan Bangunan				11.147.500,00
3	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembangunan Jalan, Jaringan dan Irigasi				4.897.000,00
4	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang digunakan untuk pembelian peralatan dan mesin yang nilainya dibawah				21.307.834,00
5	Realisasi Belanja Modal yang Tidak Menambah Nilai Aset Tetap (Barang Pakai Habis/Belanja Barang Jasa dana Bos)				368.766.900,00
	Jumlah Belanja Modal PM yang tidak menambah AT Peralatan dan Mesin				1.156.583.234,00

7.5.1.2 B.c Belanja Modal Gedung dan Bangunan

2024 (Rp)	2023 (Rp)
43.406.647.247,00	64.160.323.251,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun Anggaran 2024 senilai Rp43.406.647.247,00 sedangkan Tahun 2023 senilai Rp64.160.323.251,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan senilai Rp20.753.676.004,00 atau -32,35% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang ditargetkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp45.827.837.256,00. Jika dibandingkan antara anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan, maka capaian realisasinya senilai 94,72% atau kurang senilai Rp2.421.190.009,00 dari target yang telah ditetapkan. Belanja Modal Gedung dan Bangunan secara rinci adalah:

Tabel 7.5.1. 34 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	40.304.610.637,00	38.239.164.601,00	94,88%	48.427.496.894,00
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	188.776.750,00	173.980.700,00	92,16%	2.992.121.484,00
Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	5.334.449.869,00	4.993.501.946,00	93,61%	12.740.704.873,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.827.837.256,00	43.406.647.247,00	94,72%	64.160.323.251,00

Rincian dapat dilihat pada lampiran 6

Seluruh realisasi belanja modal gedung dan bangunan penyerapannya mencapai 94,72% hal ini menunjukkan tingkat penyerapan yang sangat tinggi.

Walaupun realisasi belanja modal gedung dan bangunan senilai Rp43.406.647.247,00, namun setelah dilakukan rekonsiliasi dengan penambahan aset tetapnya, realisasi belanja modal gedung dan bangunan tersebut tidak seluruhnya menambah nilai aset tetap gedung dan bangunan di tahun 2024, terdapat penyesuaian-penyesuaian yang mengurangi penambahan aset tetap gedung dan bangunan dari belanja modal gedung dan bangunan, yaitu:

		(dalam rupiah)
1	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk membayar Utang Retensi	3.264.002.397,00
2	Gedung dan Bangunan di Reklas ke KDP	2.185.725.422,00
	Jumlah Belanja Modal GB yang tidak menambah AT Gedung dan Bangunan	5.449.727.819,00

Belanja modal gedung dan bangunan yang terealisasi di tahun 2024 keseluruhannya dipakai dan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Tidak ada gedung maupun bangunan baru yang dipinjam pakai oleh pihak lain.

7.5.1.2 B.d Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

2024 (Rp)	2023 (Rp)
103.170.690.203,00	109.042.548.297,00

Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun Anggaran 2024 senilai Rp103.170.690.203,00 sedangkan Tahun 2023 senilai Rp109.042.548.297,00. Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan senilai Rp5.871.858.094,00 atau -5,38% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Anggaran Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan yang ditargetkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp109.868.124.733,00. Jika dibandingkan antara anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan, maka capaian realisasinya senilai 93,90% atau kurang senilai -Rp6.697.434.530,00 dari target yang telah ditetapkan. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan secara rinci adalah:

Tabel 7.5.1. 35 Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2024
(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	84.442.805.570,00	80.367.829.717,00	95,17%	90.295.293.305,00
Belanja Modal Bangunan Air	7.496.983.869,00	6.665.822.958,00	88,91%	4.586.490.286,00
Belanja Modal Instalasi	17.853.660.194,00	16.085.128.428,00	90,09%	14.135.085.606,00
Belanja Modal Jaringan	74.675.100,00	51.909.100,00	69,51%	25.679.100,00
Jumlah Belanja Modal	109.868.124.733,00	103.170.690.203,00	93,90%	109.042.548.297,00

Rincian dapat dilihat pada lampiran 7.

Seluruh realisasi belanja modal jalan jaringan dan irigasi penyerapannya mencapai 93,90% hal ini menunjukkan tingkat penyerapan yang sangat tinggi.

Walaupun realisasi belanja modal Jalan jaringan dan irigasi senilai Rp103.170.690.203,00, namun setelah dilakukan rekonsiliasi dengan penambahan aset tetapnya, realisasi belanja modal Jalan jaringan dan irigasi tersebut tidak seluruhnya menambah nilai aset tetap Jalan jaringan dan irigasi di tahun 2024, terdapat penyesuaian-penyesuaian yang mengurangi penambahan aset tetap Jalan jaringan dan irigasi dari belanja modal Jalan jaringan dan irigasi, yaitu:

1 Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi untuk membayar Utang	1.598.029.621,00
2 Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi untuk pembangunan Gedung dan Bangunan	208.999.074,00
3 Jalan, Jaringan dan Irigasi direklas ke KDP	21.564.026.771,00
4 Belanja Modal JJI yang sifatnya Pemeliharaan	390.701.492,00
Jumlah Belanja Modal JJI yang tidak menambah AT Jalan jaringan dan irigasi	23.761.756.958,00

7.5.1.2 B.e Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

2024 (Rp)	2023 (Rp)
672.874.200,00	97.765.100,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun Anggaran 2024 senilai Rp672.874.200,00 sedangkan Tahun 2023 senilai Rp97.765.100,00. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan senilai Rp575.109.100,00 atau 588,26% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang ditargetkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp701.397.000,00. Jika dibandingkan antara anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, maka capaian realisasinya senilai 95,93% atau lebih senilai Rp28.522.800,00 dari target yang telah ditetapkan. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya secara rinci adalah:

Tabel 7.5.1. 36 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	563.494.000,00	551.773.200,00	97,92%	-
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	1.600.000,00	-	0,00%	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	136.303.000,00	121.101.000,00	88,85%	97.765.100,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	701.397.000,00	672.874.200,00	95,93%	97.765.100,00

Rincian dapat dilihat pada lampiran 8.

Seluruh realisasi belanja modal aset tetap lainnya penyerapannya mencapai 95,93% yang menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang sangat tinggi.

Walaupun realisasi belanja modal aset tetap lainnya senilai Rp672.874.200,00, namun setelah dilakukan rekonsiliasi dengan penambahan aset tetapnya, realisasi belanja modal aset tetap lainnya tersebut tidak seluruhnya menambah nilai aset tetap lainnya di tahun 2024, terdapat penyesuaian-penyesuaian yang mengurangi penambahan aset tetap lainnya dari belanja modal aset tetap lainnya, yaitu:

(dalam rupiah)

1	Realisasi Belanja Modal Aset tetap Lainnya yang digunakan untuk pembelian Peralatan dan Mesin	9.152.000,00
2	Realisasi Belanja Modal Aset tetap untuk pembelian aset yang nilainya di bawah kapitalisasi (aset diklasifikasikan dalam ekstra komptabel)	81.010.827,00
	Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang tidak menambah AT Lainnya	90.162.827,00

7.5.1.2 B.f Belanja Modal Aset Lainnya

2024 (Rp)	2023 (Rp)
72.450.000,00	1.776.000,00

Belanja Modal Aset Lainnya yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun Anggaran 2024 senilai Rp72.450.000,00 sedangkan Tahun 2023 senilai Rp1.776.000,00. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan senilai Rp70.674.000,00 atau 3979,39% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya yang ditargetkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp82.977.429,00. Jika dibandingkan antara anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Lainnya, maka capaian realisasinya senilai 87,31% atau lebih senilai Rp10.527.429,00 dari target yang telah ditetapkan. Belanja Modal Aset Lainnya secara rinci adalah:

Tabel 7.5.1. 37 Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	82.977.429,00	72.450.000,00	87,31%	1.776.000,00
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya	82.977.429,00	72.450.000,00	87,31%	1.776.000,00

Rincian dapat dilihat pada lampiran 9.

Seluruh realisasi belanja modal aset lainnya penyerapannya mencapai 87,31% yang menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang sangat tinggi.

Realisasi belanja modal aset lainnya senilai Rp72.450.000,00, namun setelah dilakukan rekonsiliasi dengan penambahan aset lainnya, realisasi belanja modal aset lainnya tersebut tidak menambah nilai aset lainnya di tahun 2024, terdapat penyesuaian-penyesuaian yang mengurangi penambahan aset lainnya dari belanja modal aset lainnya, antara lain:

1. Reklas beban Pemeliharaan senilai Rp22.500.000,00
2. Reklas beban sewa aset tidak berwujud senilai Rp49.950.000,00.

7.5.1.2 C Belanja Tidak Terduga

2024 (Rp)	2023 (Rp)
483.328.000,00	328.780.000,00

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

Belanja Tidak Terduga yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun Anggaran 2024 senilai Rp483.328.000,00 sedangkan Tahun 2023 senilai Rp328.780.000,00. Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan senilai Rp154.548.000,00 atau 47,01% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Anggaran Belanja Tidak Terduga yang ditargetkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp1.107.953.180,00. Jika dibandingkan antara anggaran dan realisasi Belanja Tidak Terduga, maka capaian realisasinya senilai 43,62% atau kurang senilai Rp624.625.180,00 dari target yang telah ditetapkan. Belanja Tidak Terduga secara rinci adalah:

Tabel 7.5.1. 38 Rincian Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Tidak Terduga	1.107.953.180,00	483.328.000,00	43,62%	328.780.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga	1.107.953.180,00	483.328.000,00	43,62%	328.780.000,00

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Belanja Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Desa Sarude, Kecamatan Sarjo dan Desa Bulubonggu Kecamatan Dapurang Kab. Pasangkayu Tahun 2024 senilai Rp483.328.000,00.

7.5.1.3 Belanja Transfer

2024 (Rp)	2023 (Rp)
106.396.589.423,00	102.897.030.524,00

Transfer merupakan dana yang diberikan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu kepada Pemerintah Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Belanja Transfer yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun Anggaran 2024 senilai Rp106.396.589.423,00 sedangkan Tahun 2023 senilai Rp102.897.030.524,00. Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan senilai Rp3.499.558.899,00 atau 3,40% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Anggaran Belanja Transfer yang ditargetkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp106.616.636.595,00. Jika dibandingkan antara anggaran dan realisasi Belanja Transfer, maka capaian realisasinya senilai 99,79% dari target yang telah ditetapkan. Belanja Transfer secara rinci adalah:

Tabel 7.5.1. 39 Rincian Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Bagi Hasil	1.724.590.695,00	1.724.590.695,00	100,00%	1.398.679.900,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.483.331.595,00	1.483.331.595,00	100,00%	
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah	241.259.100,00	241.259.100,00	100,00%	
Belanja Bantuan Keuangan	104.892.045.900,00	104.671.998.728,00	99,79%	101.498.350.624,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang	54.694.684.000,00	54.694.684.000,00	100,00%	-
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	50.197.361.900,00	49.977.314.728,00	99,56%	-
Jumlah Transfer	106.616.636.595,00	106.396.589.423,00	99,79%	102.897.030.524,00

Bagi hasil diberikan kepada 59 desa di seluruh wilayah Kabupaten Pasangkayu. jumlah dana bagi hasil yang diterima oleh setiap desa berdasarkan pada perhitungan yang telah ditetapkan dalam surat keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana bagi hasil yang diberikan kepada pemerintah desa dicairkan melalui 2 tahap, dan disetorkan langsung ke rekening desa.

Rincian Laporan Realisasi Bagi Hasil, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada lampiran 10.1 s.d. lampiran 10.4.

Bantuan keuangan merupakan Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa yang terdiri dari dana desa dan alokasi dana desa.

Dana desa ini merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alokasi dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBD yang diperuntukkan bagi desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibayarkan melalui RKUD ke RKD sesuai dengan perhitungan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024.

7.5.1.4 Surplus/Defisit

2024	2023
(Rp)	(Rp)
363.908.804,86	11.734.813.062,75

Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan, belanja dan transfer dalam satu periode pelaporan. Pada Tahun Anggaran 2024 terjadi surplus senilai Rp363.908.804,86. Sedangkan Tahun Anggaran 2023 mengalami surplus senilai Rp11.734.813.062,75. Perhitungan Surplus Tahun Anggaran 2024 dan Defisit 2023 adalah:

Tabel 7.5.1. 40 Surplus/Defisit Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
PENDAPATAN	842.795.145.456,00	852.847.983.621,86	101,19%	828.565.205.837,46
BELANJA	786.200.486.924,00	746.087.485.394,00	94,90%	713.933.362.250,71
TRANSFER	106.616.636.595,00	106.396.589.423,00	99,79%	102.897.030.524,00
SURPLUS/ (DEFISIT)	(50.021.978.063,00)	363.908.804,86	-0,73%	11.734.813.062,75

7.5.1.5 Pembiayaan

7.5.1.5 A. Penerimaan Pembiayaan

2024	2023
(Rp)	(Rp)
50.045.678.063,32	38.287.165.000,57

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari penggunaan SILPA tahun lalu.

Penerimaan Pembiayaan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun Anggaran 2024 senilai Rp50.045.678.063,32 sedangkan Tahun 2023 senilai Rp38.287.165.000,57. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan senilai Rp11.758.513.062,75 atau 30,71% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Anggaran Penerimaan Pembiayaan yang ditargetkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp50.021.978.063,00. Jika dibandingkan antara anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan, maka capaian realisasinya senilai 100,05% dari target yang telah ditetapkan. Penerimaan Pembiayaan secara rinci adalah:

Tabel 7.5.1. 41 Rincian Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu	50.021.978.063,00	50.021.978.063,32	100,00%	38.287.165.000,57
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	23.700.000,00	100,00%	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	50.021.978.063,00	50.045.678.063,32	100,05%	38.287.165.000,57

7.5.1.5 B. Pengeluaran Pembiayaan

2024 (Rp)	2023 (Rp)
-	-

Pengeluaran pembiayaan adalah seluruh transaksi pengeluaran keuangan pemerintah, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pinjaman kepada pihak ketiga, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2024 tidak ada realisasi.

Tabel 7.5.1. 42 Rincian Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada PFK	-	-	0,00%	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	0,00%	-

7.5.1.5 C. Koreksi Silpa

2024 (Rp)	2023 (Rp)
-	-

Koreksi Silpa adalah seluruh transaksi pengeluaran keuangan pemerintah, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Koreksi Silpa antara lain digunakan untuk pinjaman kepada pihak ketiga, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Koreksi Silpa Tahun Anggaran 2024 tidak ada realisasi.

Koreksi Silpa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun Anggaran 2024 senilai Rp0,00 sedangkan Tahun 2023 senilai Rp0,00. Realisasi Koreksi Silpa Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan senilai Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Anggaran Koreksi Silpa yang ditargetkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp0,00. Jika dibandingkan antara anggaran dan realisasi Koreksi Silpa, maka capaian realisasinya senilai 0,00% dari target yang telah ditetapkan. Koreksi Silpa secara rinci adalah:

Tabel 7.5.1. 43 Rincian Koreksi Silpa Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Koreksi Silpa	-	-		-
Jumlah Koreksi Silpa	-	-		-

7.5.1.5 D. Pembiayaan Netto

2024 (Rp)	2023 (Rp)
50.045.678.063,32	38.287.165.000,57

Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode Tahun Anggaran tertentu.

Pembiayaan Netto yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun Anggaran 2024 senilai Rp50.045.678.063,32 sedangkan Tahun 2023 senilai Rp38.287.165.000,57. Realisasi Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan senilai Rp11.758.513.062,75 atau 30,71% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Anggaran Pembiayaan Netto yang ditargetkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp50.021.978.063,00. Jika dibandingkan antara anggaran dan realisasi Pembiayaan Netto, maka capaian realisasinya senilai 100,05% atau lebih senilai Rp23.700.000,32 dari target yang telah ditetapkan. Pembiayaan Netto secara rinci adalah:

Tabel 7.5.1. 44 Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
Penerimaan Pembiayaan	50.021.978.063,00	50.045.678.063,32	100,05%	38.287.165.000,57
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-
Koreksi Silpa	-	-	-	-
Pembiayaan Netto	50.021.978.063,00	50.045.678.063,32	100,05%	38.287.165.000,57

7.5.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

2024 (Rp)	2023 (Rp)
50.409.586.868,18	50.021.978.063,32

Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun Anggaran 2024 senilai Rp50.409.586.868,18 sedangkan Tahun 2023 senilai Rp50.021.978.063,32. Realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan senilai Rp387.608.804,86 atau 0,77% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Anggaran yang ditargetkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp0,00. Jika dibandingkan antara anggaran dan realisasi, maka capaian realisasinya senilai 100,00%. Secara rinci adalah:

Rincian perolehan SILPA adalah sebagai berikut :						
	Total Pendapatan					852.847.983.621,86
	Total Belanja					746.087.485.394,00
	Transfer					106.396.589.423,00
	Surplus/Defisit					363.908.804,86
	Koreksi Silpa					-
	Pembiayaan Netto					50.045.678.063,32
	SILPA					50.409.586.868,18

Adapun posisi SILPA berdasarkan sumber dana dapat dilihat pada lampiran 11.

7.5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan Saldo Anggaran Lebih pemerintah yang mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

7.5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

2024	2023
(Rp)	(Rp)
50.021.978.063,32	38.287.165.000,57

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan saldo awal yang berasal dari akumulasi SILPA/SIKPA Tahun-tahun anggaran sebelumnya.

Saldo Anggaran Lebih Awal Pemerintah Kabupaten Pasangkayu sampai Tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp50.021.978.063,32 atau meningkat senilai Rp11.734.813.062,75 atau 30,65% dibandingkan saldo untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp38.287.165.000,57.

7.5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

2024	2023
(Rp)	(Rp)
50.021.978.063,32	38.287.165.000,57

Saldo anggaran lebih awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan senilai Rp50.021.978.063,32 sebagaimana disajikan juga dalam Laporan Realisasi Anggaran. Hal ini berarti Pemerintah Kabupaten Pasangkayu menggunakan keseluruhan atau 100% dari saldo anggaran lebih awal yang tersedia.

7.5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

2024	2023
(Rp)	(Rp)
50.409.586.868,18	50.021.978.063,32

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA, belanja dan transfer, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Pasangkayu selama satu periode pelaporan.

Saldo Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Pemerintah Kabupaten Pasangkayu sampai tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp50.409.586.868,18 atau meningkat senilai Rp387.608.804,86 atau 0,77% dibandingkan saldo untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp50.021.978.063,32.

7.5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

2024 (Rp)	2023 (Rp)
-	-

Tidak terdapat Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya yang mempengaruhi saldo Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) baik pada tahun anggaran 2024 maupun tahun anggaran 2023.

7.5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

2024 (Rp)	2023 (Rp)
50.409.586.868,18	50.021.978.063,32

Saldo Anggaran Lebih akhir merupakan saldo akhir yang berasal dari akumulasi SILPA/SIKPA Tahun-tahun anggaran sebelumnya.

Saldo anggaran lebih akhir Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp50.409.586.868,18 yang berasal dari Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Tahun Anggaran 2024 (seperti pada Laporan Realisasi Anggaran).

Jumlah tersebut selanjutnya menjadi saldo anggaran lebih awal untuk periode Tahun berikutnya.

Saldo Anggaran Lebih Akhir Pemerintah Kabupaten Pasangkayu sampai tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp50.409.586.868,18 atau meningkat senilai Rp387.608.804,86 atau 0,77% dibandingkan saldo untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp50.021.978.063,32.

7.5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca menunjukkan bahwa harta yang diperoleh pendanaannya bersumber dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

7.5.3.1 Aset

2024 (Rp)	2023 (Rp)
2.185.957.858.441,94	2.197.799.881.523,43

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Total Aset Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp2.185.957.858.441,94 menurun senilai Rp11.842.023.081,49 atau - 0,54% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp2.197.799.881.523,43.

Jumlah aset di atas terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.3. 1 Rincian Aset

(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Aset Lancar	71.855.692.434,02	70.888.395.828,40
2	Investasi Jangka Panjang	17.395.000.000,00	17.395.000.000,00
3	Aset Tetap	2.068.765.672.553,83	2.082.011.287.569,77
4	Aset Lainnya	27.941.493.454,09	27.505.198.125,26
	T O T A L	2.185.957.858.441,94	2.197.799.881.523,43

7.5.3.1 A. Aset Lancar

2024 (Rp)	2023 (Rp)
71.855.692.434,02	70.888.395.828,40

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Total Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp71.855.692.434,02 meningkat senilai Rp967.296.605,62 atau 1,36% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp70.888.395.828,40.

7.5.3.1 A. a. Kas di Kas Daerah

2024 (Rp)	2023 (Rp)
47.026.184.207,50	47.270.952.363,06

Kas di Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati Pasangkayu untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Kas di Kas Daerah dicatat senilai nilai nominal.

Total Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp47.026.184.207,50 menurun senilai Rp244.768.155,56 atau -0,52% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp47.270.952.363,06.

Tabel 7.5.3. 2 Rekening di Kas Daerah

(dalam rupiah)

No	Nomor dan Nama Rekening	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
I	BANK SULSELBAR 075-001-00000002-2 PEMDA MATRA	47.026.184.207,50	47.269.126.095,86
II	BANK MANDIRI KCP MMJ PALU PASANGKAYU 151-00-001804-3 PEMDA MATRA	-	1.826.267,20
	J U M L A H	47.026.184.207,50	47.270.952.363,06

I Rekening giro Nomor 075-001-00000002-2 pada PT Bank Sulselbar (BPD) Cabang Pasangkayu merupakan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), yang digunakan untuk menampung seluruh transaksi kas daerah yang meliputi pengeluaran dan penerimaan dari PAD serta transfer dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2024 senilai Rp47.026.184.207,50 atau menurun senilai Rp242.941.88,36 atau -0,51% dibandingkan posisi per 31 Desember 2023 senilai Rp47.269.126.095,86.

II Rekening giro Nomor 151-00-001804-3 pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Pasangkayu merupakan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), yang digunakan untuk menampung Penerimaan Jasa Giro. Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 atau mengalami penurunan atau 100,00 % dibandingkan posisi per 31 Desember 2023 senilai Rp1.826.267,20.

Rekening giro Nomor 151-00-001804-3 pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Pasangkayu sudah tidak aktif sejak 4 Juli 2024 dan sisa saldo dipindahkan ke Rekening Kas Daerah Bank Sulselbar.

7.5.3.1 A. b. Kas di Bendahara Pengeluaran

2024 (Rp)	2023 (Rp)
606.700,00	-

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD Pemerintah Kabupaten Pasangkayu yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2024 berupa sisa UP/GU/TU. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat senilai nilai nominal.

Rincian kas di bendahara pengeluaran adalah:

Sisa uang persediaan bendahara pengeluaran senilai Rp606.700,00 sampai dengan 31 Desember 2024 yang belum disetor ke rekening kas daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.3. 3 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran (Sisa UP)

(dalam rupiah)

SKPD	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
Kecamatan Dapurang	81.700,00	-
Kecamatan Pedongga	525.000,00	-
TOTAL	606.700,00	-

1. Kas di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Dapurang 81.700,00 merupakan sisa uang persediaan bendahara pengeluaran sampai dengan 31 Desember 2024 belum disetor ke rekening kas daerah dan telah disetor pada tanggal 20 Januari 2025
2. Kas di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Pedongga 525.000,00 merupakan sisa uang persediaan bendahara pengeluaran sampai dengan 31 Desember 2024 belum disetor ke rekening kas daerah dan telah disetor pada tanggal 7 Januari 2025

7.5.3.1 A. c. Kas di Bendahara Penerimaan

2024 (Rp)	2023 (Rp)
24.690.551,58	45.438.055,00

Kas di Bendahara Penerimaan adalah kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2024.

Total Kas di Bendahara Penerimaan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp24.690.551,58 menurun senilai Rp20.747.503,42 atau -45,66% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp45.438.055,00.

Tabel 7.5.3. 4 Kas di Bendahara Penerimaan*(dalam rupiah)*

No	Nama SKPD	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Dinas Kesehatan	17.813.371,58	31.054.845,00
2	Badan Pendapatan Daerah	6.877.180,00	14.383.210,00
	TOTAL	24.690.551,58	45.438.055,00

Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan senilai Rp17.813.371,58 merupakan sisa kas atas klaim Prolanis 2024 di 8 Puskesmas senilai Rp17.398.371,58 dan sisa uang pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Lariang yang sampai dengan 31 Desember 2024 belum disetor ke rekening kas daerah dan telah disetor pada tanggal 27 Februari 2025, sedangkan Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Badan Pendapatan Daerah senilai Rp6.877.180,00 merupakan sisa uang pendapatan Pajak Restoran yang sampai dengan 31 Desember 2024 belum disetor ke rekening kas daerah dan telah disetor pada tanggal 7 Januari 2025.

7.5.3.1 A. d. Kas di Bendahara Dana BLUD

2024 (Rp)	2023 (Rp)
689.377.573,10	160.887.995,97

Total Kas di Bendahara Dana BLUD Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp689.377.573,10 meningkat senilai Rp528.489.577,13 atau 328,48% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp160.887.995,97.

Tabel 7.5.3. 5 Kas di Bendahara BLUD*(dalam rupiah)*

No	Nama SKPD	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Dana Kemitraan RSUD Kab. Pasangkayu BPD Sulselbar 075-002-0000006036	-	24.599.680,00
2	RSUD Kabupaten BLUD RSUD Kabupaten Bank Mandiri 1510015527382	10.418,10	122.474.395,97
3	BLUD RSUD Pasangkayu BPD Sulselbar 075-002-0000007353	332.346,00	327.427,00
4	BLUD RSUD Kab. Pasangkayu BNI 4088844444	686.139.949,00	-
5	BLUD RSUD Kab. Pasangkayu BNI 4088844443	182.524,00	-
6	Kas di bendahara pengeluaran BLUD	158.554,00	267.811,00
7	Kas di bendahara penerimaan BLUD	2.553.782,00	13.218.682,00
	TOTAL	689.377.573,10	160.887.995,97

Kas di bendahara BLUD termasuk kas di bendahara pengeluaran BLUD senilai Rp158.554,00 merupakan sisa kas yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 belum disetor. Jumlah tersebut telah disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD pada tanggal 17 Januari 2025.

7.5.3.1 A. e. Kas di Bendahara Dana JKN

2024 (Rp)	2023 (Rp)
280.168.446,00	136.691.071,00

Kas di Bendahara Dana JKN merupakan saldo Kas di Bendahara FKTP/Puskesmas dari JKN yang digunakan untuk menampung seluruh transaksi yang meliputi pengeluaran dan penerimaan dari Dana Kapitasi (JKN). Berdasarkan peraturan perundang-undangan, saldo kas tersebut tidak perlu disetor ke Kas Daerah karena dapat langsung digunakan untuk belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di periode berikutnya.

Total Kas di Bendahara Dana JKN Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp280.168.446,00 meningkat senilai Rp143.477.375,00 atau 104,96% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp136.691.071,00.

Tabel 7.5.3. 6 Kas di Bendahara FKTP/Puskesmas

(dalam rupiah)

No	Nama Bank dan Nama FKTP/Puskesmas	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	BANK BPD PUSKESMAS PASANGKAYU 1	1.422.677,00	89.497.305,00
2	BANK BPD PUSKESMAS PASANGKAYU 2	3.369,00	1.785.028,00
3	BANK BPD PUSKESMAS SARJO	42.059.843,00	376.628,00
4	BANK BPD PUSKESMAS BAMBAIRA	400,00	14.026,00
5	BANK BPD PUSKESMAS BAMBALAMOTU	16.370,00	168,00
6	BANK BPD PUSKESMAS PEDONGGA	28.645.668,00	20.026.387,00
7	BANK BPD PUSKESMAS TIKKE	959,00	8.499,00
8	BANK BPD PUSKESMAS LARIANG	14.530.226,00	17.179,00
9	BANK BPD PUSKESMAS LILIMORI	9.942,00	12.068,00
10	BANK BPD PUSKESMAS BARAS 1	711.702,00	12,00
11	BANK BPD PUSKESMAS BARAS 2	46.377.490,00	24.782.546,00
12	BANK BPD PUSKESMAS SARUDU 1	18.199.007,00	159.083,00
13	BANK BPD PUSKESMAS SARUDU 2	12.625.730,00	74,00
14	BANK BPD PUSKESMAS DAPURANG	75.748.223,00	836,00
15	BANK BPD PUSKESMAS DURIPOKU	39.816.840,00	11.232,00
	J U M L A H	280.168.446,00	136.691.071,00

7.5.3.1 A. f. Kas di Bendahara BOK

2024	2023
(Rp)	(Rp)
2.310.624.308,00	2.382.021.867,00

Kas di Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan mencatat saldo Kas di Bendahara FKTP/Puskesmas dari DAK Non Fisik BOKKB - BOK yang digunakan untuk menampung seluruh transaksi yang meliputi pengeluaran dan penerimaan Bantuan Operasional Kesehatan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, saldo kas tersebut tidak perlu disetor ke Kas Daerah karena dapat langsung digunakan untuk belanja yang bersumber dari DAK Non Fisik BOKKB - BOK di periode berikutnya.

Total Kas di Bendahara BOK Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp2.310.624.308,00 menurun senilai Rp71.397.559,00 atau -3,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp2.382.021.867,00.

Tabel 7.5.3. 7 Kas di Bendahara BOK

(dalam rupiah)

No	Nama Bank dan Nama FKTP/Puskesmas		per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	BANK BNI 1590054329	PUSKESMAS SARJO	16.062.994,00	102.691.040,00
2	BANK BNI 1590054227	PUSKESMAS BAMBAIRA	23.987.866,00	84.246.226,00
3	BANK BNI 1590054341	PUSKESMAS BAMBALAMOTU	271.661.537,00	585.660.358,00
4	BANK BNI 1590054330	PUSKESMAS PASANGKAYU 1	61.571.382,00	207.891.187,00
5	BANK BNI 1590054318	PUSKESMAS PASANGKAYU 2	298.276.609,00	281.304.222,00
6	BANK BNI 1590054272	PUSKESMAS PEDONGGA	177.795.873,00	225.397.889,00
7	BANK BNI 1590054283	PUSKESMAS TIKKE	153.394.550,00	23.405.334,00
8	BANK BNI 1590054261	PUSKESMAS LARIANG	163.876.504,00	162.446.290,00
9	BANK BNI 1590054249	PUSKESMAS SARUDU 1	188.526.354,00	189.418.748,00
10	BANK BNI 1590054192	PUSKESMAS SARUDU 2	162.491.815,00	104.884.204,00
11	BANK BNI 1590054250	PUSKESMAS BARAS 1	270.940.788,00	1.562,00
12	BANK BNI 1590054216	PUSKESMAS BARAS 2	163.557.304,00	109.611.063,00
13	BANK BNI 1590054307	PUSKESMAS LILIMORI	113.437.116,00	68.269.333,00
14	BANK BNI 1590054205	PUSKESMAS DURIPOKU	31.914.391,00	67.023.727,00
15	BANK BNI 1590054294	PUSKESMAS DAPURANG	213.129.225,00	169.770.684,00
	J U M L A H		2.310.624.308,00	2.382.021.867,00

7.5.3.1 A. g. Kas di Bendahara Dana BOS

TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
77.393.087,00	22.764.461,00

Kas di Bendahara Dana BOS merupakan saldo Kas di Bendahara Sekolah Negeri yang digunakan untuk menampung seluruh transaksi yang meliputi pengeluaran dan penerimaan dari Dana Bantuan Operasional Sekolah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, saldo kas tersebut tidak perlu disetor ke Kas Daerah karena dapat langsung digunakan untuk belanja yang bersumber dari Dana BOS di periode berikutnya. Saldo Kas di Bendahara Dana BOS dicatat senilai nilai nominal.

Total Kas di Bendahara Dana BOS Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp77.393.087,00 meningkat senilai Rp54.628.626,00 atau 239,97% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp22.764.461,00.

Mutasi kas di bendahara dana BOS pada tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Saldo Awal Kas di Bendahara Dana BOS per 1 Januari 2024 **22.764.461,00**

Penambahan:

Pendapatan Dana BOSP Tahun 2024	29.961.048.392,00	
Pendapatan Jasa Giro Rekening BOS Tahun 2024	717.878,00	
Penerimaan Potongan PFK Tahun 2024	299.338.745,06	
Pengembalian Belanja ke Rekening Sekolah	22.688.316,00	
Total Penambahan		30.283.793.331,06

Pengurangan:

Pengeluaran Dana BOSP Tahun 2024	29.929.108.082,00	
Penyetoran Potongan PFK Tahun 2024	299.301.017,06	
Penyetoran Jasa Giro Tahun 2024	175.883,00	
Reklas Pendapatan Jasa Giro Rekening BOS Tahun 2024 yang belum disetor	541.995,00	
Reklas Potongan PFK 2024 yang belum disetor ke kas lainnya di bendahara pengeluaran	37.728,00	
Total Pengurangan		(30.228.584.982,06)

Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2024 **77.393.087,00**

Rincian saldo Kas di Bendahara Dana BOS per sekolah per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada lampiran 12.1 dan lampiran 12.2.

7.5.3.1 A. h. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

2024 (Rp)	2023 (Rp)
579.723,00	6.758.105,29

Kas Lainnya merupakan saldo kas dari penerimaan tertentu lainnya yang diterima karena penyelenggaraan Pemerintahan antara lain: penerimaan Kas Lainnya di Bendahara dana JKN, Kas Lainnya di Bendahara BOK, Kas Lainnya di Bendahara Dana BOS, dan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran.

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas selain sisa UP/GU/TU serta pajak-pajak pemerintah yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran SKPD pada tahun 2024 yang belum disetor ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2024. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat senilai nilai nominal.

Total Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp579.723,00 menurun senilai Rp6.178.382,29 atau -91,42% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp6.758.105,29.

Rincian kas lainnya di bendahara pengeluaran adalah:

	2024	2023
1. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Dana BOS merupakan potongan pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2024	37.728,00	
2. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Dana BOS merupakan Pendapatan Jasa Giro yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024	541.995,00	
3. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Bapenda merupakan pengembalian belanja insentif pemungutan pajak yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum disetorkan ke Kas Daerah.		3.222.250,29
4. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Dukcapil merupakan pemungutan pajak yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum disetorkan ke Kas Negara dan telah disetor pada tanggal 26 Maret 2024		265.690,00
5. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Pedongga merupakan pemungutan pajak yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum disetorkan ke Kas Negara dan telah disetor pada tanggal 26 Maret 2024		107.615,00

6. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Dapurang merupakan pemungutan pajak yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum disetorkan ke Kas Negara dan telah disetor pada tanggal 10 Januari 2024	48.000,00
7. Kas Lainnya di bendahara BOS	3.114.550,00
Jumlah kas lainnya di bendahara pengeluaran	579.723,00 6.758.105,29

Jumlah total saldo Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara JKN, Kas di Bendahara BLUD dan Kas di Bendahara Dana BOS dan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 senilai Rp50.025.513.918,32 sebagian menunjukkan hak Pemerintah Kabupaten Pasangkayu yang berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan sebagian merupakan uang titipan sebagai Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang belum disetor pada 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	50.409.586.868,18	50.021.978.063,32
2) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	37.728,00	3.535.855,00
3) Utang Lain-lain Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
JUMLAH	50.409.624.596,18	50.025.513.918,32

7.5.3.1 A. i. Piutang Pajak

TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
13.306.318.107,30	11.900.443.964,30

Piutang pajak merupakan pajak daerah yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-DAERAH), tetapi belum dibayar oleh wajib pajak daerah. Piutang pajak dicatat senilai nilai nominal.

Total Piutang Pajak Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp13.306.318.107,30 meningkat senilai Rp1.405.874.143,00 atau 11,81% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp11.900.443.964,30.

Tabel 7.5.3. 8 Piutang Pajak

(dalam rupiah)			
No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Piutang Pajak Hotel	58.685.650,00	29.953.900,00
2	Piutang Pajak Reklame	25.348.794,00	25.826.821,00
3	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian C)	4.860.608.834,30	3.849.940.458,30
4	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	8.313.180.694,00	7.912.904.134,00
5	Piutang Pajak BPHTB	33.537.800,00	33.537.800,00

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
6	Piutang Pajak Penerangan Jalan	8.837.529,00	-
7	Piutang Pajak Jasa Boga	2.170.330,00	47.697.351,00
8	Piutang Pajak Rumah Makan	3.948.476,00	583.500,00
	Jumlah	13.306.318.107,30	11.900.443.964,30

Rincian Piutang Pajak disajikan pada Lampiran 13.

7.5.3.1 A. i.1. Penyisihan Piutang Pajak

2024 (Rp)	2023 (Rp)
(10.012.659.375,34)	(9.521.548.980,69)

Pemerintah Kabupaten Pasangkayu telah menetapkan Kebijakan Akuntansi mengenai penyisihan Piutang Pajak. Penyisihan piutang pajak yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pasangkayu merupakan piutang yang diestimasikan tidak tertagih dalam upaya untuk menyajikan nilai piutang pajak yang dapat direalisasikan.

Pemerintah Kabupaten Pasangkayu telah menetapkan Kebijakan Akuntansi mengenai penyisihan Piutang Pajak. Penyisihan piutang pajak yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pasangkayu merupakan piutang yang diestimasikan tidak tertagih dalam upaya untuk menyajikan nilai piutang pajak yang dapat direalisasikan.

Tabel 7.5.3. 9 Penyisihan Piutang Pajak

(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(17.890.633,75)	(10.458.022,50)
2	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	(7.829.244,29)	(5.582.870,95)
3	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian C)	(3.037.773.375,56)	(2.854.857.588,33)
4	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	(6.915.315.539,98)	(6.617.142.044,65)
5	Penyisihan Piutang Pajak BPHTB	(33.537.800,00)	(33.267.050,00)
6	Penyisihan Piutang Pajak Jasa Hotel	(44.187,65)	-
7	Penyisihan Piutang Pajak Jasa Boga	(193.419,23)	(238.486,76)
8	Penyisihan Piutang Pajak Rumah Makan	(75.174,88)	(2.917,50)
	Jumlah	(10.012.659.375,34)	(9.521.548.980,69)

Rincian penyisihan piutang pajak disajikan dalam Lampiran 14.

7.5.3.1 A. i.2. Piutang Pajak Netto

2024 (Rp)	2023 (Rp)
3.293.658.731,96	2.378.894.983,61

Piutang Pajak Netto adalah nilai bersih piutang pajak yang dapat direalisasikan, yaitu senilai nilai piutang pajak dikurangi dengan nilai penyisihan piutang pajak.

Total Piutang Pajak Netto Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp3.293.658.731,96 meningkat senilai Rp914.763.748,35 atau 38,45% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp2.378.894.983,61.

7.5.3.1 A. j. Piutang Retribusi

2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.286.617.101,00	812.310.284,00

Piutang Retribusi merupakan retribusi daerah yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerahnya (SKRD) tetapi belum dibayar oleh wajib retribusi. Piutang Retribusi dicatat senilai nilai nominal.

Total Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp1.286.617.101,00 meningkat senilai Rp474.306.817,00 atau 58,39% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp812.310.284,00.

Tabel 7.5.3. 10 Piutang Retribusi

(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Retribusi Pelayanan Persampahan	38.856.000,00	800.000,00
2	Retribusi Perkantoran (Leges)	6.300.000,00	6.300.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar	62.736.000,00	65.736.000,00
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	400.302.000,00	403.992.000,00
5	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	291.430.534,00	291.430.534,00
6	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	26.652.750,00	26.652.750,00
7	Piutang Retribusi Lainnya (sebelum tahun 2010 yang tidak diketahui rinciannya)	4.700.000,00	4.700.000,00
8	Piutang Retribusi Izin Usaha Perikanan	1.050.000,00	1.050.000,00
9	Retribusi SITU	1.300.000,00	1.300.000,00
10	Retribusi SIUP TDP & SIUI	400.000,00	400.000,00
11	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	9.254.817,00	9.949.000,00
12	Retribusi Pelayanan Kesehatan (Klaim Non Kapitasi)	443.635.000,00	0,00
	Jumlah	1.286.617.101,00	812.310.284,00

Rincian Piutang Retribusi disajikan pada Lampiran 15.

7.5.3.1 A. j.1. Penyisihan Piutang Retribusi

2024 (Rp)	2023 (Rp)
(478.628.026,09)	(313.071.802,40)

Pemerintah Kabupaten Pasangkayu telah menetapkan Kebijakan Akuntansi mengenai penyisihan Piutang Retribusi. Penyisihan piutang retribusi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pasangkayu merupakan piutang yang diestimasikan tidak tertagih dalam upaya untuk menyajikan nilai piutang retribusi yang dapat direalisasikan.

Total Penyisihan Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai -Rp478.628.026,09 meningkat senilai -Rp165.556.223,69 atau 52,88% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai -Rp313.071.802,40.

Daftar penyisihan piutang retribusi per 31 Desember 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.3. 11 Penyisihan Piutang Retribusi*(dalam rupiah)*

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Penyisihan Retribusi Pelayanan Persampahan	(194.280,00)	(4.000,00)
2	Penyisihan Retribusi Perkantoran (Leges)	(6.300.000,00)	(6.300.000,00)
3	Penyisihan Retribusi Pelayanan Pasar	(42.708.000,00)	(27.543.000,00)
4	Penyisihan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	(355.302.000,00)	(241.569.450,00)
5	Penyisihan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	(37.756.547,00)	(3.502.857,40)
6	Penyisihan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	(26.652.750,00)	(26.652.750,00)
7	Penyisihan Piutang Retribusi Lainnya	(4.700.000,00)	(4.700.000,00)
8	Penyisihan Retribusi Ijin Gangguan (HO)	(1.050.000,00)	(1.050.000,00)
9	Penyisihan Retribusi SITU	(1.300.000,00)	(1.300.000,00)
10	Penyisihan Retribusi SIUP TDP & SIUI	(400.000,00)	(400.000,00)
11	Penyisihan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	(46.274,09)	(49.745,00)
12	Penyisihan Retribusi Pelayanan Kesehatan (Klaim Non Kapitasi)	(2.218.175,00)	-
	Jumlah	(478.628.026,09)	(313.071.802,40)

Rincian penyisihan piutang retribusi disajikan pada Lampiran 16.

7.5.3.1 A. j.2. Piutang Retribusi Netto

2024 (Rp)	2023 (Rp)
807.989.074,91	499.238.481,60

Piutang Retribusi Netto adalah nilai bersih piutang retribusi yang dapat direalisasikan, yaitu senilai nilai piutang retribusi dikurangi dengan nilai penyisihan piutang retribusi.

Total Piutang Retribusi Netto Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp807.989.074,91 meningkat senilai Rp308.750.593,31 atau 61,84% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp499.238.481,60.

7.5.3.1 A. k. Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

2024 (Rp)	2023 (Rp)
6.652.314.326,24	4.398.395.816,24

Total Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp6.652.314.326,24 meningkat senilai Rp2.253.918.510,00 atau 51,24% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp4.398.395.816,24.

Tabel 7.5.3. 12 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah*(dalam rupiah)*

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Piutang Pendapatan Blud Dari Jasa Layanan	3.911.228.104,00	1.867.504.500,00
2	Piutang Hasil Dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	80.450.451,00	64.549.888,00
3	Piutang Klaim Ambulance dan Obat Kroni (RSUD)	21.240.000,00	86.844.457,00

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
4	Piutang Pihak Ketiga (Denda Keterlambatan)	1.404.116.971,24	1.404.116.971,24
5	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-luran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	259.898.800,00	-
6	Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang dan Jasa	975.380.000,00	975.380.000,00
	Jumlah	6.652.314.326,24	4.398.395.816,24

Rincian piutang lain-lain PAD yang sah disajikan pada Lampiran 17.

7.5.3.1 A. k.1. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

2024	2023
(Rp)	(Rp)
(262.127.461,32)	(21.991.979,09)

Total Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai -Rp262.127.461,32 meningkat senilai -Rp240.135.482,23 atau 1091,92% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai -Rp21.991.979,09.

Tabel 7.5.3. 13 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

(dalam rupiah)

No	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Penyisihan Piutang Pendapatan Blud Dari Jasa Layanan	(19.556.140,52)	(9.337.522,50)
2	Penyisihan Piutang Hasil Dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	(3.215.929,67)	(322.749,44)
3	Penyisihan Piutang Klaim Ambulance dan Obat Kroni (RSUD)	(106.200,00)	(434.222,29)
4	Penyisihan Piutang Pihak Ketiga (Denda Keterlambatan)	(140.411.697,13)	(7.020.584,86)
5	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-luran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	(1.299.494,00)	-
6	Penyisihan Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang dan Jasa	(97.538.000,00)	(4.876.900,00)
	Jumlah	(262.127.461,32)	(21.991.979,09)

Rincian penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah disajikan pada Lampiran 17.7

7.5.3.1 A. k.2. Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Netto

2024	2023
(Rp)	(Rp)
6.390.186.864,92	4.376.403.837,15

Total Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Netto Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp6.390.186.864,92 meningkat senilai Rp2.013.783.027,77 atau 46,01% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp4.376.403.837,15.

7.5.3.1 A. l. Beban Dibayar Di Muka

2024 (Rp)	2023 (Rp)
318.083.857,33	653.806.803,80

Beban Dibayar Di Muka adalah pengeluaran biaya tahun 2024 atau tahun sebelumnya yang belum menjadi beban pada periode TA 2024 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu. Beban Dibayar Di Muka dicatat senilai nilai perolehan.

Total Beban Dibayar Di Muka Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp318.083.857,33 menurun senilai Rp335.722.946,47 atau -51,35% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp653.806.803,80.

Daftar saldo beban dibayar di muka sebagai berikut:

Tabel 7.5.3. 14 Beban Dibayar Di Muka

(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Beban Sewa Asrama Mahasiswa dibayar di muka	236.986.862,79	239.209.809,26
2	Beban Sewa Kantor Perwakilan di Jakarta	81.096.994,54	414.596.994,54
	Jumlah	318.083.857,33	653.806.803,80

Rincian beban sewa dibayar di muka per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran 18.

7.5.3.1 A. m. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

2024 (Rp)	2023 (Rp)
272.709.333,34	303.741.333,34

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran adalah piutang tagihan penjualan angsuran perumahan dan angsuran kendaraan yang telah jatuh tempo dan akan jatuh tempo pada tahun 2024.

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat senilai nilai nominal. Total Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp272.709.333,34 menurun senilai Rp31.032.000,00 atau -10,22% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp303.741.333,34.

Daftar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran sebagai berikut:

Tabel 7.5.3. 15 Bagian Lancar Penjualan Angsuran

(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Perumahan	220.876.000,00	251.908.000,00
2	Tagihan Penjualan Angsuran Kendaraan	51.833.333,34	51.833.333,34
	JUMLAH	272.709.333,34	303.741.333,34

Rincian mutasi bagian lancar tagihan penjualan angsuran disajikan pada Lampiran 19.

Mutasi bagian lancar tagihan penjualan angsuran perumahan Pemda tahun 2024 sebagai berikut:

Saldo Awal **251.908.000,00**

Penambahan: Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Perumahan dari Tagihan Penjualan Angsuran Jangka Panjang (Aset Lainnya) Tahun 2024	-
Pengurangan:	
Pembayaran angsuran perumahan tahun 2024	-31.032.000,00
Saldo Akhir bagian lancar tagihan penjualan angsuran perumahan Pemda	220.876.000,00

Mutasi tagihan penjualan angsuran kendaraan tahun 2024 sebagai berikut:

Saldo Awal	51.833.333,34
Pengurangan:	
Pembayaran angsuran kendaraan dinas (dum)	-
Saldo Akhir Tagihan Penjualan Angsuran Kendaraan	51.833.333,34

7.5.3.1 A. m.1. Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

2024 (Rp)	2023 (Rp)
(236.388.833,34)	(256.139.808,34)

Pemerintah Kabupaten Pasangkayu telah menetapkan Kebijakan Akuntansi mengenai penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran. Penyisihan bagian lancar tagihan penjualan angsuran yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pasangkayu merupakan bagian lancar tagihan penjualan angsuran yang diestimasikan tidak tertagih dalam upaya untuk menyajikan nilai yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

Total Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai -Rp236.388.833,34 menurun senilai Rp19.750.975,00 atau -7,71% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai -Rp256.139.808,34.

Daftar penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran disajikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.3. 16 Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Perumahan	(184.555.500,00)	(204.306.475,00)
2	Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran Kendaraan Dum	(51.833.333,34)	(51.833.333,34)
	Jumlah	(236.388.833,34)	(256.139.808,34)

Rincian perhitungan penyisihan bagian lancar tagihan penjualan angsuran disajikan pada Lampiran 20

Pada Tahun 2024, terdapat pelunasan tagihan penjualan angsuran perumahan, hal ini berarti penyisihan bagian lancar tagihan penjualan angsuran perumahan yang telah dicatat sebagai beban di tahun sebelumnya, diakui kembali sebagai penambahan pendapatan lain-lain PAD yang sah pada Laporan Operasional. Mutasi penyisihan tagihan penjualan angsuran perumahan disajikan sebagai berikut:

Saldo Awal		(204.306.475,00)
Ditambah:		
	Penyisihan Bagian Lancar Penjualan Angsuran Perumahan yang belum dibayar (disajikan sebagai beban penyisihan piutang)	-
Dikurangi:		
	Penyisihan Bagian Lancar Penjualan Angsuran Perumahan yang telah dibayar (disajikan sebagai lain-lain PAD yang sah-LO)	19.750.975,00
Saldo Akhir Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Perumahan		(184.555.500,00)
Saldo Awal Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Kendaraan		(51.833.333,34)
Ditambah:		
	Penyisihan Bagian Lancar Penjualan Angsuran Kendaraan yang belum dibayar (disajikan sebagai beban penyisihan piutang)	-
Saldo Akhir Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Kendaraan		(51.833.333,34)

7.5.3.1 A. m.2. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto

2024 (Rp)	2023 (Rp)
36.320.500,00	47.601.525,00

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto adalah nilai bersih Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran yang dapat direalisasikan, yaitu senilai Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dikurangi dengan nilai penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran.

Total Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp36.320.500,00 menurun senilai Rp11.281.025,00 atau -23,70% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp47.601.525,00.

7.5.3.1 A. n. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

2024 (Rp)	2023 (Rp)
184.447.623,00	198.821.123,00

Bagian lancar tuntutan ganti rugi merupakan tuntutan ganti kerugian daerah yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atas sisa kerugian daerah yang telah ditetapkan SKTJM-nya yang belum disetor ke kas daerah sampai dengan 31 Desember 2024.

Total Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp184.447.623,00 menurun senilai Rp14.373.500,00 atau -7,23% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp198.821.123,00.

Daftar bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah berdasarkan tahun diterbitkannya SKTJM disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.5.3. 17 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

(dalam rupiah)

No	SKTJM	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	SKTJM Tahun 2012	9.125.000,00	9.125.000,00
2	SKTJM Tahun 2013	64.181.623,00	65.205.123,00
3	SKTJM Tahun 2014	48.521.000,00	48.521.000,00
4	SKTJM Tahun 2017	6.785.000,00	7.635.000,00
5	SKTJM Tahun 2018	12.305.000,00	12.305.000,00
6	SKTJM Tahun 2023	43.530.000,00	56.030.000,00
	Jumlah	184.447.623,00	198.821.123,00

Rincian TPTGR disajikan pada Lampiran 21.1

Saldo Awal Piutang TP/TGR pada tahun 2024 disajikan pada akun Aset Lancar **198.821.123,00**

Penambahan:

SKTJM TP/TGR Tahun 2023 0,00

Pengurangan:

Pembayaran TP/TGR Tahun 2013-2023 -14.373.500,00

Koreksi ekuitas saldo awal TP/TGR 0,00

Saldo Akhir Piutang TP/TGR **184.447.623,00**

7.5.3.1 A. n.1. Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

2024 (Rp)	2023 (Rp)
(145.270.623,00)	(143.071.273,00)

Penyisihan bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah merupakan piutang yang diestimasikan tidak tertagih dalam upaya untuk menyajikan nilai bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah yang dapat direalisasikan.

Total Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai -Rp145.270.623,00 meningkat senilai -Rp2.199.350,00 atau 1,54% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai -Rp143.071.273,00.

Daftar penyisihan bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah disajikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.3. 18 Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
(dalam rupiah)

No	SKTJM	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	SKTJM Tahun 2012	(9.125.000,00)	(9.125.000,00)
2	SKTJM Tahun 2013	(64.181.623,00)	(65.205.123,00)
3	SKTJM Tahun 2014	(48.521.000,00)	(48.521.000,00)
4	SKTJM Tahun 2017	(6.785.000,00)	(7.635.000,00)
5	SKTJM Tahun 2018	(12.305.000,00)	(12.305.000,00)
6	SKTJM Tahun 2023	(4.353.000,00)	(280.150,00)
	Jumlah	(145.270.623,00)	(143.071.273,00)

Rincian Penyisihan TPTGR disajikan pada Lampiran 21.2

7.5.3.1 A. n.2. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Netto

2024 (Rp)	2023 (Rp)
39.177.000,00	55.749.850,00

Bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah netto adalah nilai bersih piutang lain-lain yang dapat direalisasikan, yaitu senilai nilai bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah dikurangi dengan nilai penyisihan bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah.

Total Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Netto Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp39.177.000,00 menurun senilai Rp16.572.850,00 atau -29,73% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp55.749.850,00.

7.5.3.1 A. o. Piutang Lain-lain

2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.162.264.845,05	206.671.904,00

Total Piutang Lain-lain Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp1.162.264.845,05 meningkat senilai Rp955.592.941,05 atau 462,37% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp206.671.904,00.

Piutang lain-lain terdiri dari piutang pihak ketiga dan piutang denda angsuran perumahan yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 7.5.3. 19 Piutang Lain-Lain
(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Piutang Pihak Ketiga (putus kontrak)	173.885.404,00	173.885.404,00
2	Piutang Denda Angsuran Perumahan	6.564.000,00	6.564.000,00
3	Piutang Pihak Ketiga (kelebihan pembayaran)	981.815.441,05	26.222.500,00
	Jumlah	1.162.264.845,05	206.671.904,00

Pengungkapan piutang pihak ketiga dan piutang denda angsuran perumahan disajikan sebagai berikut:

7.5.3.1 A. o.1. Piutang Pihak Ketiga (Putus Kontrak)

2024 (Rp)	2023 (Rp)
173.885.404,00	173.885.404,00

Piutang Pihak Ketiga merupakan hak yang berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang telah dibayar, namun Pihak Ketiga belum memberikan kewajiban kepada Pemerintah Kabupaten Pasangkayu sampai dengan 31 Desember 2024.

Piutang Pihak Ketiga dicatat senilai nilai perolehan.

Total Piutang Pihak Ketiga (Putus Kontrak) Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp173.885.404,00 tidak mengalami perubahan senilai Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp173.885.404,00.

Tabel 7.5.3. 20 Piutang Pihak Ketiga (Putus Kontrak)

(dalam rupiah)

No	Nama Perusahaan	Nama Kegiatan	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1	CV Putra Manakarra	Pembangunan Rumah Media PKM Funju	4.794.072,00	4.794.072,00
2	CV Putra Zakhwan	Jaminan Pelaksanaan atas Tambatan Perahu (Dermaga Rakyat) Desa Benggaulu	41.495.000,00	41.495.000,00
3	CV Fitria Mamuju	Pembangunan Selasar RSUD	24.442.200,00	24.442.200,00
4	CV Handal Utama	Bangunan Cold Storage	15.167.000,00	15.167.000,00
5	CV Tunas Indonesia	Pembangunan Kantor Instalasi Perbibitan dan Penghijauan Pakan Ternak	64.816.200,00	64.816.200,00
6	CV Ekky Bonanza	Irigasi Air Tanah Desa Sarudu	5.383.832,00	5.383.832,00
7	CV Kurnia Cipta Sarana	Jembatan Dusun Palapi	17.787.100,00	17.787.100,00
JUMLAH			173.885.404,00	173.885.404,00

Rincian daftar piutang pihak ketiga (putus kontrak) disajikan pada Lampiran 22.

7.5.3.1 A. o.2. Piutang Denda Angsuran Perumahan

2024 (Rp)	2023 (Rp)
6.564.000,00	6.564.000,00

Saldo piutang denda angsuran perumahan merupakan total denda yang timbul akibat adanya keterlambatan pembayaran angsuran penjualan rumah. Piutang denda angsuran perumahan dicatat senilai nilai nominal.

Total Piutang Denda Angsuran Perumahan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp6.564.000,00 tidak mengalami perubahan senilai Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp6.564.000,00.

Tabel 7.5.3. 21 Denda Angsuran Perumahan

(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Denda Angsuran Perumahan Tahun 2008	510.000,00	510.000,00
2	Denda Angsuran Perumahan Tahun 2009	2.040.000,00	2.040.000,00
3	Denda Angsuran Perumahan Tahun 2010	2.040.000,00	2.040.000,00
4	Denda Angsuran Perumahan Tahun 2011	1.974.000,00	1.974.000,00
	J U M L A H	6.564.000,00	6.564.000,00

Rincian Denda Angsuran Perumahan disajikan kepada Lampiran 23.

7.5.3.1 A. o.3. Piutang Pada Pihak Ketiga (Kelebihan Pembayaran)

2024 (Rp)	2023 (Rp)
981.815.441,05	26.222.500,00

Piutang pada pihak ketiga (kelebihan pembayaran) merupakan selisih uang muka yang belum di kembalikan ke kas daerah atas fisik pada Dinas PU.

Total Piutang Pada Pihak Ketiga (Kelebihan Pembayaran) Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp981.815.441,05 meningkat senilai Rp955.592.941,05 atau 100,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp26.222.500,00.

Tabel 7.5.3. 22 Piutang Pada Pihak Ketiga (Kelebihan Pembayaran)

(dalam rupiah)

No	Nama Perusahaan	Nama Kegiatan	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1	CV Putra Mandiri Konsultan	Pengawasan pembangunan Jalan Kabupaten II cs	3.425.462,00	26.222.500,00
2	CV SCORTAS FIRST	Pembangunan Rumah Adat Joglo	50.487.552,00	
3	CAKRA MAS	Penggantian Jembatan Jalan Poros Bulubunggu - Antai Kanan - Masabo (DAK)	326.913.299,70	
4	CV. MAPUTEH	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Desa Bambalamotu Kec. Bambalamotu (DAK)	289.092.123,65	
5	CV. MAPUTEH	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Desa Polewali Kec. Bambalamotu (DAK)	291.619.350,00	-
6	CV Putra Mandiri Konsultan	Pembangunan Rumah Tahfidz Kalola (Hibah)	20.277.653,70	-
	JUMLAH		981.815.441,05	26.222.500,00

Rincian piutang pada pihak ketiga (kelebihan pembayaran) disajikan pada lampiran 24.

7.5.3.1 A. o.4. Penyisihan Piutang Lain-lain Tidak Tertagih

2024 (Rp)	2023 (Rp)
(185.683.900,10)	(180.580.516,50)

Penyisihan Piutang Lain-lain Tidak Tertagih merupakan cadangan yang harus dibentuk senilai persentase dari akun piutang lain-lain yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi. Pemerintah Kabupaten Pasangkayu pada Tahun 2024 menyajikan penyisihan piutang lain-lain tidak tertagih dimaksudkan agar

penyajian saldo piutang lain-lain senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

Penyisihan Piutang Lain-lain tidak tertagih terdiri dari penyisihan piutang pihak ketiga dan piutang pihak ketiga yang kurang volume serta piutang BPJS Total. Penyisihan Piutang Lain-lain Tidak Tertagih Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai -Rp185.683.900,10 meningkat senilai -Rp5.103.383,60 atau 2,83% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai -Rp180.580.516,50.

Saldo penyisihan piutang lain-lain tidak tertagih terdiri dari penyisihan atas piutang lain-lain sebagai berikut:

Tabel 7.5.3. 23 Daftar Penyisihan Piutang Lain-lain Tidak Tertagih
(dalam rupiah)

No	Penyisihan Piutang Lain-lain Tidak Tertagih	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Piutang Pihak Ketiga (Putus Kontrak)	(173.885.404,00)	(173.885.404,00)
2	Piutang Denda Angsuran Perumahan	(6.564.000,00)	(6.564.000,00)
3	Uang Muka Pengadaan Barang/jasa (Pengadaan Aset Tetap)	(4.790.561,63)	-
4	Uang Muka Pengadaan Barang/jasa (Belanja Hibah)	(101.388,27)	-
5	Piutang Pihak Ketiga (Kelebihan pembayaran)	(342.546,20)	(131.112,50)
	Total Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(185.683.900,10)	(180.580.516,50)

Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Lain-lain Tidak Tertagih pada lampiran 25.1 s.d. lampiran 25.5.

7.5.3.1 A. o.5. Piutang Lain-lain Netto

2024 (Rp)	2023 (Rp)
976.580.944,95	26.091.387,50

Piutang lain-lain Netto adalah nilai bersih piutang lain-lain yang dapat direalisasikan, yaitu senilai nilai piutang lain-lain dikurangi dengan nilai penyisihan piutang lain-lain.

Total Piutang Lain-lain Netto Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp976.580.944,95 meningkat senilai Rp950.489.557,45 atau 100,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp26.091.387,50.

7.5.3.1 A. p. Persediaan

2024 (Rp)	2023 (Rp)
9.584.070.863,77	12.825.095.041,42

Saldo persediaan merupakan saldo barang yang mempunyai kriteria habis pakai, kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di SKPD.

Persediaan merupakan aset yang berwujud:

(a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah

- (b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi
- (c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
- (d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintahan Daerah.

Persediaan yang tercatat pada laporan keuangan pemerintah daerah umumnya berupa bahan ATK, bahan kebersihan, bahan cetakan, kertas berharga, alat lab, obat-obatan dan barang yang akan diserahkan ke masyarakat. Persediaan tersebut dicatat senilai nilai perolehan dengan menggunakan metode FIFO dan metode periodik.

Total Persediaan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp9.584.070.863,77 menurun senilai Rp3.241.024.177,65 atau - 25,27% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp12.825.095.041,42.

Daftar Persediaan tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7.5.3. 24 Daftar Persediaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Bahan		
	Bahan kimia	1.872.000,00	1.440.000,00
	Bahan Lainnya	101.033.110,00	114.547.401,00
2	Persediaan Alat / bahan untuk kegiatan Kantor		
	Alat Tulis Kantor	1.002.300,00	23.441.100,00
	Bahan Cetak	192.544.469,42	144.503.689,94
	Benda Pos	140.000,00	-
	Alat Kantor Lainnya	2.072.000,00	2.072.000,00
3	Obat-obatan		
	Obat	9.069.776.871,05	11.265.849.850,48
	Obat-obatan Lainnya	55.720.467,00	
4	Persediaan untuk dijual/diserahkan	159.909.646,30	1.273.241.000,00
	Persediaan Natura dan Pakan	-	-
	Jumlah	9.584.070.863,77	12.825.095.041,42

Rincian Persediaan per SKPD dapat dilihat pada lampiran 26

Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam Neraca, tetapi diungkapkan dalam CALK sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Pada Tahun 2024 terdapat persediaan barang rusak dan kadaluwarsa senilai Rp415.037.313,77. Persediaan ini dapat dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 7.5.3. 25 Rincian Daftar barang Rusak Atau Kadaluwarsa

(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Dinas Kesehatan	405.728.320,77	704.865.181,00
2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	2.527.560,00	2.527.560,00
3	Badan Pendapatan Daerah	562.910,00	562.910,00
4	Dinas Perhubungan	-	2.381.400,00
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	181.607.475,00
6	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	513.523,00	-
7	Dinas Lingkungan Hidup	5.705.000,00	-
	Jumlah	415.037.313,77	891.944.526,00

Rincian barang rusak atau kadaluwarsa per SKPD dapat dilihat pada lampiran 27.1 s.d. lampiran 27.5.

Barang rusak atau barang kadaluwarsa yang terdapat pada Dinas Kesehatan terdiri dari Obat, Vaksin dan Obat Hibah, nilai tertinggi berasal dari obat dan BMHP, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.

7.5.3.1B Investasi Jangka Panjang

2024	2023
(Rp)	(Rp)
17.395.000.000,00	17.395.000.000,00

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi dengan tujuan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan guna mendapatkan manfaat secara ekonomi sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Total Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp17.395.000.000,00 tidak mengalami perubahan senilai Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp17.395.000.000,00.

Investasi jangka panjang diklasifikasikan menjadi Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen.

7.5.3.1B. a Investasi Non Permanen

2024	2023
(Rp)	(Rp)
-	-

Investasi Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara permanen. Investasi non permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu merupakan Investasi Non Permanen–Dana Bergulir. Pengelolaan Dana Bergulir tersebut dikelola seluruhnya oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan.

Investasi Non Permanen-Dana Bergulir disajikan senilai nilai pokok dana bergulir dan dana bergulir diragukan tertagih yang merupakan pencadangan yang dilakukan terhadap tunggakan pokok dana bergulir yang masih ada dan belum dibayarkan oleh Penerima dana bergulir.

Total Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp0,00 tidak mengalami perubahan senilai Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00.

7.5.3.1B. a.1 Dana Bergulir

2024	2023
(Rp)	(Rp)
608.885.733,34	632.585.733,34

Investasi ini merupakan investasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu berupa dana bergulir (dana yang digulirkan/dipinjamkan) melalui

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan kepada kelompok masyarakat, UKM dan koperasi di wilayah Kabupaten Pasangkayu sesuai Peraturan Bupati dan akan dikembalikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Saldo Dana Bergulir dicatat senilai nilai perolehan.

Total Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp608.885.733,34 mengalami perubahan senilai Rp23.700.000,00 atau -3,75% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp632.585.733,34.

Tabel 7.5.3. 26 Rincian Dana Bergulir (berdasarkan tahun penyaluran)

(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Dana Bergulir Tahun 2008	235.375.000,01	235.375.000,01
2	Dana Bergulir Tahun 2009	306.911.964,33	330.611.964,33
3	Dana Bergulir Tahun 2010	66.598.769,00	66.598.769,00
	Jumlah	608.885.733,34	632.585.733,34

Rincian penerima dana bergulir disajikan dalam lampiran 28.1 dan lampiran 28.2.

7.5.3.1B. a.2 Dana Bergulir Diragukan Tertagih

2024 (Rp)	2023 (Rp)
(608.885.733,34)	(632.585.733,34)

Dana bergulir diragukan tertagih merupakan cadangan yang dibentuk senilai persentase dari akun dana bergulir berdasarkan daftar umur (*aging schedule*) dana bergulir yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi. Pemerintah Kabupaten Pasangkayu pada Tahun 2018 menyajikan saldo dana bergulir diragukan tertagih dimaksudkan agar penyajian saldo dana bergulir senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

Total Dana Bergulir Diragukan Tertagih Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai -Rp608.885.733,34 menurun senilai Rp23.700.000,00 atau -3,75% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai -Rp632.585.733,34.

Dana bergulir diragukan tertagih dihitung pada saat angsuran dana bergulir jatuh tempo, sehingga perhitungan umur dana bergulir diragukan tertagih (*aging schedule*) bervariasi sesuai masa angsuran dana bergulirnya.

Untuk dana bergulir tahun 2008 dicairkan pada bulan Oktober 2008, diangsur selama 24 bulan untuk perorangan dan 60 bulan untuk koperasi, pada tahun 2023 dana bergulir tahun 2008 sudah disisihkan seluruhnya. Untuk dana bergulir tahun 2009 dicairkan pada bulan Desember 2009, diangsur selama 24 bulan untuk perorangan dan 60 bulan untuk koperasi, pada tahun 2024 dana bergulir tahun 2009 sudah disisihkan seluruhnya. Untuk dana bergulir tahun 2010 dicairkan pada bulan Agustus 2010 dan diangsur selama 24 bulan baik untuk perorangan maupun koperasi, pada tahun 2024 dana bergulir tahun 2010 sudah disisihkan seluruhnya.

Saldo Dana bergulir diragukan tertagih disajikan berdasarkan umur disajikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.3. 27 Daftar Dana Bergulir Diragukan Tertagih

(dalam rupiah)

NO	Dana Bergulir Diragukan Tertagih	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Umur Dana bergulir > 5 Tahun	(608.885.733,34)	(632.585.733,34)
2	Umur Dana bergulir > 4 s/d 5 Tahun	-	-
3	Umur Dana bergulir > 3 s/d 4 Tahun	-	-
	Total Dana Bergulir Diragukan Tertagih	(608.885.733,34)	(632.585.733,34)

Daftar dana bergulir diragukan tertagih disajikan dalam lampiran 28.3

7.5.3.1 B. b Investasi Permanen

2024	2023
(Rp)	(Rp)
17.395.000.000,00	17.395.000.000,00

Investasi Permanen adalah investasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pasangkayu berupa penyertaan modal kepada PT. Bank Sulselbar (BPD) dengan tujuan untuk lebih memberdayakan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Investasi Permanen dicatat senilai harga perolehan apabila komposisi kepemilikan saham di bawah 20%.

Total Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp17.395.000.000,00 tidak mengalami perubahan senilai Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp17.395.000.000,00.

Tabel 7.5.3. 28 Penyertaan Modal Kepada Perusahaan

(dalam rupiah)

NO	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	PT Bank Sulselbar (BPD)	17.395.000.000,00	17.395.000.000,00
	Jumlah	17.395.000.000,00	17.395.000.000,00

Hingga saat ini komposisi kepemilikan saham Pemda pada Bank Sulselbar adalah 0,7931% sehingga metode penilaian Investasi dilakukan dengan menggunakan metode biaya, dimana investasi dicatat senilai biaya perolehan. Penghasilan atas Investasi tersebut diakui senilai bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya Investasi pada Badan usaha atau Badan hukum terkait.

7.5.3.1 C Aset Tetap

2024	2023
(Rp)	(Rp)
2.068.765.672.553,83	2.082.011.287.569,77

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diakui apabila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap dicatat senilai nilai perolehan (termasuk nilai-nilai yang dapat dikapitalisasi).

Perolehan aset tetap berasal dari kapitalisasi Belanja Modal dan/atau belanja lainnya yang didistribusikan dalam nilai aset tetap serta perolehan lainnya yang sah pada tahun anggaran berkenaan.

Perolehan Aset yang berasal dari Belanja Modal yang nilainya dibawah standar Kapitalisasi tidak disajikan dineraca sebagai Aset tetap namun tetap diungkap di Catatan atas Laporan Keuangan dan dilakukan pencatatan tersendiri sebagai Ekstrakomptabel sesuai Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Total Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp2.068.765.672.553,83 menurun senilai Rp13.245.615.015,94 atau -0,64% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp2.082.011.287.569,77.

Dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 7.5.3. 29 Rincian Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Tanah	175.803.295.690,14	174.246.475.790,14
2	Peralatan dan Mesin	590.802.860.469,83	582.255.941.533,48
3	Gedung dan Bangunan	942.115.670.930,71	885.446.277.010,59
4	Jalan Jaringan dan Irigasi	2.125.206.644.262,64	1.973.692.615.347,35
5	Aset Tetap Lainnya	9.111.918.369,00	8.532.206.996,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	29.104.102.831,65	52.615.291.272,00
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.803.378.820.000,14)	(1.594.777.520.379,79)
	Jumlah Aset Tetap	2.068.765.672.553,83	2.082.011.287.569,77

7.5.3.1 C. a Tanah

2024 (Rp)	2023 (Rp)
175.803.295.690,14	174.246.475.790,14

Total Tanah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp175.803.295.690,14 meningkat senilai Rp1.556.819.900,00 atau 0,89% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp174.246.475.790,14.

Tabel 7.5.3. 30 Mutasi Aset Tetap - Tanah Tahun 2024

(dalam rupiah)

Saldo awal 1 Januari 2024		174.246.475.790,14
Penambahan		
Belanja Modal Tanah	1.556.819.900,00	
Jumlah Penambahan		1.556.819.900,00
Pengurangan	-	
Jumlah Pengurangan		-
Saldo per 31 Desember 2024		175.803.295.690,14

Rincian Aset Tetap Tanah Per SKPD disajikan pada lampiran 29

Jumlah bidang tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu sebanyak 426 bidang tanah, yang terdiri dari:

	<i>dalam rupiah</i>
1 Tanah Untuk Bangunan Gedung	84.178.396.664,14
2 Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	29.188.147.026,00
3 Tanah Untuk Badan Jalan	62.436.752.000,00
	175.803.295.690,14

Dari jumlah tersebut, sebanyak 280 bidang tanah telah memiliki sertifikat kepemilikan dengan nilai senilai Rp80.203.183.150,14 Sedangkan sisanya sebanyak 145. bidang tanah masih dalam proses pengurusan sertifikat tanah dengan nilai senilai Rp95.600.112.540,00.

7.5.3.1 C. b Peralatan dan Mesin

2024 (Rp)	2023 (Rp)
590.802.860.469,83	582.255.941.533,48

Total Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp590.802.860.469,83 meningkat senilai Rp8.546.918.936,35 atau 1,47% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp582.255.941.533,48.

Tabel 7.5.3. 31 Mutasi Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Tahun 2024

(dalam rupiah)

Saldo awal 1 Januari 2024		582.255.941.533,48
Penambahan		
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.154.767.773,00	
Peralatan dan Mesin dari Hibah	4.726.725.000,00	
Peralatan dan Mesin dari Utang Pihak Ketiga	178.564.420,00	
Peralatan dan Mesin Direklas dari Aset Tetap Lainnya	9.152.000,00	
Jumlah Penambahan		38.069.209.193,00
Pengurangan		
Peralatan dan Mesin Reklas ke Bangunan	11.147.500,00	
Peralatan dan Mesin Reklas ke JJI	4.897.000,00	
Peralatan dan Mesin Reklas ke Aset Lainnya	28.365.707.022,65	
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Membayar Utang	750.464.000,00	
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Ekstra Kompatabel	21.307.834,00	
Realisasi Belanja Modal yang Tidak Menambah Nilai Aset Tetap (Barang Pakai Habis/Belanja Barang Jasa Dana BOS)	368.766.900,00	
Jumlah Pengurangan		29.522.290.256,65
Saldo per 31 Desember 2024		590.802.860.469,83

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD dapat dilihat pada lampiran 30.

7.5.3.1 C. c Gedung dan Bangunan

2024 (Rp)	2023 (Rp)
942.115.670.930,71	885.446.277.010,59

Total Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp942.115.670.930,71 meningkat senilai Rp56.669.393.920,12 atau 6,40% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp885.446.277.010,59.

Tabel 7.5.3. 32 Mutasi Aset Tetap - Gedung dan Bangunan Tahun 2024

(dalam rupiah)

Saldo awal 1 Januari 2024		885.446.277.010,59
Penambahan		
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.406.647.247,00	
Gedung dan Bangunan dari Hibah	14.386.526.000,00	
Gedung dan Bangunan dari Hibah	1.015.798.170,00	
Gedung dan Bangunan Reklas dari Peralatan dan Mesin	11.147.500,00	
Gedung Dan Bangunan Direklas Dari JIJ	208.999.074,00	
Gedung Dan Bangunan Reklas Dari KDP	8.911.475.280,00	
Jumlah Penambahan		67.940.593.271,00
Pengurangan		
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Membayar Utang Retensi	3.264.002.397,00	
Gedung Dan Bangunan direklas ke Aset Lain-lain	5.710.880.195,00	
Gedung dan Bangunan di Reklas ke KDP	2.185.725.422,00	
(Koreksi atas kekurangan volume berdasarkan temuan BPK Tahun lalu pada Dinas PUPR, RSUD)	110.591.336,88	
Jumlah Pengurangan		11.271.199.350,88
Saldo per 31 Desember 2024		942.115.670.930,71

Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD dapat dilihat pada lampiran 31.

7.5.3.1 C. d Jalan Jaringan dan Irigasi

2024 (Rp)	2023 (Rp)
2.125.206.644.262,64	1.973.692.615.347,35

Total Jalan Jaringan dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp2.125.206.644.262,64 meningkat senilai Rp151.514.028.915,29 atau 7,68% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp1.973.692.615.347,35.

Pada tahun 2024 terdapat penambahan / pengurangan aset tetap jalan jaringan dan irigasi yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.3.33 Mutasi Aset Tetap - Jalan Jaringan dan Irigasi Tahun 2024

(dalam rupiah)

Saldo awal 1 Januari 2024		1.973.692.615.347,35
Penambahan		
Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	103.170.690.203,00	
Jalan, Jaringan, dan Irigasi dari Utang	491.182.100,00	
Jalan, Jaringan, dan Irigasi diperoleh dari Hibah	34.648.385.797,00	

Jalan, Jaringan, dan Irigasi direklas dari Peralatan Dan Mesin	4.897.000,00	
Jalan, Jaringan, dan Irigasi direklas dari KDP	37.526.430.182,00	
Jumlah Penambahan		175.841.585.282,00
Pengurangan		
Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Membayar Utang	1.598.029.621,00	
Jalan, Jaringan, dan Irigasi direklas ke Gedung dan Bangunan	208.999.074,00	
Jalan, Jaringan, dan Irigasi direklas ke KDP	21.564.026.771,00	
Belanja Modal JIJ Yang Sifatnya Pemeliharaan	390.701.492,00	
Jalan Jaringan dan Irigasi (Koreksi atas kekurangan volume berdasarkan temuan BPK Tahun lalu pada Dinas PUPR)	565.799.408,71	
Jumlah Pengurangan		24.327.556.366,71
Saldo per 31 Desember 2024		2.125.206.644.262,64

Rincian Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi per SKPD dapat dilihat pada lampiran 32.

7.5.3.1 C. e Aset Tetap Lainnya

2024 (Rp)	2023 (Rp)
9.111.918.369,00	8.532.206.996,00

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam kelompok aset tetap tanah, aset tetap peralatan dan mesin, aset tetap gedung dan bangunan, aset tetap jalan irigasi dan jaringan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Contoh barang yang termasuk aset tetap lainnya antara lain koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan, ikan dan tanaman, dan aset tetap renovasi.

Aset tetap lainnya tidak disusutkan kecuali aset tetap renovasi sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 18 tentang Penyusutan yang menyatakan bahwa dalam mencatat dan menyajikan penyusutan, prasyarat yang harus dipenuhi adalah :

1. Harus dapat diidentifikasi aset yang kapasitas dan manfaatnya tidak mengalami perubahan
2. Harus dapat diidentifikasi aset yang kapasitas dan manfaatnya tidak mengalami perubahan
3. Harus ditetapkan masa manfaat dan kapasitas aset tetap

Total Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp9.111.918.369,00 meningkat senilai Rp579.711.373,00 atau 6,79% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp8.532.206.996,00.

Pada tahun 2024 terdapat penambahan/(pengurangan) aset tetap lainnya yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.3. 34 Mutasi Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya Tahun 2024

(dalam rupiah)

Saldo awal 1 Januari 2024		8.532.206.996,00
Penambahan		
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	672.874.200,00	
Jumlah Penambahan		672.874.200,00
Pengurangan		

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya direklas ke Peralatan dan Mesin	9.152.000,00	
Realisasi Belanja Modal Aset tetap Lainnya Ekstra Kompatabel	81.010.827,00	
Aset Tetap Lainnya Direklas ke Aset Lain-lain	3.000.000,00	
Jumlah Pengurangan		93.162.827,00
Saldo per 31 Desember 2024		9.111.918.369,00

Rincian Aset Tetap Lainnya per SKPD dapat dilihat pada lampiran 33.

7.5.3.1C. f Konstruksi Dalam Pengerjaan

2024	2023
(Rp)	(Rp)
29.104.102.831,65	52.615.291.272,00

Total Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp29.104.102.831,65 menurun senilai Rp23.511.188.440,35 atau -44,69% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp52.615.291.272,00.

Mutasi saldo konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 7.5.3. 35 Mutasi Aset Tetap - Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024

(dalam rupiah)

Saldo awal 1 Januari 2024		52.615.291.272,00
Penambahan		
Utang menambah nilai Konstruksi dalam Pengerjaan	135.077.154,00	
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan direklas ke Konstruksi dalam Pengerjaan	2.185.725.422,00	
Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi direklas ke Konstruksi dalam Pengerjaan	21.564.026.771,00	
Jumlah		23.884.829.347,00
Pengurangan		
Konstruksi dalam Pengerjaan direklas ke Gedung dan Bangunan	8.911.475.280,00	
Konstruksi dalam Pengerjaan direklas ke Jalan, Jaringan, dan irigasi	37.526.430.182,00	
Realisasi Belanja Modal Realisasi keuangan lebih besar dari Realisasi Fisik (Piutang Uang Muka)	958.112.325,35	
Jumlah		47.396.017.787,35
Saldo per 31 Desember 2024		29.104.102.831,65

Rincian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD dapat dilihat pada lampiran 34.

7.5.3.1C. g Akumulasi Penyusutan

2024	2023
(Rp)	(Rp)
(1.803.378.820.000,14)	(1.594.777.520.379,79)

Akumulasi penyusutan adalah kumpulan atau kompilasi dari penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca.

Sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah.

Pemerintah Kabupaten Pasangkayu telah melakukan perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap sesuai dengan kebijakan akuntansi yang ditetapkan pada Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi. Saldo akumulasi penyusutan merupakan kontra akun dari aset tetap sehingga dapat menggambarkan nilai buku aset tetap.

Metode penyusutan yang digunakan dalam menghitung akumulasi penyusutan sesuai kebijakan akuntansi yang ditetapkan yaitu metode garis lurus. Masa manfaat aset ditetapkan sesuai dengan kebijakan akuntansi di mana:

- Peralatan dan mesin dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok dengan masa manfaat 5, 10, 15, dan 20 tahun.
- Gedung dan bangunan memiliki masa manfaat 20 tahun.
- Jalan, irigasi dan jaringan memiliki masa manfaat 20 tahun.
- Aset tetap lainnya kecuali hewan dan tanaman yang tidak disusutkan memiliki masa manfaat 5 tahun.

Total Akumulasi Penyusutan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai -Rp1.803.378.820.000,14 meningkat senilai -Rp208.601.299.620,35 atau 13,08% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai -Rp1.594.777.520.379,79.

Mutasi saldo akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 7.5.3. 36 Mutasi Aset Tetap - Akumulasi Penyusutan Tahun 2024

(dalam rupiah)

Saldo awal 1 Januari 2024		(1.594.777.520.379,79)
Penambahan		
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	(45.415.506.763,00)	
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	(57.642.610.665,00)	
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(137.178.370.817,00)	
Beban Penyusutan Aset tetap lainnya	(7.535.500,00)	
Jumlah Penambahan		(240.244.023.745,00)
Pengurangan		
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin direklas ke Aset Lain-lain	(26.653.098.911,65)	
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan direklas ke Aset Lain-lain	(3.392.258.964,00)	
Akumulasi Penyusutan JJI (Koreksi atas kekurangan volume berdasarkan temuan BPK Tahun lalu pada Dinas PUPR)	(1.466.369.393,00)	
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung (Koreksi atas kekurangan volume berdasarkan temuan BPK Tahun lalu pada Dinas PUPR, RSUD)	(130.996.856,00)	
Jumlah Pengurangan		(31.642.724.124,65)
Saldo per 31 Desember 2024		(1.803.378.820.000,14)

Berdasarkan jenis aset tetapnya, rincian Akumulasi Penyusutan per Jenis Aset Tetap disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.5.3. 37 Saldo Akumulasi Penyusutan per Jenis Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Jenis Aset Tetap	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	447.254.105.042,93	428.491.697.191,58
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	406.771.915.848,81	352.652.561.003,81
3	Akumulasi Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi	949.281.764.150,40	813.569.762.726,40
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	71.034.958,00	63.499.458,00
	TOTAL	1.803.378.820.000,14	1.594.777.520.379,79

7.5.3.1D Aset Lainnya

2024	2023
(Rp)	(Rp)
27.941.493.454,09	27.505.198.125,26

Aset lainnya merupakan aset Pemerintah Kabupaten Pasangkayu yang tidak masuk dalam klasifikasi aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap.

Total Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp27.941.493.454,09 meningkat senilai Rp436.295.328,83 atau 1,59% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp27.505.198.125,26.

Aset lainnya terdiri dari tagihan penjualan angsuran, Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

7.5.3.1D. a Tagihan Penjualan Angsuran

2024	2023
(Rp)	(Rp)
-	-

Piutang Angsuran Pemerintah Kabupaten Pasangkayu merupakan angsuran perumahan pemda yang belum jatuh tempo yaitu angsuran tahun 2018 sampai dengan tahun 2024. Tagihan penjualan angsuran telah jatuh tempo seluruhnya dan di reklas ke aset lancar.

Total Tagihan Penjualan Angsuran Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp0,00 tidak mengalami perubahan senilai Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00.

Penurunan tersebut diakui sebagai piutang angsuran perumahan dalam aset lancar.

7.5.3.1 D. b Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

2024	2023
(Rp)	(Rp)
298.976.570,83	-

Pada Tahun Anggaran 2024 tuntutan ganti kerugian daerah yang dicatat dalam Neraca merupakan tagihan pihak ketiga yang diakibatkan dari pelaksanaan

pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontraknya berdasarkan hasil pemeriksaan dan belum diterima pembayarannya ke kas daerah.

Total Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp298.976.570,83 meningkat senilai Rp298.976.570,83 atau 100,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00.

Daftar tuntutan ganti kerugian daerah disajikan sebagai berikut:

No	Nama Rekanan	Uraian Pekerjaan	Nilai Kekurangan Volume	Realisasi	Sisa Kekurangan Volume
1)	PT CPT (PUPR)	Penanganan Long Segment Jalan Trans Sulawesi - Kampung Baru Randomayang - Lompo Bura	11.666.978,55		11.666.978,55
2)	CV TMP (PUPR)	Paket I Hotmix Desa Tikke Dusun Petilo-Jono CS	43.100.783,41		43.100.783,41
3)	CV AKM (PUPR)	Pembangunan Jalan Desa Singgani	2.436.248,84		2.436.248,84
4)	CV AJM (PUPR)	Peningkatan Jalan Desa Lilimori Lelejae	18.432.994,97		18.432.994,97
5)	CV TMP (PUPR)	Penanganan Long Segment Jalan Trans Sulawesi – Poros Kuma – Bunto - Monrowali	102.437.117,03		102.437.117,03
6)	CV SMA (PUPR)	Penanganan Long Segment Jalan Trans Sulawesi Singgani – Parabu – Lilimori – Lelejae – Kastabuana Ompi	71.121.204,52		71.121.204,52
7)	PT AU (PUPR)	Paket II Hotmix Bulumario Saptanajaya	309.707.941,69	309.707.941,69	-
8)	CV SMA (PUPR)	Peningkatan Jalan Hotmix Pasangkayu	6.896.139,70		6.896.139,70
9)	CV MK (PUPR)	Pembangunan Mall Pelayanan Publik	15.963.698,54	15.963.698,54	-
10)	CV MI (Diknas)	Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Pahampa	14.103.956,72		14.103.956,72
11)	CV IK (Diknas)	Pembangunan Toilet SDN Pahampa	6.345.351,10		6.345.351,10
12)	CV VB (Diknas)	Pembangunan Laboratorium Komputer SDN Wirabuana	4.372.119,47		4.372.119,47
13)	CV ITK (Diknas)	Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Wirabuana	3.762.387,37	500.000,00	3.262.387,37
14)	CV GG (Diknas)	Pembangunan Ruang Guru SDN Wirabuana	3.123.814,35		3.123.814,35
15)	CV CTM (Diknas)	Pembangunan Ruang Tata Usaha SMPN 1 Bambalamotu	4.120.753,99	1.000.000,00	3.120.753,99
16)	CV TM (Diknas)	Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 1 Bambalamotu	6.303.344,10	300.000,00	6.003.344,10
17)	CV PJ (Diknas)	Rehab Toilet Beserta Sanitasinya SMPN 1 Bambalamotu	2.853.376,71	300.000,00	2.553.376,71
18)	CV BM (RSUD)	Pembangunan Ruang Radiologi	10.280.668,32	10.280.668,32	-
19)	CV SS (RSUD)	Pembangunan Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) Ponek	39.361.866,21	39.361.866,21	-
				Jumlah	298.976.570,83

7.5.3.1 D. c Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

2024 (Rp)	2023 (Rp)
12.422.690.124,86	12.422.690.124,86

Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah Akun yang digunakan untuk mencatat pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan Investasi Properti berdasarkan PSAP Nomor 17 Tahun 2023 namun belum diatur kode akunnya dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050-5889 Tahun 2023 tentang Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Total Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp12.422.690.124,86 tidak mengalami perubahan senilai Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp12.422.690.124,86.

Tabel 7.5.3. 38 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Sewa lahan ATM RSUD	199.964,36	199.964,36
2	Sewa lahan ATM di Sekretariat Daerah	105.501,50	105.501,50
3	Sewa Gudang Tanjung Bakau di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	9.816.251.000,00	9.816.251.000,00
4	Sewa Rumah di Dinas Umum dan Penataan Ruang	2.606.133.659,00	2.606.133.659,00
	Jumlah	12.422.690.124,86	12.422.690.124,86

7.5.3.1 D. c.1 Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

2024 (Rp)	2023 (Rp)
(6.896.705.008,00)	(6.273.096.795,00)

Akumulasi penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah alokasi sistematis atas nilai Kemitraan Dengan Pihak Ketiga yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan.

Total Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai -Rp6.896.705.008,00 meningkat senilai -Rp623.608.213,00 atau 9,94% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai -Rp6.273.096.795,00.

Daftar akumulasi penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sebagai berikut:

Tabel 7.5.3. 39 Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

(dalam rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
Akumulasi Sewa Gudang di Pelabuhan Tanjung Bakau	(5.439.839.096,00)	(4.949.026.546,00)
Akumulasi Penyusutan Rumah Dinas	(1.456.865.912,00)	(1.324.070.249,00)
Jumlah Akumulasi Penyusutan	(6.896.705.008,00)	(6.273.096.795,00)

7.5.3.1 D. c.2 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Netto

2024 (Rp)	2023 (Rp)
5.525.985.116,86	6.149.593.329,86

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Netto adalah selisih dari nilai perolehan Kemitraan dengan pihak ketiga dikurangi dengan akumulasi penyusutan kemitraan dengan pihak ketiga. Kemitraan dengan Pihak Ketiga disajikan senilai nilai perolehan dikurangi nilai penyusutannya.

Total Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp5.525.985.116,86 menurun senilai Rp623.608.213,00 atau -10,14% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp6.149.593.329,86.

Tabel 7.5.3. 40 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 2024

(dalam rupiah)

Saldo awal 1 Januari 2024		6.149.593.329,86
Penambahan		
	-	
Jumlah Penambahan		-
Pengurangan		
Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga Tahun 2024	623.608.213,00	
Jumlah Pengurangan		623.608.213,00
Saldo per 31 Desember 2024		5.525.985.116,86

7.5.3.1 D. d Aset Tak Berwujud

2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.132.550.962,00	1.132.550.962,00

Aset Tak Berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu. Aset Tak Berwujud yang saat ini dimiliki seluruhnya berupa *software* komputer.

Total Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp1.132.550.962,00 tidak mengalami perubahan senilai Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp1.132.550.962,00.

Tabel 7.5.3. 41 Mutasi Aset Lainnya - Aset Tak Berwujud 2024

(dalam rupiah)

Saldo awal 1 Januari 2024		1.132.550.962,00
Penambahan		
Belanja Modal ATB	72.450.000,00	
Jumlah Penambahan		72.450.000,00
Pengurangan		

Reklas ke Beban Pemeliharaan	22.500.000,00	
Reklas ke Beban Sewa ATB	49.950.000,00	
Jumlah Pengurangan		72.450.000,00
Saldo per 31 Desember 2024		1.132.550.962,00

Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada lampiran 35.

7.5.3.1 D. d.1 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

2024	2023
(Rp)	(Rp)
(983.601.342,00)	(793.898.424,00)

Amortisasi Aset Tak Berwujud adalah alokasi sistematis atas nilai aset tak berwujud yang dapat diamortisasikan selama masa manfaat yang bersangkutan. Metode amortisasi yang digunakan dalam menghitung akumulasi amortisasi sesuai kebijakan akuntansi yang ditetapkan yaitu metode garis lurus. Masa manfaat aset ditetapkan sesuai dengan kebijakan akuntansi

Total Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai -Rp983.601.342,00 meningkat senilai -Rp189.702.918,00 atau 23,90% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai -Rp793.898.424,00.

7.5.3.1 D. d.2 Aset Tak Berwujud Netto

2024	2023
(Rp)	(Rp)
148.949.620,00	338.652.538,00

Aset Tak Berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu. Aset Tak Berwujud yang saat ini dimiliki seluruhnya berupa *software* komputer dan kajian.

Aset Tak Berwujud disajikan senilai nilai perolehan dan nilai amortisasinya.

Total Aset Tak Berwujud Netto Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp148.949.620,00 menurun senilai Rp189.702.918,00 atau -56,02% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp338.652.538,00.

Tabel 7.5.3. 42 Daftar Aset Tidak Berwujud

(dalam rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
Software	960.742.162,00	960.742.162,00
Aset Tidak Berwujud Lainnya	171.808.800,00	171.808.800,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	(983.601.342,00)	(793.898.424,00)
Nilai Buku ATB	148.949.620,00	338.652.538,00

7.5.3.1 D. e Aset Lain-lain

2024	2023
(Rp)	(Rp)
21.967.582.146,40	21.016.952.257,40

Aset lainnya merupakan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah karena kondisinya telah rusak berat dan siap untuk dihapuskan. Nilai aset lainnya disajikan senilai nilai buku dari aset tetap yang telah direklasifikasi.

Total Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp21.967.582.146,40 meningkat senilai Rp950.629.889,00 atau 4,52% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp21.016.952.257,40.

Daftar aset lainnya yang terdiri dari nilai aset lainnya dan akumulasi penyusutan aset lainnya sebagai berikut:

Tabel 7.5.3. 43 Daftar Aset Lain-lain

Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
Aset Rusak Berat	21.861.258.146,40	19.301.001.257,40
Treasury Deposit Facility (TDF)	106.324.000,00	1.715.951.000,00
Nilai Buku Aset Lainnya	21.967.582.146,40	21.016.952.257,40

Sedangkan mutasi aset lainnya Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 7.5.3. 44 Mutasi Aset Lainnya

(dalam rupiah)

Saldo per 1 Januari 2024		21.016.952.257,40
Penambahan		
Peralatan dan Mesin direklas ke Aset Lain-lain	28.365.707.022,65	
Gedung dan Bangunan direklas ke Aset Lain-lain	5.710.880.195,00	
Aset tetap Lainnya direklas ke Aset Lain-lain	3.000.000,00	
Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	106.324.000,00	
Jumlah		34.185.911.217,65
Pengurangan:		
Penghapusan Aset Lain-lain karena Pemusnahan	1.058.668.283,00	
Penghapusan Aset Lain-lain karena Pemindahtanganan	415.304.170,00	
Akulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin direklas ke Aset Lain-lain	26.653.098.911,65	
Akulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan direklas ke Aset Lain-lain	3.392.258.964,00	
Penerimaan Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) 2023	1.715.951.000,00	
Jumlah		33.235.281.328,65
Saldo per 31 Desember 2024		21.967.582.146,40

- 1) Aset Rusak Berat adalah aset milik negara atau daerah yang telah mengalami kerusakan parah sehingga tidak dapat digunakan lagi atau tidak memiliki nilai manfaat yang signifikan. Dalam konteks Kemendagri, penyelesaian Aset rusak berat berkaitan dengan pengelolaan aset daerah, termasuk penghapusan, pemusnahan, atau pemindahtanganan aset yang sudah rusak berat. Saldo Aset Rusak Berat per 31 Desember 2024 senilai Rp21.861.258.146,40.
- 2) Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) merupakan Redesain Pengelolaan transfer ke daerah untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong perbaikan kualitas belanja yang efisien dan efektif, melalui TKD yang berbasis kinerja. Dana Bagi hasil yang dialokasikan untuk daerah penghasil, daerah pengolah dan non penghasil disalurkan secara non tunai melalui TDF. TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI) sesuai dengan PMK No 19 Tahun 2024 tentang Pengelolaan DBH dan/

atau DAU yang disalurkan secara Non tunai melalui *Treasury Deposit Facility*. Saldo TDF-TKD per 31 Desember 2024 senilai Rp106.324.000,00.

7.5.3.2 Kewajiban

2024 (Rp)	2023 (Rp)
12.257.482.201,56	16.521.390.374,90

Merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Pasangkayu masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual untuk pengakuan kewajiban. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Total Kewajiban Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp12.257.482.201,56 menurun senilai -Rp4.263.908.173,34 atau -25,81% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp16.521.390.374,90.

Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

7.5.3.2 A Kewajiban Jangka Pendek

2024 (Rp)	2023 (Rp)
12.257.482.201,56	16.521.390.374,90

Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Total Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp12.257.482.201,56 menurun senilai Rp4.263.908.173,34 atau -25,81% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp16.521.390.374,90.

Kewajiban jangka pendek tersebut dari:

Tabel 7.5.3. 45 Daftar Kewajiban jangka Pendek

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1	Utang PFK	37.728,00	3.535.855,00
2	Bagian Lancar Utang dalam Negeri-Pemerintah Pusat	-	-
3	Utang Beban	12.217.598.577,45	16.453.147.868,45
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	10.719.000,00	10.719.000,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka	29.126.896,11	53.987.651,45
	J U M L A H	12.257.482.201,56	16.521.390.374,90

7.5.3.2 A. a Utang Perhitungan Pihak Ketiga

2024 (Rp)	2023 (Rp)
37.728,00	3.535.855,00

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan utang yang timbul akibat pemerintah Kabupaten Pasangkayu belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau dokumen lain yang dipersamakan. Utang pihak ke tiga terdiri atas:

	per 31 Desember 2024	dalam rupiah per 31 Desember 2023
1. Utang PFK pada BUD	-	-
2. Utang PFK pada Bendahara Pengeluaran SKPD	-	421.305,00
3. Utang PFK pada Bendahara Dana BOS	37.728,00	3.114.550,00
4. Utang PFK pada Bendahara FKTP	-	-
5. Utang PFK Lainnya	-	-
Jumlah Utang PFK	37.728,00	3.535.855,00

Tabel 7.5.3.46 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

(dalam rupiah)

No	Utang PFK	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
	Utang PFK pada Bendahara Pengeluaran SKPD		
1	Utang PPh		56.023,00
2	Utang PPN		365.282,00
	Jumlah Utang PFK pada Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD		421.305,00
III	Utang PFK pada Bendahara Dana BOS		
1	Utang PFK PPn dan PPh	-	-
2	Utang PPh ps 21	-	130.000,00
2	Utang PPh ps 23	37.728,00	2.832.665,00
4	Utang PPN	-	151.885,00
	Jumlah Utang PFK pada Kas di Bendahara Dana BOS	37.728,00	3.114.550,00
	Jumlah Utang PFK	37.728,00	3.535.855,00

Rincian mutasi penerimaan dan pengeluaran PFK pada BUD yaitu sebagai berikut:

Tabel 7.5.3.47 Mutasi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada BUD

(dalam rupiah)

No	Jenis PFK	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	IWP	-	14.443.487.125,00	14.443.487.125,00	-
2	PPh Ps 21	-	7.655.589.663,00	7.655.589.663,00	-
3	PPh Ps 22	-	706.447.827,00	706.447.827,00	-
4	PPh Ps 23	-	336.563.983,00	336.563.983,00	-
5	PPh Ps 4 (2)	-	2.967.638.428,32	2.967.638.428,32	-
6	PPN	-	20.196.476.161,00	20.196.476.161,00	-
7	BPJS		9.537.891.782,00	9.537.891.782,00	
8	JKK	-	370.047.115,00	370.047.115,00	-
9	JKM	-	1.109.639.548,40	1.109.639.548,40	-
10	JHT	-	297.075.295,00	297.075.295,00	-
	Jumlah	-	57.620.856.927,72	57.620.856.927,72	-

Rincian mutasi penerimaan dan pengeluaran PFK pada Bendahara Pengeluaran yaitu sebagai berikut:

Tabel 7.5.3. 48 Mutasi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pada Kas Lainnya Bendahara Pengeluaran
(dalam rupiah)

No	Jenis PFK	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	PPh:				
	PPh Ps 21	-	13.514,00	13.514,00	-
	PPh Ps 22	1.216,73	30.716.570,00	30.717.786,73	-
	PPh Ps 23	54.806,00	101.601.003,00	101.655.809,00	-
	PPh Ps 4(2)	-	180.000,00	180.000,00	-
	PPN BM Dalam Negeri	-			-
2	PPN	365.282,27	324.890.728,00	325.256.010,27	-
	Jumlah	421.305,00	457.401.815,00	457.823.120,00	-

Tabel 7.5.3. 49 Mutasi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pada Kas Bendahara Dana Bos
(dalam rupiah)

No	Jenis PFK	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	PPh:				
	PPh Ps 21	130.000,00	4.379.696,00	4.509.696,00	-
	PPh Ps 22	-	140.157,00	140.157,00	-
	PPh Ps 23	2.832.665,00	127.923.416,85	130.718.353,85	37.728,00
2	PPN	151.885,00	166.895.475,22	167.047.360,22	-
	Jumlah	3.114.550,00	299.338.745,07	302.415.567,07	37.728,00

Tabel 7.5.3. 50 Mutasi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pada Kas Bendahara Pengeluaran JKN
(dalam rupiah)

No	Jenis PFK	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	PPh:				
	PPh Ps 21	-	141.126.848,00	141.126.848,00	-
	PPh Ps 22	-	4.857.279,00	4.857.279,00	-
	PPh Ps 23	-	60.000,00	60.000,00	-
2	PPN	-	37.327.153,00	37.327.153,00	-
	Jumlah	-	183.371.280,00	183.371.280,00	-

Tabel 7.5.3. 51 Mutasi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pada Kas Bendahara Pengeluaran BOK
(dalam rupiah)

No	Jenis PFK	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	PPh:				
	PPh Ps 21	-	31.284.277,00	31.284.277,00	-
	PPh Ps 22	-	325.859,00	325.859,00	-
	PPh Ps 23	-	24.148.200,11	24.148.200,11	-
2	PPN	-	2.467.568,00	2.467.568,00	-
	Jumlah	-	58.225.904,11	58.225.904,11	-

7.5.3.2 A. b Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat

2024	2023
(Rp)	(Rp)
-	-

Kewajiban Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat untuk tahun 2024 senilai Rp0,00 tidak ada penambahan dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya.

7.5.3.2 A. c Pendapatan Diterima Dimuka

2024 (Rp)	2023 (Rp)
29.126.896,11	53.987.651,45

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kewajiban pemerintah yang timbul akibat adanya penerimaan yang mengakibatkan masih terdapatnya sisa sumber daya yang harus disediakan kepada pihak lain.

Pendapatan Diterima Dimuka ini adalah sewa lahan ATM Jl. Bukit Husada (BLUD) senilai Rp8.409.600,00 dengan masa sewa 1 Januari 2024 s/d 30 September 2025 dan sewa lahan ATM di Kantor Pemda senilai Rp45.578.051,45 dengan masa sewa 01 Januari 2024 s/d 01 November 2025.

Tabel 7.5.3. 52 Pendapatan Diterima Dimuka

(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Sewa Lahan ATM Jl. Bukit Husada (BLUD)	8.409.600,00	8.409.600,00
2	Sewa Lahan ATM Kantor Pemda	20.717.296,11	45.578.051,45
Jumlah		29.126.896,11	53.987.651,45

Rincian pendapatan diterima dimuka dapat dilihat pada lampiran 36

7.5.3.2 A. d Utang Belanja

2024 (Rp)	2023 (Rp)
12.217.598.577,45	16.453.147.868,45

Utang Belanja digunakan untuk mencatat utang belanja yang belum dibayarkan Pemerintah Daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja.

Total Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp12.217.598.577,45 menurun senilai Rp4.235.549.291,00 atau - 25,74% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp16.453.147.868,45.

Tabel 7.5.3. 53 Utang Belanja

(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Utang Belanja Pegawai	553.807.094,00	171.600.947,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	7.924.808.784,00	8.323.675.113,00
3	Utang Belanja Pemeliharaan	188.130.499,00	122.775.569,00
4	Utang Belanja Hibah	21.593.550,00	505.794.415,00
5	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	211.640.220,00	791.578.800,00
6	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.333.574.306,45	3.560.907.291,45
7	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.984.044.124,00	2.976.815.733,00
Jumlah		12.217.598.577,45	16.453.147.868,45

Tabel 7.5.3. 54 Daftar Utang Belanja Pegawai Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1	Dinas Kesehatan	-	104.826.352,00
2	RSUD	32.760.543,00	17.561.225,00
3	BPKAD/PPKD	-	49.213.370,00
4	Badan Pendapatan Daerah	521.046.551,00	-
	Jumlah Utang Belanja Pegawai	553.807.094,00	171.600.947,00

Rincian Utang Belanja Pegawai per SKPD disajikan pada lampiran 37

Tabel 7.5.3. 55 Daftar Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
I	Utang Belanja Barang :	-	-
	RSUD	4.131.863.935,00	3.912.578.944,00
	Dinas Kesehatan	-	959.713.070,00
II	Utang Belanja Jasa:	-	-
	RSUD	1.450.149.761,00	2.980.938.096,00
	Dinas Kesehatan	2.120.670.496,00	242.809.692,00
	Dinas PU	21.963.389,00	14.119.380,00
	Dinas Pendidikan	6.758.935,00	6.555.553,00
	Dinas Perumahan	3.266.598,00	3.051.957,00
	Dinas P3KBPA	2.401.637,00	2.028.840,00
	Dinas Lingkungan Hidup	4.488.560,00	4.386.928,00
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.888.126,00	3.794.652,00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.736.691,00	3.862.632,00
	Dinas Perhubungan	43.832.879,00	43.561.452,00
	Dinas Kominfopers	3.486.036,00	2.637.824,00
	Dinas PMPTSP	3.366.370,00	3.267.298,00
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.212.889,00	3.003.870,00
	Dinas Kelautan dan Perikanan	7.078.222,00	6.198.350,00
	Dinas Pertanian	1.653.244,00	2.188.596,00
	Dinas Perkebunan	1.226.162,00	1.933.667,00
	Sekretariat Daerah	56.789.099,00	63.298.668,00
	Inspektorat	4.260.323,00	4.972.426,00
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.026.437,00	6.019.639,00
	Badan Pendapatan Daerah	4.748.688,00	6.729.543,00
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12.012.282,00	10.512.298,00
	BPKPD	4.972.926,00	6.947.083,00
	Sekretariat DPRD	20.236.149,00	25.181.000,00
	Dinas Tenaga Kerja	1.745.518,00	1.612.455,00
	Ketahanan Pangan	973.432,00	-
	Kecamatan Bambaira	-	1.771.200,00
	Jumlah Utang Belanja Barang dan Jasa	7.924.808.784,00	8.323.675.113,00

Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa per SKPD disajikan pada lampiran 38 dan lampiran 39.

Tabel 7.5.3. 56 Daftar Utang Belanja Pemeliharaan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1	Dinas PU	92.526.555,00	92.526.555,00
2	Dinas Pendidikan	95.603.944,00	30.249.014,00
	Jumlah Utang Belanja Pemeliharaan	188.130.499,00	122.775.569,00

Rincian Utang Belanja Pemeliharaan per SKPD disajikan pada lampiran 40.

Tabel 7.5.3. 57 Daftar Utang Belanja Hibah Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1	Dinas PU	21.593.550,00	505.794.415,00
	Jumlah Utang Belanja Hibah	21.593.550,00	505.794.415,00

Rincian Utang Belanja Hibah per SKPD disajikan pada lampiran 41

Tabel 7.5.3. 58 Daftar Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1	Dinas Kesehatan	33.075.800,00	791.578.800,00
2	RSUD	178.564.420,00	-
	Jumlah Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	211.640.220,00	791.578.800,00

Rincian Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD disajikan pada lampiran 42

Tabel 7.5.3. 59 Daftar Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1	Dinas PU	192.403.992,00	146.966.450,00
2	Dinas Pendidikan	825.978.936,00	1.083.004.791,00
3	Dinas Kesehatan	154.236.223,05	75.047.718,05
4	Sekretariat Daerah	30.027.500,00	30.027.500,00
5	RSUD	127.827.655,40	2.222.760.832,40
6	Dinas Koperindag	3.100.000,00	3.100.000,00
	Jumlah	1.333.574.306,45	3.560.907.291,45

Rincian Utang Belanja Modal Gedung dan bangunan per SKPD disajikan pada lampiran 43

Tabel 7.5.3. 60 Daftar Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1	Dinas PU	1.888.392.024,00	2.881.163.633,00
2	Dinas Pertanian	75.581.450,00	75.581.450,00
3	RSUD	17.570.650,00	17.570.650,00
4	Dinas Koperindag	2.500.000,00	2.500.000,00
	Jumlah Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.984.044.124,00	2.976.815.733,00

Rincian Utang Belanja Modal Jalan Jarinngan, dan Irigasi per SKPD disajikan pada lampiran 44

7.5.3.2 A. e Utang Jangka Pendek Lainnya

2024 (Rp)	2023 (Rp)
10.719.000,00	10.719.000,00

Utang Jangka Pendek Lainnya digunakan untuk mencatat kelebihan penerimaan pendapatan Pemerintah Daerah.

Total Utang Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp10.719.000,00 tidak mengalami perubahan senilai Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp10.719.000,00.

Utang jangka pendek lainnya terdiri dari utang pada pihak ketiga dan utang retensi namun pada Tahun 2024 dilakukan reklasifikasi utang sesuai kode rekening.

Utang Jangka Pendek Lainnya terdiri dari Pengembalian Lebih salur dana BOS 2011.

Tabel 7.5.3. 61 Daftar Utang Jangka Pendek Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Utang pada Pihak Ketiga		
2	Utang Retensi		
3	BPKAD - Lebih Salur Dana BOS 2011	10.719.000,00	10.719.000,00
Jumlah		10.719.000,00	10.719.000,00

7.5.3.3 Ekuitas

2024 (Rp)	2023 (Rp)
2.173.700.376.240,38	2.181.278.491.148,53

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Pasangkayu pada kondisi waktu tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.

Total Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp2.173.700.376.240,38 menurun senilai Rp7.578.114.908,15 atau -0,35% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp2.181.278.491.148,53.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu telah menggunakan basis akrual, di mana ekuitas tidak lagi terbagi dalam ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Ekuitas disajikan senilai selisih antara aset dan kewajiban.

(dalam rupiah)

	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
Total Aset	2.185.957.858.441,94	2.197.799.881.523,43
Total Kewajiban	12.257.482.201,56	16.521.390.374,90
Ekuitas	2.173.700.376.240,38	2.181.278.491.148,53

7.5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

7.5.4 Kegiatan Operasional

7.5.4.1 Pendapatan Operasional- LO

2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan /(Penurunan) (Rp)
857.435.909.060,45	797.681.279.974,78	59.754.629.085,67

Pendapatan (LO) adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan (LO) menggunakan basis akrual. Pendapatan (LO) diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan (LO) diklasifikasikan menurut ekonomi antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan yang Sah, Surplus Non Operasional dan Pendapatan Luar Biasa.

Total Pendapatan Operasional- LO Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp857.435.909.060,45 meningkat senilai Rp59.754.629.085,67 atau 7,49% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp797.681.279.974,78.

Tabel 7.5.4. 1 Rincian Pendapatan - LO Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian		TA 2024	TA 2023
A	Pendapatan Asli Daerah – LO	64.999.500.624,73	62.042.554.580,49
B	Pendapatan Transfer – LO	728.150.707.458,00	714.620.971.682,00
C	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	64.285.700.977,72	21.017.753.712,29
JUMLAH PENDAPATAN – LO		857.435.909.060,45	797.681.279.974,78

7.5.4.1 A Pendapatan Asli Daerah – LO

2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan /(Penurunan) (Rp)
64.999.500.624,73	62.042.554.580,49	2.956.946.044,24

Pendapatan Asli Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang dikelola dan dipungut sendiri oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah. Pendapatan asli daerah diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

Total Pendapatan Asli Daerah - LO Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp64.999.500.624,73 meningkat senilai Rp2.956.946.044,24 atau 4,77% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp62.042.554.580,49.

Berdasarkan klasifikasi ekonomi, rincian Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah:

Tabel 7.5.4. 2 Rincian Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024
(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023
Pendapatan Pajak Daerah – LO	24.382.689.834,36	16.835.403.601,75
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	8.761.631.893,42	4.932.889.449,77
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	3.173.536.172,00	3.146.110.906,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO	28.681.642.724,95	37.128.150.622,97
JUMLAH PAD	64.999.500.624,73	62.042.554.580,49

7.5.4.1 A. a Pendapatan Pajak Daerah – LO

2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan /(Penurunan) (Rp)
24.382.689.834,36	16.835.403.601,75	7.547.286.232,61

Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasangkayu. Pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2024, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah senilai ketetapan yang diterbitkan pada tahun 2024 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan tahun 2024. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada pendapatan LRA.

Total Pendapatan Pajak Daerah - LO Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp24.382.689.834,36 meningkat senilai Rp7.547.286.232,61 atau 44,83% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp16.835.403.601,75.

Secara rinci, pendapatan pajak daerah - LO Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 7.5.4. 3 Rincian Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024
(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	Pajak Hotel – LO	189.557.467,00	79.002.500,00
2	Pajak Restoran – LO	1.341.228.876,36	739.769.967,00
3	Pajak Hiburan – LO	18.450.000,00	11.400.000,00
4	Pajak Reklame – LO	734.154.159,00	670.185.706,00
5	Pajak Penerangan Jalan – LO	9.313.703.823,00	8.366.798.492,00

No.	Uraian	TA 2024	TA 2023
6	Pajak Air Tanah – LO	11.830.000,00	9.180.000,00
7	Pajak Sarang Burung Walet – LO	14.650.909,00	9.200.000,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	7.816.582.407,00	4.301.252.853,75
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	2.306.780.207,00	2.099.967.696,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	2.635.751.986,00	548.646.387,00
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah – LO		24.382.689.834,36	16.835.403.601,75

Pendapatan pajak daerah - LO Tahun Anggaran 2024 senilai Rp24.382.689.834,36. Terdapat peningkatan senilai Rp1.417.521.052,00 dibandingkan dengan pendapatan pajak daerah - LRA senilai Rp22.965.168.782,36 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 7.5.4. 4 Penjelasan Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun Anggaran 2024
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Penerimaan pajak ke Kas Daerah T.A 2024 (LRA)	22.965.168.782,36
2	Ditambah: Saldo Akhir Piutang Pajak Tahun 2024	13.306.318.107,30
3	Ditambah: Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-
4	Ditambah: Koreksi Ekuitas kurang catat pengakuan piutang awal pajak batuan bukan logam dan batuan lainnya	11.646.909,00
5	Ditambah: Koreksi Ekuitas kurang catat pengakuan piutang awal pajak penerangan jalan	-
6	Dikurangi: Saldo Awal Piutang Pajak Tahun 2024	(11.900.443.964,30)
	Hak atas Pendapatan Pajak T.A. 2024	24.382.689.834,36

7.5.4.1 A. b Pendapatan Retribusi Daerah – LO

2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
8.761.631.893,42	4.932.889.449,77	3.828.742.443,65

Pendapatan Retribusi daerah pada Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dipungut dan dikelola oleh SKPD penghasil Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Pasangkayu didasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan besarnya retribusi daerah ditetapkan melalui Perda.

Total Pendapatan Retribusi Daerah - LO Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp8.761.631.893,42 meningkat senilai Rp3.828.742.443,65 atau 77,62% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp4.932.889.449,77.

Secara rinci, pendapatan retribusi daerah - LO Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 7.5.4. 5 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024
(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	7.505.768.391,58	3.387.333.045,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LO	510.258.000,00	300.962.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	53.000.000,00	50.000.000,00
4	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	10.700.000,00	-
5	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	-	470.427.600,00
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	204.248.242,84	456.949.079,77
7	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	201.765.000,00	195.590.000,00
8	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	13.511.500,00	-
9	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung – LO	262.380.759,00	71.627.725,00
Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah – LO		8.761.631.893,42	4.932.889.449,77

Retribusi daerah - LO Tahun Anggaran 2024 senilai Rp8.761.631.893,42. Terdapat peningkatan senilai Rp499.217.317,34 dibandingkan dengan pendapatan retribusi daerah - LRA senilai Rp8.262.414.576,08 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 7.5.4. 6 Penjelasan Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun Anggaran 2024
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Penerimaan retribusi ke Kas Daerah T.A 2024 (LRA)	8.262.414.576,08
2	Ditambah: Saldo Akhir Piutang Retribusi Tahun 2024	1.286.617.101,00
	Sewa Dibayar dimuka yang telah jatuh tempo	24.860.755,34
	Penerimaan dari Penyisihan Retribusi Persetujuan Gedung bangunan	49.745,00
3	Dikurangi: Saldo Awal Piutang Retribusi Tahun 2024	(812.310.284,00)
	Koreksi ekuitas saldo awal piutang IMB	
	Hak atas Pendapatan Retribusi T.A. 2024	8.761.631.893,42

7.5.4.1A. c Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan /(Penurunan) (Rp)
3.173.536.172,00	3.146.110.906,00	27.425.266,00

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan - LO adalah PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah.

Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pasangkayu.

Total Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp3.173.536.172,00 meningkat senilai Rp27.425.266,00 atau 0,87% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp3.146.110.906,00.

Secara rinci, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan - LO Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 7.5.4.7 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT Bank Sulselbar (BPD) – LO	3.173.536.172,00	3.146.110.906,00
Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO		3.173.536.172,00	3.146.110.906,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO Tahun Anggaran 2024 senilai Rp3.173.536.172,00. Terdapat penurunan senilai Rp0,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi daerah - LRA senilai Rp3.173.536.172,00:

7.5.4.1 A. d Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan /(Penurunan) (Rp)
28.681.642.724,95	37.128.150.622,97	(8.446.507.898,02)

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Total Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp28.681.642.724,95 menurun senilai Rp8.446.507.898,02 atau -22,75% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp37.128.150.622,97.

Secara rinci, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 7.5.4. 8 Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	Pendapatan dari Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	424.065.475,00	496.806.336,00
2	Pendapatan dari Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	376.798.983,00	378.390.149,00
3	Pendapatan dari Hasil Kerja Sama Daerah – LO	332.086.346,32	1.544.400.833,79
4	Penerimaan Jasa Giro - LO	1.945.383.482,72	2.014.771.186,00
5	Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility	-	-
6	Pendapatan Bunga- LO	19.373.475,00	47.886.005,13
7	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	-	95.600.665,14
8	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan - LO	442.323.102,49	2.667.073.850,89

No.	Uraian	TA 2024	TA 2023
9	Pendapatan dari Pengembalian -LO	803.423.910,00	343.627.906,00
10	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO	-	6.004.636.750,00
11	Pendapatan BLUD - LO	-	23.529.652.094,02
12	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	24.338.187.950,42	-
13	Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO	-	5.304.847,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO		28.681.642.724,95	37.128.150.622,97

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah - LO Tahun Anggaran 2024 senilai Rp28.681.642.724,95. Terdapat peningkatan senilai Rp1.981.465.194,53 dibandingkan dengan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah - LRA senilai Rp26.700.177.530,42 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 7.5.4. 9 Penjelasan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Penerimaan lain-lain PAD yang sah ke Kas Daerah T.A 2024 (LRA)	26.700.177.530,42
2	Ditambah: Piutang Hasil dari kerja sama dari Penyediaan Infrastruktur Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	 15.900.563,00 2.043.723.604,00 328.022,29
	Penyisihan Piutang Angsuran Perumahan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPBU dan BP Kelas 3	 19.750.975,00 412.983.200,00
3	Dikurangi: Piutang Pendapatan BLUD Pembayaran Uang Muka Pengadaan Barang Jasa Pembayaran Piutang MPTGR Pembayaran angsuran perumahan tahun 2024 Koreksi atas kekurangan volume berdasarkan temuan BPK Tahun lalu pada Dinas PUPR yang telah dikembalikan Koreksi atas kekurangan volume berdasarkan temuan BPK Tahun lalu pada Dinas PUPR yang telah dibayar seluruhnya Koreksi atas kekurangan volume berdasarkan temuan BPK Tahun lalu pada Dinas Pendidikan yang telah terbayar Koreksi atas kekurangan volume berdasarkan temuan BPK Tahun lalu pada RSUD yang seluruhnya telah dikembalikan	 (65.604.457,00) (22.797.038,00) (14.373.500,00) (31.032.000,00) (309.707.941,69) (15.963.698,54) (2.100.000,00) (49.642.534,53)
	Hak atas Lain-lain PAD yang sah T.A. 2024	28.681.642.724,95

7.5.4.1 B Pendapatan Transfer – LO

2024	2023	Kenaikan /(Penurunan)
(Rp)	(Rp)	(Rp)
728.150.707.458,00	714.620.971.682,00	13.529.735.776,00

Pendapatan transfer - LO merupakan pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu yang berasal dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi. Pendapatan transfer merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan transfer diakui Saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

Total Pendapatan Transfer - LO Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp728.150.707.458,00 meningkat senilai

Rp13.529.735.776,00 atau 1,89% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp714.620.971.682,00.

Berdasarkan klasifikasi ekonomi, rincian pendapatan transfer adalah:

Tabel 7.5.4. 10 Pendapatan Transfer - LO Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian		TA 2024	TA 2023
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	693.411.132.614,00	681.660.942.668,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO	-	-
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO	34.739.574.844,00	32.960.029.014,00
Jumlah Pendapatan Transfer - LO		728.150.707.458,00	714.620.971.682,00

7.5.4.1 B. a Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

2024	2023	Kenaikan /(Penurunan)
(Rp)	(Rp)	(Rp)
693.411.132.614,00	681.660.942.668,00	11.750.189.946,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun Anggaran 2024 senilai Rp702.930.494.672,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

Total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp693.411.132.614,00 meningkat senilai Rp11.750.189.946,00 atau 1,72% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp681.660.942.668,00.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO secara rinci adalah:

Tabel 7.5.4. 11 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	Dana Bagi Hasil Pajak - LO	7.894.708.000,00	10.086.359.000,00
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	12.220.098.000,00	13.856.534.850,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	496.999.363.000,00	473.350.213.036,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO	102.005.217.974,00	104.368.130.391,00
5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO	74.291.745.640,00	79.999.705.391,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO		693.411.132.614,00	681.660.942.668,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun Anggaran 2024 dijelaskan sebagai berikut:

7.5.4.1 B.a.1 Dana Bagi Hasil Pajak – LO

2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan /(Penurunan) (Rp)
7.894.708.000,00	10.086.359.000,00	(2.191.651.000,00)

Dana bagi hasil pajak merupakan hak telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun anggaran 2024 yang berupa bagi hasil PBB dan bagi hasil PPh.

Total Dana Bagi Hasil Pajak - LO Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp7.894.708.000,00 menurun senilai Rp2.191.651.000,00 atau -21,73% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp10.086.359.000,00.

Secara rinci, Dana bagi hasil pajak - LO Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 7.5.4. 12 Rincian Dana Bagi Hasil Pajak - LO Tahun Anggaran 2024
(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.832.617.000,00	7.630.274.000,00
2	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh)	2.062.091.000,00	2.425.118.000,00
3	Bagi Hasil dari Pajak (SDA Minerba)	-	30.967.000,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak - LO		7.894.708.000,00	10.086.359.000,00

Tabel 7.5.4. 13 Penjelasan Dana Bagi Hasil Pajak - LO Tahun Anggaran 2024
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak LRA T.A 2024	9.531.487.000,00
2	Ditambah: Pendapatan DBH-PBB yang dipotong dan disimpan di rekening TDF	48.205.000,00
	Pendapatan DBH-PBB yang dipotong dan disimpan di rekening TDF	-
3	Pendapatan DBH-SDA Minerba luran tetap dan SDA Minerba Royalti yang dipotong dan disimpan di rekening TDF	-
	Dikurangi: Pendapatan DBH-PBB yang dipotong dan disimpan di rekening TDF	(1.290.033.000,00)
	Pendapatan DBH-PPh Pasal 21 yang dipotong dan disimpan di rekening TDF	(394.459.000,00)
	Pendapatan DBH-PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 yang dipotong dan disimpan di rekening TDF	(492.000,00)
	Hak atas Dana Bagi Hasil Pajak T.A. 2024	7.894.708.000,00

7.5.4.1 B.a.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO

2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan /(Penurunan) (Rp)
12.220.098.000,00	13.856.534.850,00	(1.636.436.850,00)

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO merupakan hak telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun anggaran 2024 yang berupa bagi hasil dari SDA Mineral dan Batubara, Kehutanan, Perikanan dan Migas.

Total Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp12.220.098.000,00 menurun senilai Rp1.636.436.850,00 atau -11,81% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp13.856.534.850,00.

Secara rinci, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 7.5.4. 14 Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	58.128.000,00	2.728.000,00
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan-PSDH-LO	1.000,00	7.361.850,00
3	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan-DR-LO	-	11.634.633.000,00
4	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	1.884.618.000,00	2.211.812.000,00
5	DBH Sawit	10.277.351.000,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO		12.220.098.000,00	13.856.534.850,00

Total Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp12.220.098.000,00 menurun senilai Rp27.152.000,00 dibandingkan LRA senilai Rp12.192.946.000,00.

Tabel 7.5.4. 15 Penjelasan Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Penerimaan Dana Bagi Hasil SDA-LRA T.A 2024	12.192.946.000,00
2	Ditambah: Penerimaan TDF-SDA Mineral dan Batubara Landrent Penerimaan TDF-SDA Mineral dan Batubara Royalti Penerimaan TDF-SDA Mineral dan Batubara	5.953.000,00 52.165.000,00 1.000,00
3	Dikurangi: Penerimaan TDF-SDA Mineral dan Batubara	- (30.967.000,00)
	Hak atas Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO T.A. 2024	12.220.098.000,00

7.5.4.1 B.a.3 Dana Alokasi Umum (DAU) – LO

2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan /(Penurunan) (Rp)
496.999.363.000,00	473.350.213.036,00	23.649.149.964,00

Dana Alokasi Umum (DAU) - LO merupakan hak telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun anggaran 2024 yang berupa dana alokasi umum.

Total Dana Alokasi Umum (DAU) - LO Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp496.999.363.000,00 meningkat senilai Rp23.649.149.964,00 atau 5,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp473.350.213.036,00.

Secara rinci, Dana Alokasi Umum (DAU) - LO Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 7.5.4. 16 Rincian Dana Alokasi Umum (DAU) - LO Tahun Anggaran 2024
(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	496.999.363.000,00	473.350.213.036,00
Jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) - LO		496.999.363.000,00	473.350.213.036,00

Tidak terdapat perbedaan antara jumlah Pendapatan Dana Alokasi Umum - LO dengan Dana Alokasi Umum - LRA.

7.5.4.1 B.a.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO

2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan /(Penurunan) (Rp)
102.005.217.974,00	104.368.130.391,00	(2.362.912.417,00)

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO merupakan hak telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun anggaran 2024 yang berupa dana alokasi khusus pada 11 bidang.

Total Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp102.005.217.974,00 menurun senilai Rp2.362.912.417,00 atau -2,26% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp104.368.130.391,00.

Secara rinci, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 7.5.4. 17 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO Tahun Anggaran 2024
(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LO	27.510.734.000,00	40.232.823.500,00
2	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum - LO	14.347.162.629,00	7.259.582.000,00
3	DAK Bidang Sanitasi-Penugasan-LO	6.109.707.000,00	10.104.297.000,00
4	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	2.803.155.600,00	-
5	DAK Bidang Kesehatan - LO	33.335.924.077,00	24.413.918.135,00
6	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LO	3.582.671.176,00	-
7	DAK Bidang Pendidikan - LO	14.315.863.492,00	22.357.509.756,00
8	DAK Bidang Transportasi	-	-
Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO		102.005.217.974,00	104.368.130.391,00

Tidak terdapat perbedaan antara jumlah Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA.

7.5.4.1 B.a.5 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO

2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan /(Penurunan) (Rp)
74.291.745.640,00	79.999.705.391,00	(5.707.959.751,00)

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO merupakan hak telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun anggaran 2024 yang berupa dana alokasi khusus pada 10 bidang.

Total Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp74.291.745.640,00 menurun senilai Rp5.707.959.751,00 atau -7,13% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp79.999.705.391,00.

Secara rinci, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 7.5.4. 18 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	25.768.895.392,00	25.504.883.455,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	1.235.000.000,00	980.000.000,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	26.982.795.000,00	25.276.435.136,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	1.412.250.000,00	1.086.250.000,00
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	2.200.653.000,00	2.277.481.000,00
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	756.500.000,00	1.423.650.000,00
7	DAK -BOKKB-BOK-LO	1.584.616.999,00	17.611.451.613,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan-LO	118.469.500,00	-
9	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	3.561.088.000,00	3.672.166.600,00
10	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	388.715.450,00	510.062.327,00
11	DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	628.534.166,00	1.109.733.400,00
12	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	526.823.000,00	166.653.750,00
13	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	380.938.110,00
14	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas-LO	9.127.405.133,00	-
Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO		74.291.745.640,00	79.999.705.391,00

Tidak terdapat perbedaan antara jumlah Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA.

7.5.4.1 B.b Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LO

2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan /(Penurunan) (Rp)
-	-	-

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LO yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Pasangkayu. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

Total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LO Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp0,00 menurun senilai Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LO secara rinci adalah:

Tabel 7.5.4. 19 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LO Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	Dana Penyesuaian - LO	-	-
2	Dana Desa - LO	-	-
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LO		-	-

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LO tersebut dijelaskan sebagai berikut:

7.5.4.1 B.b.1 Dana Penyesuaian – LO

2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
-	-	-

Dana Penyesuaian - LO merupakan hak telah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun anggaran 2024 berupa Dana Insentif Daerah.

Total Dana Penyesuaian - LO Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp0,00 menurun senilai Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00.

Secara rinci, Dana Penyesuaian - LO Tahun Anggaran 2024 dan Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 7.5.4. 20 Rincian Dana Penyesuaian - LO Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	Dana Insentif Daerah	-	-
Jumlah Dana Penyesuaian - LO		-	-

Tidak Terdapat Perbedaan Pendapatan Dana Penyesuaian - LO dengan Dana Penyesuaian - LRA.

7.5.4.1 B.b.2 Dana Desa – LO

2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
-	-	-

Berdasarkan Bultek No 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua, pada Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Pasangkayu tidak mencatat penerimaan dana desa sebagai penerimaan pada Laporan Operasional. Hal ini dikarenakan dana dimaksud merupakan hak desa untuk memanfaatkannya, sedangkan Pemerintah

Kabupaten Pasangkayu sebagai penampung sementara sebelum disalurkan. Kinerja pemanfaatan dana desa ada pada desa, bukan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.

Dana Desa masih disajikan pada LRA hal ini berkaitan dengan penganggaran walaupun sudah tidak masuk ke rekening kas daerah, sehingga terdapat perbedaan antara saldo dana desa - LO dengan dana desa - LRA senilai jumlah dana desa yang disalurkan dari rekening kas umum negara ke rekening Desa yaitu senilai Rp53.799.805.000,00.

7.5.4.1 B.c Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO

2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan /(Penurunan) (Rp)
34.739.574.844,00	32.960.029.014,00	1.779.545.830,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Pasangkayu yang berupa Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi Sulawesi Barat. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

Total Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp34.739.574.844,00 meningkat senilai Rp1.779.545.830,00 atau 5,40% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp32.960.029.014,00.

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO secara rinci adalah:

Tabel 7.5.4. 21 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi- LO Tahun Anggaran 2024

<i>(dalam rupiah)</i>		
Uraian	TA 2024	TA 2023
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	34.739.574.844,00	32.672.529.014,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi – LRA	-	287.500.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LRA	34.739.574.844,00	32.960.029.014,00
Penambahan :		
Penerimaan Kembali Penyisihan Piutang	-	-
Pengurangan :		
Penerimaan Piutang DBH Tahun Sebelumnya	-	-
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO	34.739.574.844,00	32.960.029.014,00

Tidak terdapat perbedaan antara Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 senilai Rp34.739.574.844,00 dibandingkan LRA senilai Rp34.739.574.844,00.

7.5.4.1 C Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan /(Penurunan) (Rp)
64.285.700.977,72	21.017.753.712,29	43.267.947.265,43

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO merupakan pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu yang berasal dari Hibah dan Pendapatan lainnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan transfer diakui Saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

Total Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp64.285.700.977,72 meningkat senilai Rp43.267.947.265,43 atau 205,86% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp21.017.753.712,29.

Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO adalah:

Tabel 7.5.4. 22 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO Tahun Anggaran 2024
(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	Pendapatan Hibah - LO	57.730.162.669,72	21.017.753.712,29
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	6.555.538.308,00	-
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO		64.285.700.977,72	21.017.753.712,29

a) Pendapatan Hibah – LO

Pendapatan Hibah merupakan hak yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu pada Tahun 2024 yang terdiri dari Hibah berupa Uang maupun Barang. Pendapatan Hibah diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan Hibah secara rinci adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.4. 23 Rincian Pendapatan Hibah - LO Tahun Anggaran 2024
(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	53.470.186.797,00	13.897.968.400,00
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	3.232.396.077,72	6.545.113.237,29
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri	291.450.000,00	45.000.095,00
4	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	736.129.795,00	529.671.980,00
Jumlah Pendapatan Hibah - LO		57.730.162.669,72	21.017.753.712,29

Pendapatan hibah - LO Tahun Anggaran 2024 senilai Rp57.730.162.669,72. Terdapat peningkatan senilai Rp57.730.162.669,72 dibandingkan dengan Lain-lain pendapatan hibah - LRA senilai Rp0,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah :

- Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan senilai	14.311.826.000,00
-Peralatan Personal Computer Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan senilai	1.800.000,00
-Personal Computer Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan senilai	17.700.000,00
- Dinas Lingkungan Hidup Bangunan Penampung Sampah senilai	844.357.000,00
- Dinas Umum dan Penataan Ruang Excavator senilai	4.490.475.000,00
- Dinas Umum dan Penataan Ruang Jembatan pada Jalan Kabupaten senilai	12.329.205.857,00
- Dinas Umum dan Penataan Ruang Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya senilai	21.474.822.940,00
Jumlah	53.470.186.797,00

Rincian Pendapatan Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Dalam Negeri:

-Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Hibah Obat Kontrasepsi dari pemerintah daerah senilai	603.815.988,00
- Hibah Persediaan Bahan Obat-obatan Dinkes senilai	2.628.580.089,72
Jumlah	3.232.396.077,72

Rincian Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri :

- Alat Pendingin Sekretariat Daerah senilai	4.000.000,00
- Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Dinas Lingkungan Hidup berupa Kontainer sampah senilai	167.750.000,00
- Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Dinas Lingkungan Hidup berupa Kontainer sampah senilai	45.000.000,00
- Pagar Kecamatan Baras senilai	74.700.000,00
Jumlah	291.450.000,00

Tabel 7.5.4. 24 Penjelasan Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2024*(dalam rupiah)*

	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Hibah T.A 2024 (LRA)	-
2	Ditambah:	
	Hibah dari Pemerintah Pusat:	
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah (Koperindag) 14.331.326.000,00	
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah (DLH) 844.357.000,00	
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah (PUPR) 38.294.503.797,00	
	Hibah dari Pemerintah Daerah:	
	Persediaan Obat-obatan 2.628.580.089,72	
	Persediaan Obat-obatan, Alat Lab 603.815.988,00	

	Uraian	Jumlah
	Hibah dari Badan /Lembaga /Organisasi dalam Negeri:	
	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri (DLH)	212.750.000,00
	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri (SEKDA)	4.000.000,00
	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri (Kec. Baras)	74.700.000,00
	Sumbangan Pihak Ketiga	736.129.795,00
	Jumlah Hibah Dari Pemerintah	57.730.162.669,72
	Hak atas Pendapatan Hibah - LO T.A. 2024	57.730.162.669,72

b) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO

Pendapatan Lainnya - LO merupakan hak yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu pada Tahun 2024 yang berupa sumbangan pihak ketiga serta pendapatan lain-lain yang diakibatkan dari penghapusan utang. Pendapatan Lainnya - LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan Lainnya - LO secara rinci adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.4. 25 Rincian Pendapatan Lainnya - LO Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	6.555.538.308,00	-
Jumlah Pendapatan Lainnya - LO		6.555.538.308,00	-

Tabel 7.5.4. 26 Penjelasan Pendapatan Lainnya - LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Penerimaan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP T.A 2024 (LRA)	6.555.538.308,00
	Ditambah:	-
	Dikurangi:	-
Hak atas Pendapatan Lainnya - LO TA 2024		6.555.538.308,00

7.5.4.2 Beban Operasional

2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)
(Rp)	(Rp)	(Rp)
863.077.636.619,15	801.616.340.921,36	61.461.295.697,79

Beban Operasional adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional

pemerintah selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis beban), antara lain Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, Beban Lain-lain, Beban Bantuan Keuangan, dan Beban Transfer.

Beban diakui pada saat:

1. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Terjadinya konsumsi aset.
3. Timbulnya kewajiban.

Total Beban Operasional Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp863.077.636.619,15 meningkat senilai Rp61.461.295.697,79 atau 7,67% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp801.616.340.921,36.

Rincian beban dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7.5.4. 27 Rincian Beban Operasional Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian		TA 2024	TA 2023
A.	Beban Pegawai	299.324.656.215,00	278.095.975.439,00
B.	Beban Barang dan Jasa	235.070.376.812,84	215.615.614.242,96
C.	Beban Hibah	36.270.633.627,30	32.344.470.524,00
D.	Beban Bantuan Sosial	338.000.000,00	390.000.000,00
E.	Beban Bantuan Keuangan	-	-
F.	Beban Bagi Hasil	-	-
G.	Beban Penyusutan	239.463.744.380,00	225.669.161.180,00
H.	Beban Penyisihan Piutang	908.320.161,01	403.894.011,40
I.	Beban Lain-lain	-	-
J.	Beban Transfer	51.701.905.423,00	49.097.225.524,00
Jumlah Beban		863.077.636.619,15	801.616.340.921,36

7.5.4.2 A. Beban Pegawai

2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)
(Rp)	(Rp)	(Rp)
299.324.656.215,00	278.095.975.439,00	21.228.680.776,00

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 baik yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu maupun yang masih berupa kewajiban membayar.

Beban pegawai-LO disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai-LO senilai belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2024 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2024.

Total Beban Pegawai Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp299.324.656.215,00 meningkat senilai Rp21.228.680.776,00 atau 7,63% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp278.095.975.439,00.

Rincian Beban Pegawai adalah:

Tabel 7.5.4. 28 Beban Pegawai Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

	Uraian	TA 2024	TA 2023
a.	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	236.163.223.941,00	212.025.395.885,00
b.	Beban Tambahan Penghasilan PNS – LO	12.144.685.427,00	12.759.698.957,00
c.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.700.279.190,00	11.277.794.566,00
d.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	283.725.985,00	264.771.039,00
e.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH – LO	334.624.000,00	459.360.000,00
f.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	39.665.357.129,00	32.399.437.992,00
g.	Beban Pegawai BOS - LO	-	8.909.517.000,00
h.	Beban Pegawai BLUD - LO	32.760.543,00	-
	Jumlah Beban Pegawai	299.324.656.215,00	278.095.975.439,00

Tabel 7.5.4. 29 Penjelasan Rincian Beban Pegawai- LO Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Penerimaan Belanja Pegawai-LRA T.A 2024	298.942.450.068,00
2	Ditambah:	
	Beban Pegawai BLUD	32.760.543,00
	Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	109.011.961,00
	Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	19.825.096,00
	Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	186.500,00
	Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	32.545,00
	Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	820.821,00
	Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	259.322.041,00
	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	131.847.587,00
3	Dikurangi:	-
	Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	(104.826.352,00)
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	(17.561.225,00)
	Iuran Jaminan Kesehatan PNS	(49.213.370,00)
	Jumlah Beban Pegawai	299.324.656.215,00

7.5.4.2 B. Beban Barang dan Jasa

2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)
(Rp)	(Rp)	(Rp)
235.070.376.812,84	215.615.614.242,96	19.454.762.569,88

Beban Barang dan Jasa merupakan saldo Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 baik yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu maupun yang masih berupa kewajiban membayar.

Beban barang dan jasa disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban barang dan jasa senilai belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2024 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja barang dan jasa tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja barang dan jasa yang terjadi pada tahun 2024.

Total Beban Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp235.070.376.812,84 meningkat senilai Rp19.454.762.569,88 atau 9,02% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp215.615.614.242,96.

Beban barang dan jasa mencakup beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas. Rincian Beban barang dan jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.4. 30 Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024
(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
a.	Beban Persediaan	30.832.754.963,47	28.036.094.696,94
b.	Beban Jasa	153.040.828.669,37	135.629.184.409,02
c.	Beban Pemeliharaan	8.430.857.196,00	6.948.990.488,00
d.	Beban Perjalanan Dinas	42.765.935.984,00	45.001.344.649,00
Jumlah Beban Barang dan Jasa		235.070.376.812,84	215.615.614.242,96

7.5.4.2 B.a. Beban Persediaan

2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)
(Rp)	(Rp)	(Rp)
30.832.754.963,47	28.036.094.696,94	2.796.660.266,53

Beban Persediaan merupakan saldo Beban Persediaan periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Beban persediaan-LO disajikan dengan basis akrual, yaitu beban persediaan dicatat senilai pemakaian persediaan (*use of goods*). Dengan penggunaan metode fisik maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode masuk pertama keluar pertama (MPKP atau FIFO).

Total Beban Persediaan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp30.832.754.963,47 meningkat senilai Rp2.796.660.266,53 atau 9,98% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp28.036.094.696,94.

Rincian beban persediaan yaitu sebagai berikut:

Tabel 7.5.4. 31 Rincian Beban Persediaan Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	Beban Bahan Pakai Habis	12.020.161.700,15	16.913.687.255,88
2	Beban Persediaan Bahan/ Material	6.859.739.471,10	4.796.771.559,00
3	Beban Cetak dan Penggandaan	2.003.543.883,52	2.677.705.576,06
4	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	684.572.200,00	381.910.500,00
5	Beban Pakaian Kerja	633.005.845,00	76.293.600,00
6	Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.244.825.710,00	1.147.020.955,00
7	Beban Uang Untuk diberikan kepada Pihak ketiga/Masyarakat	7.386.906.153,70	2.042.705.251,00
Jumlah Beban Persediaan		30.832.754.963,47	28.036.094.696,94

Beban persediaan - LO Tahun Anggaran 2024 senilai Rp30.832.754.963,47. Terdapat peningkatan senilai Rp2.187.139.530,37 dibandingkan dengan belanja persediaan - LRA senilai Rp28.645.615.433,10 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 7.5.4. 32 Penjelasan Beban Persediaan Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja-belanja yang terkait dengan perolehan persediaan pada LRA:	
	Belanja Bahan Pakai Habis	11.243.462.940,00
	Belanja Bahan/Material	6.744.338.519,10
	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.871.759.419,00
	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	684.572.200,00
	Belanja Pakaian Kerja	633.005.845,00
	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1.244.825.710,00
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	6.223.650.800,00
	Jumlah Belanja	28.645.615.433,10
2	Ditambah:	
	Saldo Awal Persediaan	12.825.095.041,42
	Mutasi Penambahan Persediaan:	3.232.396.077,72
	Hibah Persediaan Bahan Obat-obatan Dinkes	2.628.580.089,72
	Hibah Persediaan Bahan Obat-obatan Habis KB	603.815.988,00
	Mutasi Penambahan Beban Persediaan:	152.242.661,00
	Realisasi Belanja Modal Ekstra Komptabel	17.225.660,00
	Realisasi Belanja Modal Ekstra Komptabel	1.594.404,00
	Realisasi Belanja Modal Ekstra Komptabel	1.673.325,00
	Realisasi Belanja Modal Ekstra Komptabel	1.796.320,00
	Bahan Perpustakaan Tercetak-buku umum (Diknas) - Ekstra Komptabel	79.416.423,00
	Peralatan Personal Komputer (Diknas) - Ekstra Komptabel	612.529,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	49.924.000,00

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah Penambahan	16.209.733.780,14
3	Dikurangi:	
	Saldo Akhir Persediaan	9.584.070.863,77
	Mutasi Pengurangan Persediaan:	4.438.523.386,00
	Pembayaran Utang Obat & BMHP Dinkes	959.713.070,00
	Pembayaran Utang Obat RSUD	3.470.116.816,00
	Pembayaran Utang Alat Kedokteran (Dinkes)	8.039.000,00
	Koreksi ekuitas saldo awal persediaan obat	654.500,00
	Jumlah Pengurangan	14.022.594.249,77
	Jumlah Beban Persediaan	30.832.754.963,47

7.5.4.2 B.b. Beban Jasa

2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)
(Rp)	(Rp)	(Rp)
153.040.828.669,37	135.629.184.409,02	17.411.644.260,35

Beban Jasa merupakan saldo Beban Jasa periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Beban Jasa disajikan dengan basis akrual, yaitu beban jasa dicatat senilai pemakaian jasa (*use of services*). Beban Jasa terdiri dari beban jasa kantor, beban sewa, beban makanan dan minuman, dan beban jasa konsultasi. Termasuk juga beban untuk honorarium, uang lembur, beasiswa pendidikan PNS, serta Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan lainnya.

Total Beban Jasa Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp153.040.828.669,37 meningkat senilai Rp17.411.644.260,35 atau 12,84% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp135.629.184.409,02.

Rincian beban jasa disajikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.4. 33 Rincian Beban Jasa Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	Beban Jasa Kantor	62.364.992.191,00	57.325.089.699,00
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	12.792.382.478,00	10.276.596.610,00
3	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.316.381.946,47	4.716.629.690,31
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.144.771.500,00	1.523.960.306,00
5	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	37.500.000,00	-
6	Beban Makanan dan Minuman	17.168.580.417,00	16.530.755.911,00
7	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	49.950.000,00	-
8	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	-	1.236.597.000,00
9	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	99.926.000,00	-
10	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.318.189.148,00	1.336.180.003,00
11	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah	29.035.006,00	86.181.746,71
12	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.582.777.700,00	1.709.292.100,00

13	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	1.126.636.864,90	1.122.000.000,00
14	Beban Barang Dan Jasa Dana Bos	15.898.007.691,00	13.757.723.950,00
15	Beban Barang dan Jasa BOSP	7.178.560.500,00	-
16	Beban Barang dan Jasa BLUD	25.933.137.227,00	26.008.177.393,00
Jumlah Beban Jasa		153.040.828.669,37	135.629.184.409,02

Beban jasa - LO Tahun Anggaran 2024 senilai Rp153.040.828.669,37. Terdapat peningkatan senilai Rp4.940.259.003,47 dibandingkan dengan belanja jasa - LRA senilai Rp148.100.569.665,90 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 7.5.4. 34 Penjelasan Beban Jasa Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian		Jumlah
1	Belanja-belanja yang terkait dengan perolehan jasa pada LRA:		
	Belanja Jasa Kantor		60.556.367.044,00
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi		12.518.596.526,00
	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir		4.980.659.000,00
	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin		2.144.771.500,00
	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya		37.500.000,00
	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi		99.926.000,00
	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS		1.270.322.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman		17.168.580.417,00
	Belanja Barang dan Jasa BLUD		23.829.729.169,00
	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS		76.902.154,00
	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		1.582.777.700,00
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat		1.126.636.864,90
	Belanja Barang Dan Jasa dana Bos		22.707.801.291,00
	Jumlah Belanja		148.100.569.665,90
2	Ditambah:		
	Saldo Awal Beban Sewa Di Bayar Di Muka	653.806.803,80	
	Utang Jasa Listrik	368.508.145,00	
	Utang Jasa Pelayanan Non ASN	2.090.539.543,00	
	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud direklas dari Belanja Modal ATB	49.950.000,00	
	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	5.448.431.432,00	
	Pembayaran Piutang dari Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	153.084.400,00	
	Reklas dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	368.766.900,00	
	Jumlah Penambahan		9.133.087.223,80
3	Dikurangi:		
	Saldo Akhir Beban Sewa Di Bayar Di Muka	318.083.857,33	
	Pelunasan Utang Jasa Listrik	319.086.314,00	
	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	3.345.023.374,00	
	Utang Jasa Pelayanan Non ASN	210.634.675,00	
	Jumlah Pengurangan		(4.192.828.220,33)
Jumlah Beban Jasa T.A. 2024			153.040.828.669,37

untuk mendapatkan nilai beban jasa tahun 2024 maka belanja yang terkait dengan beban jasa yang terealisasi selama tahun 2024 ditambahkan dan dikurangkan dengan transaksi non kas antara lain saldo awal beban sewa dibayar dimuka yang telah dimanfaatkan seluruhnya pada tahun ini, pengakuan beban atas sewa baru, kemudian dikurangi dengan sisa sewa dibayar dimuka yang masih menjadi aset, demikian pula belanja barang untuk membayar utang

jangka pendek dijadikan pengurang untuk beban karena telah dicatat menjadi beban di laporan tahun sebelumnya.

7.5.4.2 B.c. Beban Pemeliharaan

2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)
(Rp)	(Rp)	(Rp)
8.430.857.196,00	6.948.990.488,00	1.481.866.708,00

Beban Pemeliharaan merupakan saldo Beban Pemeliharaan periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Beban Pemeliharaan disajikan dengan basis akrual, yaitu beban pemeliharaan dicatat senilai pemakaian jasa pemeliharaan (*use of services*). Beban Pemeliharaan terdiri dari beban perawatan kendaraan bermotor, beban pemeliharaan termasuk yang berasal dari belanja modal yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap (*revenue expenditure*).

Total Beban Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp8.430.857.196,00 meningkat senilai Rp1.481.866.708,00 atau 21,32% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp6.948.990.488,00.

Rincian saldo beban pemeliharaan disajikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.4. 35 Rincian Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	Beban Pemeliharaan	8.430.857.196,00	6.948.990.488,00
Jumlah Beban Pemeliharaan		8.430.857.196,00	6.948.990.488,00

Beban Pemeliharaan - LO Tahun Anggaran 2024 senilai Rp8.430.857.196,00. Terdapat peningkatan senilai Rp478.556.422,00 dibandingkan dengan belanja Pemeliharaan - LRA senilai Rp7.952.300.774,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 7.5.4.36 Penjelasan Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja-belanja yang terkait dengan pemeliharaan pada LRA:	
	Belanja Pemeliharaan	7.952.300.774,00
	Jumlah Belanja	7.952.300.774,00
2	Ditambah:	
	Pemeliharaan Komputer (Kominfo)	22.500.000,00
	Pemeliharaan Bangunan pembuang air kotor (PUPR)	188.695.541,00
	Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air (PUPR)	102.988.811,00
	Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air (PUPR)	99.017.140,00
	Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan (PUPR)	93.377.044,00
	Jumlah Penambahan	506.578.536,00

No	Uraian		Jumlah
3	Dikurangi:		
	Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan (Diknas)	28.022.114,00	
Jumlah Pengurangan			(28.022.114,00)
Jumlah Beban Pemeliharaan T.A. 2024			8.430.857.196,00

7.5.4.2 B.d. Beban Perjalanan Dinas

2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)
(Rp)	(Rp)	(Rp)
42.765.935.984,00	45.001.344.649,00	(2.235.408.665,00)

Total Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp42.765.935.984,00 menurun senilai Rp2.235.408.665,00 atau -4,97% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp45.001.344.649,00.

Tabel 7.5.4. 37 Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	Beban Perjalanan Dinas	42.765.935.984,00	45.001.344.649,00
Jumlah Beban Perjalanan Dinas		42.765.935.984,00	45.001.344.649,00

7.5.4.2 C. Beban Hibah

2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)
(Rp)	(Rp)	(Rp)
36.270.633.627,30	32.344.470.524,00	3.926.163.103,30

Beban Hibah merupakan saldo Beban Hibah periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang berupa transfer dalam bentuk uang, bersifat tidak wajib yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya.

Beban hibah disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban hibah terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban hibah senilai naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) pada tahun 2024.

Total Beban Hibah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp36.270.633.627,30 meningkat senilai Rp3.926.163.103,30 atau 12,14% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp32.344.470.524,00. Rincian Beban Hibah adalah:

Tabel 7.5.4. 38 Beban Hibah Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
a.	Beban Hibah kepada Pemerintah	1.340.623.000,00	2.343.229.000,00
b.	Beban Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	-	-
c	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	29.134.587.022,30	27.099.565.488,00

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
d	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	-	-
e	Beban Hibah Dana BOSP	5.299.725.592,00	2.386.429.132,00
f	Beban Hibah Keuangan Kepada Partai Politik	495.698.013,00	515.246.904,00
Jumlah Beban Hibah		36.270.633.627,30	32.344.470.524,00

Beban hibah - LO Tahun Anggaran 2024 senilai Rp36.270.633.627,30. Terdapat penurunan senilai -Rp554.402.518,70 dibandingkan dengan belanja hibah - LRA senilai Rp36.825.036.146,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 7.5.4. 39 Penjelasan Beban Hibah Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja-belanja yang terkait dengan belanja hibah pada LRA:	
	Belanja Hibah kepada Pemerintah	1.390.547.000,00
	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	29.639.065.541,00
	Belanja Hibah Dana Bos	5.299.725.592,00
	Belanja Hibah Keuangan Kepada Partai Politik	495.698.013,00
	Jumlah Belanja	36.825.036.146,00
	Penambahan:	
	Koreksi atas kurang catat Utang Hibah CV. Karya Persada di Dinas PU	21.593.550,00
	Jumlah Penambahan	21.593.550,00
2	Dikurangi:	
	Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	505.794.415,00
	Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	20.277.653,70
	Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	49.924.000,00
	Jumlah Pengurangan	(575.996.068,70)
	Jumlah Beban Hibah T.A. 2024	36.270.633.627,30

Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia - LO dengan rincian beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan belum termasuk tambahan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini senilai Rp81.000.000,00 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 177/P/2024 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 3/P/2024 Tentang satuan biaya, penerima dana dan besaran alokasi dana bantuan operasional penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini reguler, dana bantuan operasional sekolah reguler dan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan Tahun 2024.

7.5.4.2 D. Beban Bantuan Sosial

2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)
(Rp)	(Rp)	(Rp)
338.000.000,00	390.000.000,00	(52.000.000,00)

Beban Bantuan Sosial merupakan saldo Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang berupa uang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.

Beban Bantuan Sosial disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban bantuan sosial terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban bantuan sosial senilai nilai ketetapan pemberian bantuan sosial pada tahun 2024.

Total Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp338.000.000,00 menurun senilai Rp52.000.000,00 atau -13,33% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp390.000.000,00. Rincian Beban Bantuan Sosial adalah:

Tabel 7.5.4. 40 Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
a.	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	238.000.000,00	240.000.000,00
b.	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	100.000.000,00	150.000.000,00
Jumlah Beban Bantuan Sosial		338.000.000,00	390.000.000,00

Sama halnya dengan beban bantuan sosial pada LO, realisasi belanja bantuan sosial pada LRA juga Rp338.000.000,00.

7.5.4.2 E. Beban Bantuan Keuangan

2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)
(Rp)	(Rp)	(Rp)
-	-	-

Beban Bantuan Keuangan merupakan saldo Beban Bantuan Keuangan periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang berupa uang atau barang serta jasa yang diberikan partai politik dan kelompok masyarakat.

Beban Bantuan Keuangan disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban bantuan keuangan terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban bantuan keuangan senilai nilai tagihan atas ketetapan pemberian bantuan keuangan pada tahun 2024.

Total Beban Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00.

Tabel 7.5.4. 41 Beban Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
a.	Beban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	-	-
Jumlah Beban Bantuan Keuangan		-	-

Tidak ada perbedaan antara beban bantuan keuangan pada LO dengan realisasi belanja bantuan keuangan pada LRA.

7.5.4.2 F. Beban Bagi Hasil

2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)
(Rp)	(Rp)	(Rp)
-	-	-

Beban Bagi Hasil merupakan saldo Beban Bagi Hasil periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang berupa pembagian Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dialokasikan untuk Pemerintah Desa sesuai dengan amanat peraturan perundangan.

Beban Bagi Hasil disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban bantuan keuangan terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban bantuan keuangan senilai nilai tagihan atas ketetapan pemberian bantuan keuangan pada tahun 2024.

Total Beban Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00.

Rincian Beban Bagi Hasil adalah:

Tabel 7.5.4. 42 Beban Bagi Hasil Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
a.	Beban Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Pemerintah Desa	-	-
Jumlah Beban Bantuan Keuangan		-	-

7.5.4.2 G. Beban Penyusutan dan Amortisasi

2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)
(Rp)	(Rp)	(Rp)
239.463.744.380,00	225.669.161.180,00	13.794.583.200,00

Beban Penyusutan merupakan saldo Beban Penyusutan periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yaitu alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan menunjukkan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Beban penyusutan dihitung dengan metode garis lurus (*straight line method*) per bulan.

Beban Amortisasi merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tidak berwujud selama masa manfaat aset tersebut sesuai dengan kebijakan Akuntansi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.

Total Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp239.463.744.380,00 meningkat senilai Rp13.794.583.200,00 atau 6,11% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp225.669.161.180,00. Rincian Beban Penyusutan adalah:

Tabel 7.5.4. 43 Beban Penyusutan Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
I	Beban Penyusutan Aset Tetap	239.274.041.462,00	225.448.737.375,00
a.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	45.415.506.763,00	64.905.934.272,00
b.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	57.511.867.762,00	45.498.561.954,00
c.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	135.715.523.224,00	114.413.097.436,00
d.	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	7.535.500,00	7.535.500,00
e.	Beban Penyusutan Properti Investasi	623.608.213,00	623.608.213,00
II	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	189.702.918,00	220.423.805,00
III	Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	-
	Jumlah Beban Penyusutan	239.463.744.380,00	225.669.161.180,00

Jumlah beban penyusutan aset tetap seharusnya sebanding dengan kenaikan saldo akumulasi penyusutan aset tetap pada Neraca. Namun pada Tahun 2024, terdapat transaksi-transaksi yang mengakibatkan adanya perbedaan antara beban penyusutan tahun 2024 dengan kenaikan akumulasi penyusutan aset tetap. Penjelasan atas selisih beban penyusutan dengan perubahan akumulasi aset tetap disajikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.4. 44 Penjelasan Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Kenaikan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Neraca	208.601.299.620,35
2	Ditambah:	
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin direklas ke Aset Lain-lain	26.653.098.911,65
	Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan yang direklas ke aset lainnya	3.392.258.964,00
	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak ketiga	623.608.213,00
	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	189.702.918,00
	Koreksi atas kekurangan volume berdasarkan temuan BPK Tahun lalu pada Dinas PUPR	3.521.800,00
	Koreksi atas kekurangan volume berdasarkan temuan BPK Tahun lalu pada Dinas PUPR	66.516,00
	Koreksi atas kekurangan volume berdasarkan temuan BPK Tahun lalu pada Dinas PUPR)	187.437,00
	Jumlah Penambahan	30.862.444.759,65
3	Dikurangi:	
	-	-
	Jumlah Pengurangan	-
	Jumlah Beban Penyusutan Aset Tetap T.A. 2024	239.463.744.380,00

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud merupakan beban penyusutan dan amortisasi dalam Laporan Operasional, walaupun tidak menambah akumulasi penyusutan aset tetap melainkan menjadi unsur pengurang dalam penyajian aset tidak berwujud dalam Neraca.

7.5.4.2 H. Beban Penyisihan Piutang

2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)
(Rp)	(Rp)	(Rp)
908.320.161,01	403.894.011,40	504.426.149,61

Beban Penyisihan Piutang merupakan saldo Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yaitu alokasi yang sistematis atas nilai suatu piutang dengan persentase yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Akuntansi. Beban penyisihan piutang menunjukkan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi nilai aset piutang di masa yang akan datang.

Total Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp908.320.161,01 meningkat senilai Rp504.426.149,61 atau 124,89% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp403.894.011,40. Rincian Beban Penyisihan Piutang adalah:

Tabel 7.5.4. 45 Beban Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
a.	Beban Penyisihan Piutang Pajak	494.947.954,20	360.133.225,65
b.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	165.605.968,69	25.887.303,02
c.	Beban Penyisihan Lain-lain PAD yang Sah	242.662.854,52	9.905.300,23
d.	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	5.103.383,60	7.968.182,50
Jumlah Beban Penyisihan Piutang		908.320.161,01	403.894.011,40

Jumlah beban penyisihan piutang seharusnya sebanding dengan kenaikan saldo penyisihan piutang pada Neraca. Namun pada Tahun 2024, terdapat transaksi-transaksi yang mengakibatkan adanya perbedaan antara beban penyisihan piutang tahun 2024 dengan kenaikan penyisihan piutang. Penjelasan atas selisih beban penyisihan piutang dengan perubahan penyisihan piutang disajikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.4. 46 Penjelasan Beban Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Perubahan penyisihan piutang dan dana bergulir:	
a.	Kenaikan Penyisihan Piutang Pajak	491.110.394,65
b.	Kenaikan Penyisihan Piutang Retribusi	165.556.223,69
c.	Kenaikan Penyisihan Lain - lain PAD yang Sah	240.135.482,23
d.	Penurunan Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	19.750.975,00
e.	Kenaikan Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian daerah	2.199.350,00
f.	Kenaikan Penyisihan Lain - lain tidak tertagih	5.103.383,60
	Jumlah Kenaikan/(penurunan) penyisihan piutang dan dana bergulir	923.855.809,17
2	Ditambah:	
a.	Pengakuan PAD yang sah-LO yang Berasal dari Penyisihan Pajak Batuan Bukan Logam dan Batuan Lainnya	
b.	Pengakuan PAD Yang Sah -LO yang Berasal dari Penyisihan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	49.745,00
c.	Pengakuan Lain-lain PAD yang sah yang Berasal dari Penyisihan Piutang Klaim Ambulance dan Obat Kroni	328.022,29
d.	Koreksi Ekuitas Piutang Pajak Jasa Boga pada Dinas Pendidikan	20.059,55

No.	Uraian	Jumlah
	Tahun 2023	
e	Koreksi Ekuitas Piutang Pajak MBLB PT Mamuang Tahun 2020	3.817.500,00
	Jumlah Penambahan	4.215.326,84
3	Pengurangan:	
a.	Pengakuan Lain-lain PAD yang sah yang Berasal dari Penyisihan Angsuran Perumahan	19.750.975,00
	Jumlah Pengurangan	19.750.975,00
	Jumlah Beban Penyisihan Piutang T.A. 2024	908.320.161,01

7.5.4.2 I. Beban Lain-lain

2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)
(Rp)	(Rp)	(Rp)
-	-	-

Beban lain-lain merupakan saldo beban lain-lain periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yaitu beban yang terbentuk akibat adanya belanja modal yang tidak menambah nilai aset tetap, penghapusan aset tetap dan aset lainnya serta penghapusan persediaan.

Total Beban Lain-lain Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00. Rincian Beban Lain-lain adalah:

Tabel 7.5.4. 47 Beban Lain-lain Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
a.	Beban Lainnya	-	-
b.	Beban Penghapusan Aset Lainnya	-	-
	Jumlah Beban Lain-lain	-	-

7.5.4.2 I.a. Beban Lainnya

Beban lain-lain merupakan saldo beban lainnya periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Total Beban Lainnya Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp0,00 sementara saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00. Beban lainnya terbentuk karena hal-hal sebagai berikut:

Tabel 7.5.4. 48 Beban Lain-lain Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
1.	Belanja Modal Aset Tetap di Bawah Capital Threshold	-	-
2.	Belanja Modal JIJ (Pemeliharaan)	-	-
3.	Peralatan dan Mesin Ekstra Kompatibel	-	-
4.	Utang pada pihak ketiga	-	-
5.	Beban Penyusutan Aset Tetap RB	-	-
6.	Belanja Modal Peralatan dan mesin (Barang Pakai Habis)	-	-
	Jumlah Beban Lainnya	-	-

7.5.4.2 I.b. Beban Penghapusan Aset Lainnya

2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)
(Rp)	(Rp)	(Rp)
-	-	-

Total Beban Penghapusan Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00.

Proses penghapusan aset lainnya diawali dari usulan pengguna barang (Kepala SKPD) kepada pengelola barang (Sekretaris Daerah) kemudian pengelola barang mengusulkan kepada Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. Sesuai dengan ketentuan maka Bupati mengeluarkan surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah No.980/620//BPKAD kemudian diterbitkan pula Surat Keputusan Nomor 523 Tahun 2024 tentang Penetapan Penghapusan BMD.

7.5.4.2 I.c. Beban Penghapusan Persediaan

2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)
(Rp)	(Rp)	(Rp)
-	-	-

Beban Penghapusan Persediaan merupakan saldo beban penghapusan Persediaan periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang disajikan senilai nilai perolehan persediaan yang dihapuskan. Tidak ada kenaikan maupun penurunan pada beban penghapusan persediaan.

7.5.4.2 J. Beban Transfer

2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)
(Rp)	(Rp)	(Rp)
51.701.905.423,00	49.097.225.524,00	2.604.679.899,00

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban Transfer disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban transfer terjadi pada saat timbulnya kewajiban.

Total Beban Transfer Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp51.701.905.423,00 meningkat senilai Rp2.604.679.899,00 atau 5,31% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp49.097.225.524,00. Rincian Beban Transfer adalah:

Tabel 7.5.4. 49 Beban Transfer Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
a.	Beban Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Pemerintah Desa	1.723.142.775,00	1.398.679.900,00
b.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	49.978.762.648,00	47.698.545.624,00
c.	Beban Transfer Dana Desa	-	-
Jumlah Beban Transfer		51.701.905.423,00	49.097.225.524,00

Beban Transfer Dana Desa Tahun 2024 tidak disajikan dalam Laporan Operasional, hal ini dikarenakan dana dimaksud merupakan hak desa untuk memanfaatkannya, sedangkan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu sebagai penampung sementara sebelum disalurkan. Kinerja pemanfaatan dana desa ada pada Pemerintah Desa, bukan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.

7.5.4.1 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)
(Rp)	(Rp)	(Rp)
(5.641.727.558,70)	(3.935.060.946,58)	(1.706.666.612,12)

Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Sedangkan defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

Total Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai -Rp5.641.727.558,70 menurun senilai -Rp1.706.666.612,12 atau 43,37% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai -Rp3.935.060.946,58. Surplus dari kegiatan operasional disajikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.4. 50 Rincian Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
A	Pendapatan Operasional	857.435.909.060,45	797.681.279.974,78
B	Beban Operasional	863.077.636.619,15	801.616.340.921,36
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional		(5.641.727.558,70)	(3.935.060.946,58)

7.5.4.2 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)
(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1.450.272.453,00)	(1.794.056.571,94)	343.784.118,94

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin akan dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 senilai -Rp1.606.977.226,94 sedangkan Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional tahun 2023 senilai -Rp609.283.013,00.

Tabel 7.5.4. 51 Rincian Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2024	TA 2023
A	Surplus Non Operasional – LO	23.700.000,00	
a	Surplus penjualan aset non lancar - LO	-	-
b	Surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang - LO:	23.700.000,00	
-	Penghapusan Utang pada Dinas PU	-	-
-	Penghapusan Utang pada Dinas Sosial	-	-
-	Penghapusan Utang pada Bagian Umum Sekretariat Daerah	-	-
c	Surplus dari kegiatan non operasional lainnya - LO	-	-
B	Defisit Non Operasional - LO	1.473.972.453,00	1.794.056.571,94
a	Defisit penjualan aset non lancar - LO	1.473.972.453,00	-
b	Defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang - LO:	-	-
c	Defisit Penghapusan Gedung dan Bangunan - LO		803.219.083,00
d	Defisit Penghapusan Aset lain-lain - LO		803.758.143,94
e	Defisit dari kegiatan non operasional lainnya - LO		187.079.345,00
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional		(1.450.272.453,00)	(1.794.056.571,94)

Penghapusan Gedung dan Bangunan ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 269 Tahun 2024.

Penghapusan Aset lain-lain karena pemusnahan ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 486 Tahun 2024. Penghapusan Aset lain-lain karena pemindahtanganan ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 411 Tahun 2024. Penjelasan Surplus Defisit non Operasional-LO dapat dilihat pada lampiran 45.

7.5.4.3 Pos Luar Biasa

2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)
(Rp)	(Rp)	(Rp)
(483.328.000,00)	(328.780.000,00)	(154.548.000,00)

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
- tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
- kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Total Pos Luar Biasa Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai -Rp483.328.000,00 menurun senilai -Rp154.548.000,00 atau 47,01% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai -Rp328.780.000,00. Rincian Pos Luar Biasa adalah:

Tabel 7.5.4. 52 Rincian Pos Luar Biasa Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian		TA 2024	TA 2023
A	Pendapatan Luar Biasa	-	-
B	Beban Luar Biasa	483.328.000,00	328.780.000,00
Jumlah Pos Luar Biasa		(483.328.000,00)	(328.780.000,00)

7.5.4.5 A. Pendapatan Luar Biasa

2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)
(Rp)	(Rp)	(Rp)
-	-	-

Tidak terdapat pendapatan luar biasa untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 pada Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.

7.5.4.5 B. Beban Luar Biasa

2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)
(Rp)	(Rp)	(Rp)
483.328.000,00	328.780.000,00	154.548.000,00

Beban luar biasa adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah Pusat/daerah.

Total Beban Luar Biasa Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp483.328.000,00 meningkat senilai Rp154.548.000,00 atau 47,01% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp328.780.000,00. Rincian beban luar biasa sebagai berikut:

Tabel 7.5.4. 53 Beban Luar Biasa Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian		TA 2024	TA 2023
a.	Beban Luar Biasa	483.328.000,00	328.780.000,00
Jumlah Beban Luar Biasa		483.328.000,00	328.780.000,00

Beban Luar Biasa senilai Rp483.328.000,00 disajikan sesuai format Laporan Operasional dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Beban ini didalam aplikasi SIPD disajikan pada Beban Tidak Terduga sesuai Format Laporan Operasional didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

7.5.4.4 Surplus/Defisit-LO

2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)
(Rp)	(Rp)	(Rp)
(7.575.328.011,70)	(6.057.897.518,52)	(1.517.430.493,18)

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan Pos luar biasa.

Total Surplus/Defisit-LO Pemerintah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2024 adalah senilai -Rp7.575.328.011,70 menurun senilai -Rp1.517.430.493,18 atau 25,05% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai -Rp6.057.897.518,52. Rincian Surplus/Defisit-LO adalah:

Tabel 7.5.4. 54 Rincian Surplus/Defisit-LO Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
A	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional	(5.641.727.558,70)	(3.935.060.946,58)
B	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	(1.450.272.453,00)	(1.794.056.571,94)
C	Pos Luar Biasa	(483.328.000,00)	(328.780.000,00)
Jumlah Surplus/Defisit-LO		(7.575.328.011,70)	(6.057.897.518,52)

7.5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi non keuangan, pembiayaan dan non anggaran. Saldo awal kas daerah ditambah dengan arus kas bersih selama tahun anggaran berkenaan merupakan saldo akhir kas daerah yang berada dan dikuasai oleh BUD. Saldo akhir kas yang dikuasai BUD termasuk sisa dana kas yang berada pada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD, Bendahara FKTP/Puskesmas, Bendahara Dana BOS dan Bendahara BLUD. Sisa kas di Bendahara SKPD baik Bendahara Penerimaan maupun Bendahara Pengeluaran adalah sisa dana yang berasal dari arus kas keluar di BUD sesuai dengan SP2D dan/atau penerimaan daerah yang belum disetorkan ke BUD. Sedangkan sisa kas di Bendahara FKTP/JKN, Bendahara Dana BOS dan Bendahara BLUD merupakan sisa dana yang berasal dari penerimaan dan pengeluaran dana JKN, dana BOK, dana BOS dan BLUD tanpa melalui rekening BUD. Namun terkait hal tersebut, sisa kas di Bendahara FKTP/Puskesmas, Bendahara Dana BOS dan merupakan bagian dari Kas Daerah.

Selama Tahun Anggaran 2024 Kas Pemerintah Kabupaten Pasangkayu mengalami peningkatan saldo kas senilai Rp384.110.677,86. Sedangkan tahun 2023 terjadi peningkatan saldo kas senilai Rp11.733.371.546,75.

Arus Kas Bersih Pemerintah Kabupaten Pasangkayu tahun anggaran 2024 dan 2023 terdiri atas:

Tabel 7.5.5. 1 Rincian Arus Kas Bersih

				<i>(dalam rupiah)</i>	
No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023		
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	181.993.843.627,86	208.995.069.777,75		
2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	(181.629.934.823,00)	(197.260.256.715,00)		
3	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	23.700.000,00	-		
4	Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	(3.498.127,00)	(1.441.516,00)		
	Kenaikan (penurunan) Saldo Kas	384.110.677,86	11.733.371.546,75		

7.5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

2024	2023
(Rp)	(Rp)
181.993.843.627,86	208.995.069.777,75

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan arus kas masuk dan arus kas keluar, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran.

Saldo Arus Kas dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu sampai tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp181.993.843.627,86 atau menurun senilai Rp27.001.226.149,89 atau -12,92% dibandingkan saldo untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp208.995.069.777,75.

Arus kas bersih dari Aktivitas operasi dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 7.5.5. 2 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
A	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	852.443.669.121,86	828.041.837.001,46
B	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	670.449.825.494,00	619.046.767.223,71
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	181.993.843.627,86	208.995.069.777,75

7.5.5.1 A Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

2024 (Rp)	2023 (Rp)
852.443.669.121,86	828.041.837.001,46

Realisasi Arus Kas Masuk per 31 Desember 2024 senilai Rp852.443.669.121,86 sedangkan per 31 Desember 2023 senilai Rp828.041.837.001,46. Realisasi Arus kas masuk tersebut merupakan Arus Kas Masuk atas Aktivitas Operasi yang berasal dari

Tabel 7.5.5. 3 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
a	Pendapatan Pajak Daerah	22.965.168.782,36	16.807.664.021,00
b	Pendapatan Retribusi Daerah	8.262.414.576,08	4.714.260.496,00
c	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.173.536.172,00	3.146.110.906,00
d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	26.295.863.030,42	34.179.444.554,46
e	Dana Bagi Hasil Pajak	9.531.487.000,00	10.116.542.067,00
f	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	12.192.946.000,00	14.070.260.145,00
g	Dana Alokasi Umum	496.999.363.000,00	473.350.213.036,00
h	Dana Alokasi Khusus Fisik	102.005.217.974,00	104.368.130.391,00
i	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	74.291.745.640,00	79.999.705.391,00
j	Dana Penyesuaian	-	-
k	Dana Desa	54.694.684.000,00	53.799.805.000,00
l	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	34.739.574.844,00	32.672.529.014,00
m	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	-	287.500.000,00
n	Pendapatan Hibah	736.129.795,00	529.671.980,00
o	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.555.538.308,00	-
	Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	852.443.669.121,86	828.041.837.001,46

7.5.5.1 A. a Pendapatan Pajak Daerah

2024 (Rp)	2023 (Rp)
22.965.168.782,36	16.807.664.021,00

Saldo Realisasi Pendapatan Pajak Daerah senilai Rp22.965.168.782,36 adalah Arus Kas Masuk dari Pendapatan Pajak Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sedangkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp16.807.664.021,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.5. 4 Rincian Pendapatan Pajak Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Pajak Hotel	180.719.938,00	79.002.500,00
2	Pajak Restoran	1.379.379.012,36	691.489.116,00
3	Pajak Hiburan	18.450.000,00	11.400.000,00
4	Pajak Reklame	705.422.409,00	670.179.206,00
5	Pajak Penerangan Jalan	9.314.181.850,00	8.353.900.077,00
6	Pajak Air Tanah	11.830.000,00	9.180.000,00
7	Pajak Sarang Burung Walet	14.650.909,00	9.200.000,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.798.279.031,00	4.704.843.097,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.906.503.647,00	1.729.823.638,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.635.751.986,00	548.646.387,00
	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	22.965.168.782,36	16.807.664.021,00

7.5.5.1 A. b Pendapatan Retribusi Daerah

2024	2023
(Rp)	(Rp)
8.262.414.576,08	4.714.260.496,00

Saldo Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah senilai Rp8.262.414.576,08 adalah Arus Kas Masuk dari Pendapatan Retribusi Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sedangkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp4.714.260.496,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.5. 5 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Retribusi Jasa Umum	7.598.035.391,58	3.988.721.986,00
2	Retribusi Jasa Usaha	401.353.987,50	631.016.250,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	263.025.197,00	94.522.260,00
	Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah	8.262.414.576,08	4.714.260.496,00

7.5.5.1 A. c Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

2024	2023
(Rp)	(Rp)
3.173.536.172,00	3.146.110.906,00

Saldo Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan senilai Rp3.173.536.172,00 adalah Arus Kas Masuk dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sedangkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp3.146.110.906,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.5. 6 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	3.173.536.172,00	3.146.110.906,00
	Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.173.536.172,00	3.146.110.906,00

7.5.5.1 A. d Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

2024 (Rp)	2023 (Rp)
26.295.863.030,42	34.179.444.554,46

Saldo Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah senilai Rp26.295.863.030,42 adalah Arus Kas Masuk dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sedangkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp34.179.444.554,46 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.5. 7 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	-
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	360.898.420,00	313.840.261,00
3	Pendapatan dari Hasil Kerja Sama Daerah - LRA	763.329.559,08	1.544.400.833,79
4	Penerimaan Jasa Giro - LRA	1.945.383.482,72	2.014.771.186,00
5	Pendapatan Bunga Deposito -LRA	19.373.475,00	48.358.954,00
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	14.373.500,00	53.025.000,00
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan - LRA	442.323.102,49	1.262.956.879,65
8	Pendapatan dari Pengembalian-LRA	390.440.710,00	343.627.906,00
9	Pendapatan BLUD -LRA	22.359.740.781,13	22.588.521.937,02
10	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	-	6.004.636.750,00
11	Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	5.304.847,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	26.295.863.030,42	34.179.444.554,46

7.5.5.1 A. e Dana Bagi Hasil Pajak

2024 (Rp)	2023 (Rp)
9.531.487.000,00	10.116.542.067,00

Tabel 7.5.5. 8 Rincian Dana Bagi Hasil Pajak
(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH)	2.457.042.000,00	2.299.985.220,00
2	Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.074.445.000,00	7.816.556.847,00
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak	9.531.487.000,00	10.116.542.067,00

7.5.5.1 A. f Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

2024 (Rp)	2023 (Rp)
12.192.946.000,00	14.070.260.145,00

Saldo Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) senilai Rp12.192.946.000,00 adalah Arus Kas Masuk dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sedangkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp14.070.260.145,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.5. 9 Rincian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	30.977.000,00	3.709.284,00
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	-	8.352.650,00
3	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi	-	11.634.633.000,00
4	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	1.884.618.000,00	2.423.565.211,00
5	DBH Sawit	10.277.351.000,00	-
	Jumlah Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	12.192.946.000,00	14.070.260.145,00

7.5.5.1 A. g Dana Alokasi Umum

2024 (Rp)	2023 (Rp)
496.999.363.000,00	473.350.213.036,00

Saldo Realisasi Dana Alokasi Umum senilai Rp496.999.363.000,00 adalah Arus Kas Masuk dari Dana Alokasi Umum sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sedangkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp473.350.213.036,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.5. 10 Rincian Dana Alokasi Umum

(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Dana Alokasi Umum	496.999.363.000,00	473.350.213.036,00
	Jumlah Dana Alokasi Umum	496.999.363.000,00	473.350.213.036,00

7.5.5.1 A. h Dana Alokasi Khusus – Fisik

2024 (Rp)	2023 (Rp)
102.005.217.974,00	104.368.130.391,00

Saldo Realisasi Dana Alokasi Khusus - Fisik senilai Rp102.005.217.974,00 adalah Arus Kas Masuk dari Dana Alokasi Khusus - Fisik sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sedangkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp104.368.130.391,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.5. 11 Rincian Dana Alokasi Khusus - Fisik

(dalam rupiah)

No.	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	27.510.734.000,00	40.232.823.500,00
2	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	2.803.155.600,00	-
3	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	14.347.162.629,00	7.259.582.000,00
4	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	6.109.707.000,00	10.104.297.000,00
5	DAK Bidang Kesehatan dan KB	33.335.924.077,00	24.413.918.135,00
6	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	3.582.671.176,00	-
7	DAK Bidang Pendidikan	14.315.863.492,00	22.357.509.756,00
	Jumlah Dana Alokasi Khusus - Fisik	102.005.217.974,00	104.368.130.391,00

7.5.5.1 A. I Dana Alokasi Khusus - Non Fisik

2024	2023
(Rp)	(Rp)
74.291.745.640,00	79.999.705.391,00

Saldo Realisasi Dana Alokasi Khusus - Non Fisik senilai Rp74.291.745.640,00 adalah Arus Kas Masuk dari Dana Alokasi Khusus - Non Fisik sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sedangkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp79.999.705.391,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.5. 12 Rincian Dana Alokasi Khusus - Non Fisik

(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	25.768.895.392,00	25.504.883.455,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.235.000.000,00	980.000.000,00
3	DAK Non Fisik-TPG-PNSD	26.982.795.000,00	25.276.435.136,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.412.250.000,00	1.086.250.000,00
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD	526.823.000,00	166.653.750,00
6	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.200.653.000,00	2.277.481.000,00
7	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesenjangan	756.500.000,00	1.423.650.000,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1.584.616.999,00	17.611.451.613,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	118.469.500,00	-
10	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.561.088.000,00	3.672.166.600,00
11	Fasilitasi Penanaman Modal	388.715.450,00	510.062.327,00
12	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	380.938.110,00
13	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	628.534.166,00	1.109.733.400,00
14	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	9.127.405.133,00	-
	Jumlah Dana Alokasi Khusus Non Fisik	74.291.745.640,00	79.999.705.391,00

7.5.5.1 A. j Dana Penyesuaian

2024	2023
(Rp)	(Rp)
-	-

Saldo Realisasi Dana Penyesuaian senilai Rp0,00 adalah Arus Kas Masuk dari Dana Penyesuaian sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sedangkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.5. 13 Rincian Dana Penyesuaian

(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Dana Insentif Daerah	-	-
	Jumlah Dana Penyesuaian	-	-

7.5.5.1 A. k Dana Desa

2024	2023
(Rp)	(Rp)
54.694.684.000,00	53.799.805.000,00

Saldo Realisasi Dana Desa senilai Rp54.694.684.000,00 adalah Arus Kas Masuk dari Dana Desa sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sedangkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp53.799.805.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.5. 14 Rincian Dana Desa

(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Dana Desa	54.694.684.000,00	53.799.805.000,00
	Jumlah Dana Desa	54.694.684.000,00	53.799.805.000,00

7.5.5.1 A. l Pendapatan Bagi Hasil Pajak

2024	2023
(Rp)	(Rp)
34.739.574.844,00	32.672.529.014,00

Saldo Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak senilai Rp34.739.574.844,00 adalah Arus Kas Masuk dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sedangkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp32.672.529.014,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.5. 15 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak

(dalam rupiah)

No.	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	5.331.175.134,00	4.998.826.710,00
3	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.871.058.667,00	5.254.709.417,00
4	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	12.302.238.198,00	10.993.417.988,00
5	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	43.211.277,00	50.281.506,00
6	Bagi Hasil Pajak Rokok	11.191.891.568,00	11.375.293.393,00
	Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Pajak	34.739.574.844,00	32.672.529.014,00

7.5.5.1 A. m Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi

2024	2023
(Rp)	(Rp)
-	287.500.000,00

Saldo Realisasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi senilai Rp0,00 adalah Arus Kas Masuk dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi sampai dengan

tanggal 31 Desember 2024, sedangkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp287.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.5. 16 Rincian Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi

(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat	-	287.500.000,00
	Jumlah Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	-	287.500.000,00

7.5.5.1 A.n Pendapatan Hibah

2024 (Rp)	2023 (Rp)
736.129.795,00	529.671.980,00

Saldo Realisasi Pendapatan Hibah senilai Rp736.129.795,00 adalah Arus Kas Masuk dari Pendapatan Hibah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sedangkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp529.671.980,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.5. 17 Rincian Pendapatan Hibah (Sumbangan Pihak Ketiga)

(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Pendapatan Hibah	736.129.795,00	529.671.980,00
	Jumlah Pendapatan Hibah	736.129.795,00	529.671.980,00

7.5.5.1 A.o Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

2024 (Rp)	2023 (Rp)
6.555.538.308,00	-

Saldo Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LRA senilai Rp6.555.538.308,00 adalah Arus Kas Masuk dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LRA sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sedangkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.5.18 Rincian Pendapatan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.555.538.308,00	-
	Jumlah Pendapatan Hibah	6.555.538.308,00	-

7.5.5.1 B Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

2024	2023
(Rp)	(Rp)
670.449.825.494,00	619.046.767.223,71

Realisasi Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2024 senilai Rp670.449.825.494,00 sedangkan per 31 Desember 2023 senilai Rp619.046.767.223,71.

Realisasi Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi berasal dari:

Tabel 7.5.5. 19 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
a	Belanja Pegawai	298.942.450.068,00	283.442.561.180,00
b	Belanja Barang	227.464.421.857,00	198.846.542.410,71
c	Belanja Hibah	36.825.036.146,00	33.141.853.109,00
d	Belanja Bantuan Sosial	338.000.000,00	390.000.000,00
e	Belanja Bantuan Keuangan	-	-
f	Belanja Bagi Hasil	1.724.590.695,00	1.398.679.900,00
g	Belanja Tak Terduga	483.328.000,00	328.780.000,00
i	Transfer Dana Desa	104.671.998.728,00	101.498.350.624,00
	Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	670.449.825.494,00	619.046.767.223,71

7.5.5.1 B. a Belanja Pegawai

2024	2023
(Rp)	(Rp)
298.942.450.068,00	283.442.561.180,00

Saldo Realisasi Belanja Pegawai senilai Rp298.942.450.068,00 adalah Arus Kas Keluar dari Belanja Pegawai sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sedangkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp283.442.561.180,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.5. 20 Rincian Belanja Pegawai

(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	236.229.998.536,00	211.853.794.938,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	11.755.486.463,00	12.759.698.957,00
3	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.700.279.190,00	11.277.794.566,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	283.725.985,00	264.771.039,00
5	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	334.624.000,00	459.360.000,00
6	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	39.638.335.894,00	32.092.721.476,00
7	Belanja Pegawai Bos	-	8.734.967.000,00
8	Belanja Pegawai BLUD	-	5.999.453.204,00
	Jumlah Belanja Pegawai	298.942.450.068,00	283.442.561.180,00

7.5.5.1 B. b Belanja Barang dan Jasa

2024	2023
(Rp)	(Rp)

227.464.421.857,00 198.846.542.410,71

Saldo Realisasi Belanja Barang dan Jasa senilai Rp227.464.421.857,00 adalah Arus Kas Keluar dari Belanja Barang dan Jasa sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sedangkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp198.846.542.410,71 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.5. 21 Rincian Belanja Barang dan Jasa

(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Rincian Belanja Barang dan Jasa dapat dilihat pada lampiran 1.	227.464.421.857,00	198.846.542.410,71

7.5.5.1 B. c Belanja Subsidi

2024	2023
(Rp)	(Rp)
-	-

Saldo Realisasi Belanja Subsidi senilai Rp0,00 adalah Arus Kas Keluar dari Belanja Subsidi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sedangkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.5. 22 Rincian Belanja Subsidi

(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Belanja Subsidi Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	-	-
	Jumlah Belanja Subsidi	-	-

7.5.5.1 B. d Belanja Hibah

2024	2023
(Rp)	(Rp)
Rp 36.825.036.146,00	Rp 33.141.853.109,00

Saldo Realisasi Belanja Hibah senilai Rp36.825.036.146,00 adalah Arus Kas Keluar dari Belanja Hibah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sedangkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp33.141.853.109,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.5. 23 Rincian Belanja Hibah

(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah	1.390.547.000,00	3.308.937.000,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	29.639.065.541,00	26.931.240.073,00
3	Belanja Hibah Dana Bos	5.299.725.592,00	2.386.429.132,00
4	Belanja Hibah Keuangan Kepada Partai Politik	495.698.013,00	515.246.904,00
	Jumlah Belanja Hibah	36.825.036.146,00	33.141.853.109,00

7.5.5.1 B. e Belanja Bantuan Sosial

2024 (Rp)	2023 (Rp)
338.000.000,00	390.000.000,00

Saldo Realisasi Belanja Bantuan Sosial senilai Rp338.000.000,00 adalah Arus Kas Keluar dari Belanja Bantuan Sosial sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sedangkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp390.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.5. 24 Rincian Belanja Bantuan Sosial

(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	238.000.000,00	240.000.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan	100.000.000,00	150.000.000,00
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial	338.000.000,00	390.000.000,00

7.5.5.1 B. f Belanja Tak Terduga

2024 (Rp)	2023 (Rp)
483.328.000,00	328.780.000,00

Saldo Realisasi Belanja Tak Terduga senilai Rp483.328.000,00 adalah Arus Kas Keluar dari Belanja Tak Terduga sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sedangkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp328.780.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.5. 25 Rincian Belanja Tak Terduga

(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Belanja Tak Terduga	483.328.000,00	328.780.000,00
	Jumlah Belanja Tak Terduga	483.328.000,00	328.780.000,00

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Desa Sarude, Kecamatan Sarjo dan Desa Bulubonggu Kecamatan Dapurang Kab. Pasangkayu Tahun 2024 senilai Rp483.328.000,00.

7.5.5.1 B. g Bagi Hasil

2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.724.590.695,00	1.398.679.900,00

Saldo Realisasi Bagi Hasil senilai Rp1.724.590.695,00 adalah Arus Kas Keluar dari Bagi Hasil sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sedangkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp1.398.679.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.5. 26 Rincian Bagi Hasil

(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Bagi Hasil	1.724.590.695,00	1.398.679.900,00
	Jumlah Bagi Hasil	1.724.590.695,00	1.398.679.900,00

7.5.5.1 B. h Bantuan Keuangan

2024	2023
(Rp)	(Rp)
104.671.998.728,00	101.498.350.624,00

Saldo Realisasi Bantuan Keuangan senilai Rp104.671.998.728,00 adalah Arus Kas Keluar dari Bantuan Keuangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sedangkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp101.498.350.624,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.5. 27 Rincian Bantuan Keuangan

(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Transfer Dana Desa	104.671.998.728,00	101.498.350.624,00
	Jumlah Transfer Dana Desa	104.671.998.728,00	101.498.350.624,00

7.5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

2024	2023
(Rp)	(Rp)
(181.629.934.823,00)	(197.260.256.715,00)

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan merupakan arus kas masuk dan arus kas keluar, yang ditujukan untuk kegiatan investasi non keuangan pemerintah selama satu tahun anggaran, baik berupa penjualan aset tetap daerah maupun pembelian aset tetap/lainnya.

Saldo Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu sampai tanggal 31 Desember 2024 senilai -Rp181.629.934.823,00 atau meningkat senilai Rp15.630.321.892,00 atau 7,92% dibandingkan saldo untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 senilai -Rp197.260.256.715,00.

Arus kas bersih Aktivitas investasi non keuangan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 7.5.5. 28 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
A	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	404.314.500,00	523.368.836,00
B	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	182.034.249.323,00	197.783.625.551,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	(181.629.934.823,00)	(197.260.256.715,00)

7.5.5.2 A Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

2024	2023
(Rp)	(Rp)
404.314.500,00	523.368.836,00

Realisasi Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Non Keuangan per 31 Desember 2024 senilai Rp404.314.500,00 sedangkan per 31 Desember 2023

senilai Rp523.368.836,00.
 Realisasi Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Non Keuangan berasal dari hasil penjualan Aset.
 Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan Rp404.314.500,00

7.5.5.2 B Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

2024 (Rp)	2023 (Rp)
182.034.249.323,00	197.783.625.551,00

Realisasi Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Non Keuangan per 31 Desember 2024 senilai Rp182.034.249.323,00 sedangkan per 31 Desember 2023 senilai Rp197.783.625.551,00.

Realisasi Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Non Keuangan berasal dari hasil pembelian Aset.

Tabel 7.5.5. 29 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Non Keuangan
 (dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Belanja Tanah	1.556.819.900,00	999.732.700,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	33.154.767.773,00	23.481.480.203,00
3	Belanja Bangunan dan Gedung	43.406.647.247,00	64.160.323.251,00
4	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	103.170.690.203,00	109.042.548.297,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	672.874.200,00	97.765.100,00
6	Belanja Aset Tetap Lainnya	72.450.000,00	1.776.000,00
	Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	182.034.249.323,00	197.783.625.551,00

7.5.5.2 B. a Belanja Tanah

2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.556.819.900,00	999.732.700,00

Saldo Realisasi Belanja Tanah senilai Rp1.556.819.900,00 adalah Arus Kas Keluar dari Belanja Tanah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sedangkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp999.732.700,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.5. 30 Rincian Belanja Tanah
 (dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	1.556.819.900,00	999.732.700,00
	Jumlah Belanja Tanah	1.556.819.900,00	999.732.700,00

7.5.5.2 B. b Belanja Peralatan dan Mesin

2024 (Rp)	2023 (Rp)
33.154.767.773,00	23.481.480.203,00

Saldo Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin senilai Rp33.154.767.773,00 adalah Arus Kas Keluar dari Belanja Peralatan dan Mesin sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sedangkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp23.481.480.203,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.5. 31 Rincian Belanja Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.154.767.773,00	23.481.480.203,00

7.5.5.2 B. c Belanja Bangunan dan Gedung

2024	2023
(Rp)	(Rp)
43.406.647.247,00	64.160.323.251,00

Saldo Realisasi Belanja Bangunan dan Gedung senilai Rp43.406.647.247,00 adalah Arus Kas Keluar dari Belanja Bangunan dan Gedung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sedangkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp64.160.323.251,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.5. 32 Rincian Belanja Bangunan dan Gedung

(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	38.239.164.601,00	48.427.496.894,00
2	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	173.980.700,00	2.992.121.484,00
3	Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	4.993.501.946,00	12.740.704.873,00
	Jumlah Belanja Bangunan dan Gedung	43.406.647.247,00	64.160.323.251,00

7.5.5.2 B. d Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi

2024	2023
(Rp)	(Rp)
103.170.690.203,00	109.042.548.297,00

Saldo Realisasi Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp103.170.690.203,00 adalah Arus Kas Keluar dari Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sedangkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp109.042.548.297,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.5. 33 Rincian Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	80.367.829.717,00	90.295.293.305,00
2	Belanja Modal Bangunan Air	6.665.822.958,00	4.586.490.286,00
3	Belanja Modal Instalasi	16.085.128.428,00	14.135.085.606,00
4	Belanja Modal Jaringan	51.909.100,00	25.679.100,00
	Jumlah Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	103.170.690.203,00	109.042.548.297,00

7.5.5.2 B. e Belanja Aset Tetap Lainnya

2024	2023
(Rp)	(Rp)
672.874.200,00	97.765.100,00

Saldo Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya senilai Rp672.874.200,00 adalah Arus Kas Keluar dari Belanja Aset Tetap Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sedangkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp97.765.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.5. 34 Rincian Belanja Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	551.773.200,00	-
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	121.101.000,00	97.765.100,00
	Jumlah Belanja Aset Tetap Lainnya	672.874.200,00	97.765.100,00

7.5.5.2 B. f Belanja Aset Lainnya

2024	2023
(Rp)	(Rp)
72.450.000,00	1.776.000,00

Saldo Realisasi Belanja Aset Lainnya senilai Rp72.450.000,00 adalah Arus Kas Keluar dari Belanja Aset Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sedangkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp1.776.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.5. 35 Rincian Belanja Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	72.450.000,00	1.776.000,00
	Jumlah Belanja Aset Tetap Lainnya	72.450.000,00	1.776.000,00

7.5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

2024	2023
(Rp)	(Rp)
23.700.000,00	-

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan merupakan arus kas masuk dan arus kas keluar, yang ditujukan untuk kegiatan pembiayaan pemerintah selama satu tahun anggaran, baik berupa penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran utang.

Saldo Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu sampai tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp23.700.000,00 atau meningkat senilai Rp23.700.000,00 atau 100,00% dibandingkan saldo untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp0,00.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas pembiayaan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 7.5.5. 36 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
A	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan	23.700.000,00	-
B	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan	-	-
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	23.700.000,00	-

7.5.5.3 A Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan

2024	2023
(Rp)	(Rp)
23.700.000,00	-

Realisasi Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan per 31 Desember 2024 senilai Rp23.700.000,00 sedangkan per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00.

7.5.5.3 B Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan

2024	2023
(Rp)	(Rp)
-	-

Saldo Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00.

7.5.5.3 B. a Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

2024	2023
(Rp)	(Rp)
-	-

Saldo Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00.

7.5.5.3 B. b Pembayaran Pokok Utang

2024	2023
(Rp)	(Rp)
-	-

Saldo Realisasi Pembayaran Pokok Utang senilai Rp0,00 adalah Arus Kas Keluar dari Pembayaran Pokok Utang sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sedangkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00.

7.5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

2024 (Rp)	2023 (Rp)
(3.498.127,00)	(1.441.516,00)

Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran merupakan arus kas masuk dan arus kas keluar, yang ditujukan untuk menerima dan menyetorkan PFK baik yang dipungut dan disetor oleh BUD, Bendahara Pengeluaran SKPD, maupun oleh Bendahara Pengeluaran Dana BOS.

Arus kas bersih Aktivitas Non Anggaran dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran Pemerintah Kabupaten Pasangkayu sampai tanggal 31 Desember 2024 senilai -Rp3.498.127,00 atau menurun senilai -Rp2.056.611,00 atau 142,67% dibandingkan saldo untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 senilai -Rp1.441.516,00.

Arus kas bersih Aktivitas Non Anggaran dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 7.5.5. 37 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
A	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran	58.619.194.671,90	58.459.177.701,85
B	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran	58.622.692.798,90	58.460.619.217,85
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	(3.498.127,00)	(1.441.516,00)

7.5.5.4 A Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran

2024 (Rp)	2023 (Rp)
58.619.194.671,90	58.459.177.701,85

Realisasi Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran per 31 Desember 2024 senilai Rp58.619.194.671,90 sedangkan per 31 Desember 2023 senilai Rp58.459.177.701,85.

Realisasi Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran berasal dari:

Tabel 7.5.5. 38 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran

(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
a	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di BUD	57.620.856.927,72	56.854.288.973,00
b	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di Bendahara Pengeluaran	457.401.815,00	1.046.310.617,57
c	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di Bendahara Dana BOS	299.338.745,07	290.343.906,28
d	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di Bendahara JKN	183.371.280,00	164.756.471,00
e	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di Bendahara BOK	58.225.904,11	103.477.734,00
	Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran	58.619.194.671,90	58.459.177.701,85

7.5.5.4 A. a Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di BUD

2024	2023
(Rp)	(Rp)
57.620.856.927,72	56.854.288.973,00

Saldo Realisasi Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di BUD senilai Rp57.620.856.927,72 adalah Arus Kas Keluar dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di BUD sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sedangkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp56.854.288.973,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.5. 39 Rincian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di BUD

(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Iuran Wajib Pegawai	14.443.487.125,00	13.316.183.204,00
2	Askes	-	-
3	Pajak Penghasilan Ps 21	7.655.589.663,00	6.757.364.629,00
4	Pajak Penghasilan Ps 22	706.447.827,00	425.583.665,00
5	Pajak Penghasilan Ps 23	336.563.983,00	269.852.347,00
6	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	2.967.638.428,32	3.529.136.185,00
7	Pajak Penghasilan Ps 25	-	3.350.093,00
8	Pajak Penghasilan Ps 26	-	6.895.754,00
9	Pajak Penghasilan Ps 15	-	150.000,00
10	Pajak Penghasilan Ps 6	-	-
11	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	20.196.476.161,00	21.274.890.903,00
12	Taspen	-	-
13	Lainnya	-	1.509.994.397,00
14	Iuran Jaminan Kesehatan	-	8.059.600.834,00
15	BPJS	9.537.891.782,00	249.896.149,00
16	JKK	370.047.115,00	328.408.070,00
17	JKM	1.109.639.548,40	985.278.238,00
18	JHT	297.075.295,00	137.704.505,00
	Jumlah Penerimaan PFK di BUD	57.620.856.927,72	56.854.288.973,00

7.5.5.4A.b Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di Bendahara Pengeluaran

2024	2023
(Rp)	(Rp)
457.401.815,00	1.046.310.617,57

Saldo Realisasi Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di Bendahara Pengeluaran senilai Rp457.401.815,00 adalah Arus Kas Keluar dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di Bendahara Pengeluaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sedangkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp1.046.310.617,57 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.5. 40 Rincian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di Bendahara Pengeluaran

(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Pajak Penghasilan Ps 21	13.514,00	1.850.000,00
2	Pajak Penghasilan Ps 22	30.716.570,00	110.387.932,37
3	Pajak Penghasilan Ps 23	101.601.003,00	288.557.225,92

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
4	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	180.000,00	10.920.270,00
5	PPN BM Dalam Negeri	-	594.594,00
6	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	324.890.728,00	634.000.595,28
	Jumlah Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di Bendahara Pengeluaran	457.401.815,00	1.046.310.617,57

Tabel 7.5.5. 41 Rincian Penerimaan Utang Lainnya di Bendahara Pengeluaran
(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Utang Lainnya	-	-
2	Utang Lainnya (Intensif PBB-P2)	-	-
	Jumlah Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di Bendahara Pengeluaran	-	-

7.5.5.4 A. c Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di Bendahara Dana BOS

2024	2023
(Rp)	(Rp)
299.338.745,07	290.343.906,28

Saldo Realisasi Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di Bendahara Dana BOS senilai Rp299.338.745,07 adalah Arus Kas Keluar dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di Bendahara Dana BOS sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sedangkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp290.343.906,28 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.5. 42 Rincian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di Bendahara Dana BOS

(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	PPh Ps 21	4.379.696,00	4.079.200,00
2	PPh Ps 21	140.157,00	-
3	PPh Ps 23	127.923.416,85	150.553.523,00
4	PPN	166.895.475,22	135.711.183,28
	Jumlah Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di Bendahara Dana BOS	299.338.745,07	290.343.906,28

7.5.5.4 A. d Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di Bendahara Puskesmas (JKN)

2024	2023
(Rp)	(Rp)
183.371.280,00	164.756.471,00

Saldo Realisasi Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di Bendahara Puskesmas (JKN) senilai Rp183.371.280,00 adalah Arus Kas Keluar dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di Bendahara Puskesmas (JKN) sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sedangkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp164.756.471,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.5. 43 Rincian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di Bendahara JKN

(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	PPh Ps 21	141.126.848,00	131.387.447,00
2	PPh Ps 22	4.857.279,00	3.743.948,00
3	PPh Ps 23	60.000,00	240.000,00

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
4	PPN	37.327.153,00	29.385.076,00
	Jumlah Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di Bendahara JKN	183.371.280,00	164.756.471,00

7.5.5.4A.e Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di Bendahara Puskesmas (BOK)

2024 (Rp)	2023 (Rp)
58.225.904,11	103.477.734,00

Saldo Realisasi Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di Bendahara Puskesmas (BOK) senilai Rp58.225.904,11 adalah Arus Kas Keluar dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di Bendahara Puskesmas (BOK) sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sedangkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp103.477.734,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.5. 44 Rincian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di Bendahara BOK
(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	PPh Ps 21	31.284.277,00	56.091.630,00
2	PPh Ps 22	325.859,00	3.983.978,00
3	PPh Ps 23	24.148.200,11	12.346.102,00
4	PPN	2.467.568,00	31.056.024,00
	Jumlah Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di Bendahara JKN	58.225.904,11	103.477.734,00

7.5.5.4 B Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran

2024 (Rp)	2023 (Rp)
58.622.692.798,90	58.460.619.217,85

Realisasi Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran per 31 Desember 2024 senilai Rp58.622.692.798,90 sedangkan per 31 Desember 2023 senilai Rp58.460.619.217,85.

Realisasi Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran berasal dari:

Tabel 7.5.5. 45 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran
(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
a	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	57.620.856.927,72	56.854.288.973,00
b	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Bendahara Pengeluaran	457.823.120,00	1.047.220.561,57
c	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Bendahara Dana BOS	302.415.567,07	290.875.478,28
d	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Bendahara JKN	183.371.280,00	164.756.471,00
e	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Bendahara BOK	58.225.904,11	103.477.734,00
	Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran	58.622.692.798,90	58.460.619.217,85

7.5.5.4 B. a Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di BUD

2024	2023
(Rp)	(Rp)
57.620.856.927,72	56.854.288.973,00

Saldo Realisasi Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di BUD senilai Rp57.620.856.927,72 adalah Arus Kas Keluar dari Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di BUD sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sedangkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp56.854.288.973,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.5. 46 Rincian Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Iuran Wajib Pegawai	14.443.487.125,00	13.316.183.204,00
2	Askes	-	-
3	Pajak Penghasilan Ps 21	7.655.589.663,00	6.757.364.629,00
4	Pajak Penghasilan Ps 22	706.447.827,00	425.583.665,00
5	Pajak Penghasilan Ps 23	336.563.983,00	269.852.347,00
6	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	2.967.638.428,32	3.529.136.185,00
7	Pajak Penghasilan Ps 6	-	-
8	Pajak Penghasilan Ps 25	-	3.350.093,00
9	Pajak Penghasilan Ps 15	-	150.000,00
10	Pajak Penghasilan Ps 26	-	6.895.754,00
11	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	20.196.476.161,00	21.274.890.903,00
12	Taspen	-	-
13	Lainnya		1.509.994.397,00
14	Iuran Jaminan Kesehatan		8.059.600.834,00
15	BPJS	9.537.891.782,00	249.896.149,00
16	JKK	370.047.115,00	328.408.070,00
17	JKM	1.109.639.548,40	985.278.238,00
18	JHT	297.075.295,00	137.704.505,00
	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di BUD	57.620.856.927,72	56.854.288.973,00

7.5.5.4B.b Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di Bendahara Pengeluaran

2024	2023
(Rp)	(Rp)
457.823.120,00	1.047.220.561,57

Saldo Realisasi Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di Bendahara Pengeluaran senilai Rp457.823.120,00 adalah Arus Kas Keluar dari Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di Bendahara Pengeluaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sedangkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp1.047.220.561,57 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.5. 47 Rincian Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di Bendahara Pengeluaran

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Pajak Penghasilan Ps 21	13.514,00	1.850.000,00
2	Pajak Penghasilan Ps 22	30.717.786,73	110.777.847,64

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
3	Pajak Penghasilan Ps 23	101.655.809,00	288.669.147,92
4	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	180.000,00	10.920.270,00
5	PPN BM Dalam Negeri	-	594.594,00
6	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	325.256.010,27	634.408.702,01
7	Utang Klaim Rujukan Pasien BPJS	-	-
	Jumlah Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di Bendahara Pengeluaran	457.823.120,00	1.047.220.561,57

7.5.5.4 B. c Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di Bendahara Dana BOS

2024	2023
(Rp)	(Rp)
302.415.567,07	290.875.478,28

Saldo Realisasi Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di Bendahara Dana BOS senilai Rp302.415.567,07 adalah Arus Kas Keluar dari Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di Bendahara Dana BOS sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sedangkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp290.875.478,28 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.5. 48 Rincian Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di Bendahara Dana BOS
(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	PPh:		
	PPh Ps 21	4.509.696,00	3.949.200,00
	PPh Ps 22	140.157,00	-
	PPh Ps 23	130.718.353,85	147.720.858,00
2	PPN	167.047.360,22	139.205.420,28
	Jumlah Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di Bendahara Dana BOS	302.415.567,07	290.875.478,28

7.5.5.4 B. d Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di Bendahara JKN

2024	2023
(Rp)	(Rp)
183.371.280,00	164.756.471,00

Saldo Realisasi Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di Bendahara JKN senilai Rp183.371.280,00 adalah Arus Kas Keluar dari Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di Bendahara JKN sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sedangkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp164.756.471,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.5. 49 Rincian Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di Bendahara JKN
(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	PPh:		
	PPh Ps 21	141.126.848,00	131.387.447,00
	PPh Ps 22	4.857.279,00	3.743.948,00
	PPh Ps 23	60.000,00	240.000,00
2	PPN	37.327.153,00	29.385.076,00
	Jumlah Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di Bendahara JKN	183.371.280,00	164.756.471,00

7.5.5.4 B. e Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di Bendahara BOK

2024	2023
(Rp)	(Rp)
58.225.904,11	103.477.734,00

Saldo Realisasi Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di Bendahara BOK senilai Rp58.225.904,11 adalah Arus Kas Keluar dari Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di Bendahara BOK sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sedangkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp103.477.734,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.5. 50 Rincian Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di Bendahara BOK
(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	PPh:		
	PPh Ps 21	31.284.277,00	56.091.630,00
	PPh Ps 22	325.859,00	3.983.978,00
	PPh Ps 23	24.148.200,11	12.346.102,00
2	PPN	2.467.568,00	31.056.024,00
	Jumlah Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di Bendahara BOK	58.225.904,11	103.477.734,00

7.5.5.5 Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode

2024	2023
(Rp)	(Rp)
384.110.677,86	11.733.371.546,75

Selama Tahun Anggaran 2024 Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu mengalami kenaikan senilai Rp384.110.677,86. Sedangkan Tahun Anggaran 2023 terjadi kenaikan saldo kas senilai Rp11.733.371.546,75.

7.5.5.6 Koreksi Silpa

2024	2023
(Rp)	(Rp)
-	-

Saldo Realisasi senilai Rp0,00 adalah Arus Kas Keluar dari sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sedangkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.5. 51 Koreksi Silpa

(dalam rupiah)

No	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Koreksi Silpa	-	-
	Jumlah Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di Bendahara JKN	-	-

Dengan demikian, saldo akhir kas senilai:

2024	2023
(Rp)	(Rp)
50.409.624.596,18	50.025.513.918,32

Saldo kas tersebut terdiri atas:

1. Kas di Kas Daerah	47.026.184.207,50	47.270.952.363,06
2. Kas di Bendahara Pengeluaran	606.700,00	-
3. Kas di Bendahara Penerimaan	24.690.551,58	45.438.055,00
4. Kas di Bendahara JKN	280.168.446,00	136.691.071,00
5. Kas di Bendahara Dana BOS	77.393.087,00	22.764.461,00
6. Kas di Bendahara Dana BOK	2.310.624.308,00	2.382.021.867,00
7. Kas di Bendahara Dana BLUD	689.377.573,10	160.887.995,97
8. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	579.723,00	6.758.105,29

7.5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas, penambahan atau pengurangan surplus (defisit) dari operasional tahun berjalan serta dampak akumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan dan adanya kesalahan mendasar. Laporan Operasional pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

7.5.6.1 Ekuitas Awal

2024	2023
(Rp)	(Rp)
2.181.278.491.148,53	2.189.128.821.380,53

Saldo Ekuitas Awal Pemerintah Kabupaten Pasangkayu sampai tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp2.181.278.491.148,53 atau menurun senilai -Rp7.850.330.232,00 atau -0,36% dibandingkan saldo untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp2.189.128.821.380,53.

7.5.6.2 Surplus/Defisit LO

2024	2023
(Rp)	(Rp)
(7.575.328.011,70)	(6.057.897.518,52)

Saldo Surplus/Defisit LO Pemerintah Kabupaten Pasangkayu sampai tanggal 31 Desember 2024 senilai -Rp7.575.328.011,70 atau menurun senilai -Rp1.517.430.493,18 atau 25,05% dibandingkan saldo untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 senilai -Rp6.057.897.518,52.

7.5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

2024	2023
(Rp)	(Rp)
(2.786.896,45)	(1.792.432.713,48)

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar merupakan koreksi terhadap nilai ekuitas yang disebabkan adanya perubahan kebijakan akuntansi maupun koreksi lainnya karena penerapan basis akrual.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah Kabupaten Pasangkayu sampai tanggal 31 Desember 2024 senilai -Rp2.786.896,45 atau meningkat senilai Rp1.789.645.817,03 atau -99,84%

dibandingkan saldo untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 senilai -Rp1.792.432.713,48.

Rincian dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebagai berikut:

Tabel 7.5.6. 1 Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023
A Koreksi Nilai Ekuitas Awal Piutang	(11.646.909,00)	(84.450.152,00)
B Koreksi Nilai Ekuitas Awal Persediaan	(654.500,00)	490.875,00
C Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap	3.775.753,00	(1.723.703.572,18)
D Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kewajiban	1.901.200,00	(38.296.693,00)
E Koreksi Nilai Ekuitas Awal Penyisihan Piutang	3.837.559,55	44.336.382,70
F Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan	-	9.190.446,00
Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(2.786.896,45)	(1.792.432.713,48)

7.5.6.3 A Koreksi Nilai Ekuitas Awal Piutang

2024 (Rp)	2023 (Rp)
(11.646.909,00)	(84.450.152,00)

Koreksi terhadap saldo piutang merupakan koreksi terhadap nilai ekuitas Pemerintah Kabupaten Pasangkayu atas transaksi/kejadian tahun 2024 yang mempengaruhi nilai ekuitas awal.

Koreksi terhadap saldo piutang tahun 2024 senilai -Rp11.646.909,00, koreksi terhadap saldo piutang pada tahun 2023 senilai -Rp84.450,00 yang mengurangi nilai ekuitas.

7.5.6.3 B Koreksi Nilai Ekuitas Awal Persediaan

2024 (Rp)	2023 (Rp)
(654.500,00)	490.875,00

Koreksi nilai persediaan merupakan koreksi atas nilai ekuitas pemerintah yang terjadi karena selisih kurang /lebih terhadap nilai persediaan.

Terdapat koreksi nilai persediaan yang mempengaruhi saldo ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 senilai -Rp654.500,00, sedangkan pada tahun 2023 senilai Rp490.875,00 yang mengurangi nilai ekuitas.

7.5.6.3 C Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap

2024 (Rp)	2023 (Rp)
3.775.753,00	(1.723.703.572,18)

Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Pasangkayu sampai tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp3.775.753,00 atau menurun senilai Rp1.727.479.325,18 atau -100,22% dibandingkan saldo untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 senilai -Rp1.723.703.572,18.

7.5.6.3 D Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kewajiban

2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.901.200,00	(38.296.693,00)

Pemerintah Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2024 senilai Rp1.901.200,00 dan tahun 2023 senilai -Rp38.296.693,00 yang mempengaruhi nilai ekuitas.

1. Koreksi Utang BPJS Kecamatan Bambaira 1.771.200,00
2. Koreksi utang belanja modal JJI Dinas PUPR 130.000,00

7.5.6.3 E Koreksi Nilai Ekuitas Awal Penyisihan Piutang

2024 (Rp)	2023 (Rp)
3.837.559,55	44.336.382,70

Pemerintah Kabupaten Pasangkayu koreksi terhadap saldo penyisihan piutang, pada tahun 2024 senilai Rp3.837.559,55 dan tahun 2023 senilai Rp44.336.382,70 koreksi terhadap saldo penyisihan piutang,

7.5.6.3 F Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan

2024 (Rp)	2023 (Rp)
-	9.190.446,00

7.5.6.4 Ekuitas Akhir

2024 (Rp)	2023 (Rp)
2.173.700.376.240,38	2.181.278.491.148,53

Ekuitas Akhir adalah nilai kekayaan bersih pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 yang berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Ekuitas Akhir juga merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan di Neraca.

Saldo Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Pasangkayu sampai tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp2.173.700.376.240,38 atau menurun senilai Rp7.578.114.908,15 atau -0,35% dibandingkan saldo untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp2.181.278.491.148,53.

7.6. PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Pasangkayu, dapat disimpulkan sebagai berikut:

7.6.1 Laporan Realisasi Anggaran

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada Tahun Anggaran 2024 secara umum untuk pendapatan dan belanja serta pembiayaan sebagai berikut:

1. Pendapatan Berdasarkan kebijakan umum di bidang Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu dan upaya-upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah yang telah dilaksanakan selama ini, maka Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2024 secara kumulatif direncanakan senilai Rp842.795.145.456,00 dan terealisasi senilai Rp852.847.983.621,86 atau 101,19% yang terdiri dari:
 - A. Pendapatan Asli Daerah dianggarkan senilai Rp49.197.032.611,00 dan terealisasi senilai Rp61.101.297.060,86 atau 124,20%%. Menurut jenisnya Pendapatan Asli Daerah ini terdiri dari:
 1. Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 ini direncanakan senilai Rp14.833.315.952,00 terealisasi senilai Rp22.965.168.782,36 atau 154,82%.
 2. Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 ini direncanakan senilai Rp5.814.633.543,00 terealisasi senilai Rp8.262.414.576,08 atau 142,10%.
 3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah/BUMD yang dipisahkan, senilai Rp3.159.163.585,00 terealisasi senilai Rp3.173.536.172,00 atau 100,45%.
 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada perubahan anggaran senilai Rp25.389.919.531,00 yang sampai akhir tahun anggaran 2024 dapat direalisasi senilai Rp26.700.177.530,42 atau 105,16%.
 - B. Pendapatan Transfer pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp786.416.210.653,00 yang sampai akhir tahun anggaran 2024 terealisasi senilai Rp784.455.018.458,00 atau 99,75% dengan rincian sebagai berikut:
 1. Bagi Hasil Pajak pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp7.846.503.000,00. Realisasi sampai akhir tahun 2024 senilai Rp9.531.487.000,00 atau 121,47%.
 2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp12.190.176.000,00 Realisasi sampai akhir tahun 2024 senilai Rp12.192.946.000,00 atau 100,02%.
 3. Dana Alokasi Umum ditargetkan senilai Rp496.999.363.000,00. Sampai akhir Tahun Anggaran 2024 dapat direalisasikan senilai Rp496.999.363.000,00 atau 100,00%.
 4. Dana Alokasi Khusus Fisik ditargetkan senilai Rp103.477.705.000,00 dan terealisasi 102.005.217.974,00 atau 98,58% pada akhir Tahun Anggaran 2024.

5. Dana Alokasi Khusus Non Fisik ditargetkan sebesar Rp79.644.586.000,00 dan terealisasi senilai Rp74.291.745.640,00 atau 93,28%.
 6. Dana Transfer Pemerintah Pusat Lainnya ditargetkan senilai Rp54.694.684.000,00 dapat direalisasikan senilai Rp54.694.684.000,00 atau 100,00% sampai pada akhir Tahun Anggaran 2024.
 7. Dana Transfer Pemerintah Provinsi merupakan bagi hasil pajak yang dianggarkan untuk tahun 2024 senilai Rp31.563.193.653,00 dan terealisasi senilai Rp34.739.574.844,00 atau 110,06%.
- C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan senilai Rp7.181.902.192,00 realisasi sampai akhir tahun 2024 senilai Rp7.291.668.103,00 atau 101,53% dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Hibah pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp7.181.902.192,00 dan terealisasi senilai Rp7.291.668.103,00 atau 101,53%.
 2. Pendapatan Lainnya dianggarkan sebesar Rp0,00 realisasi sampai akhir tahun 2024 senilai Rp0,00 atau 0,00%.

2. Belanja

Pada perubahan anggaran 2024 ini, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dianggarkan kedalam belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja bantuan keuangan. Di dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dialokasikan dana untuk belanja daerah senilai Rp786.200.486.924,00 yang sampai akhir Tahun Anggaran 2024 dapat terealisasi senilai Rp746.087.485.394,00 atau 94,90%.

3. Transfer

Pada perubahan anggaran tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu menganggarkan transfer berupa Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dengan total senilai Rp106.616.636.595,00 dan terealisasi dengan total senilai Rp106.396.589.423,00 atau 99,79%.

4. Pembiayaan

Sumber-sumber pembiayaan daerah Kabupaten Pasangkayu dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas :

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah pada tahun 2024 setelah perubahan dianggarkan senilai Rp50.021.978.063,00 dan pada akhir tahun anggaran dapat direalisasikan senilai Rp50.045.678.063,32 atau 100,05% yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu pada Tahun Anggaran 2023 setelah perubahan.

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah dianggarkan setelah perubahan pada tahun 2024 senilai Rp0,00 dan pada akhir tahun anggaran tidak ada realisasi atau senilai Rp0,00.

5. Silpa

Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran pada tahun 2024 senilai Rp50.409.586.868,18 terdapat bagian dari silpa yang merupakan kas yang dibatasi penggunaannya.

7.6.2 Laporan Perubahan SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan Saldo Anggaran Lebih pemerintah yang mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan.

Saldo Anggaran Lebih Awal senilai Rp50.021.978.063,32 sedangkan Saldo Anggaran Lebih akhir senilai Rp50.409.586.868,18.

7.6.3 Neraca

1. Aset

Aset Pemerintah Kabupaten Pasangkayu secara keseluruhan pada tahun 2024 senilai Rp2.185.957.858.441,94 atau turun senilai Rp11.842.023.081,49 atau 0,54% dibandingkan tahun 2023 senilai Rp2.197.799.881.523,43 aset tersebut terdiri atas:

a. Aset Lancar

Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Pasangkayu tahun 2024 senilai Rp71.855.692.434,02 jumlah tersebut mengalami kenaikan senilai Rp967.296.605,62 atau 1,36% dari tahun 2023 senilai Rp70.888.395.828,40.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Pasangkayu tahun 2024 senilai Rp17.395.000.000,00 jumlah tersebut tidak mengalami kenaikan/penurunan senilai Rp0,00 atau 0,00% dari tahun 2023 senilai Rp17.395.000.000,00.

c. Aset Tetap

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Pasangkayu tahun 2024 senilai Rp2.068.765.672.553,83 jumlah tersebut mengalami penurunan senilai Rp13.245.615.015,94 atau 0,64% dibandingkan tahun 2023 senilai Rp2.082.011.287.569,77.

d. Dana Cadangan

Pada Tahun Anggaran 2024 maupun 2023 tidak terdapat dana cadangan pada Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya pada Neraca tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Pasangkayu senilai Rp27.941.493.454,09 jumlah tersebut mengalami kenaikan senilai Rp436.295.328,83 atau 1,59% dibandingkan tahun 2023 senilai Rp27.505.198.125,26.

2. Kewajiban

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2024 senilai Rp12.257.482.201,56 jumlah tersebut mengalami penurunan senilai Rp4.263.908.173,34 atau 25,81% dibandingkan Tahun 2023 senilai Rp16.521.390.374,90. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Pasangkayu terdiri atas:

- a. Kewajiban Jangka Pendek
Kewajiban Jangka Pendek pada tahun 2024 senilai Rp12.257.482.201,56 sedangkan Tahun 2023 senilai Rp16.521.390.374,90.
- b. Kewajiban Jangka Panjang
Tidak terdapat kewajiban jangka panjang pada Tahun Anggaran 2024 maupun 2023.

3. Ekuitas

Ekuitas Pemerintah Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2024 senilai Rp2.173.700.376.240,38 jumlah tersebut mengalami penurunan senilai Rp7.578.114.908,15 atau 0,35% dibandingkan tahun 2023 senilai Rp2.181.278.491.148,53.

7.6.4 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

1. Jumlah Pendapatan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp 857.435.909.060,45.
2. Jumlah Beban Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp 863.077.636.619,15
3. Dari kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 mengalami kondisi defisit senilai -Rp5.641.727.558,70.
4. Jumlah surplus/defisit dari kegiatan non operasional pada Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 senilai -Rp1.450.272.453,00.
5. Jumlah Beban Luar Biasa untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 senilai -Rp483.328.000,00.
6. Jumlah surplus/defisit-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 senilai -Rp7.575.328.011,70

7.6.5 Laporan Arus Kas

Selama Tahun Anggaran 2024 kas Pemerintah Kabupaten Pasangkayu mengalami kenaikan senilai Rp384.110.677,86. Kenaikan saldo kas ini merupakan akumulasi dari :

1. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi per 31 Desember 2024 senilai Rp181.993.843.627,86

2. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi non keuangan per 31 Desember 2024 senilai –Rp181.629.934.823,00
3. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan per 31 Desember 2024 senilai Rp23.700.000,00.
4. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas Non Anggaran per 31 Desember 2024 senilai –Rp3.498.127,00.

7.6.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas, penambahan atau pengurangan surplus (defisit) dari operasional tahun berjalan serta dampak akumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan dan adanya kesalahan mendasar.

1. Pada tahun 2024 terdapat saldo awal ekuitas senilai Rp2.181.278.491.148,53 yang merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2023.
2. Surplus/defisit–LO tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Pasangkayu senilai –Rp7.575.328.011,70 merupakan defisit dalam laporan operasional (basis akrual) yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca.
3. Jumlah dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar yang mempengaruhi saldo ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 senilai -Rp2.786.896,45.
4. Saldo Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp2.173.700.376.240,38.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2024, untuk dibahas sekaligus dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

